



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017-2022

LAPORAN AKHIR



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jl. H.M. Rafi'I No. 3, Pangkalan Bun, Prop. Kalimantan Tengah, 74112

TAHUN
ANGGARAN

2017

2017

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017-2022

LAPORAN AKHIR





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran tuhan atas karunia serta anugrah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang merupakan tahap final dari pekerjaan penyusunan **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022**.

Pada dasarnya laporan ini merupakan laporan awal menuju pada laporan selanjutnya yang menjadi analisis pekerjaan. Adapun hal-hal yang diuraikan dalam laporan ini antara lain latar belakang serta maksud dan tujuan dari pekerjaan, gambaran umum, proses, lingkup kegiatan, metode, daftar panjang isu-isu, hasil pengkajian KLHS (keterkaita, keseimbangan, keadilan), dan rekomendasi dari pekerjaan penyusunan **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022**.

Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu hingga terselesaikannya kegiatan Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD ini.

Hormat Kami,

Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
-------------------------------	------------

1.1	LATAR BELAKANG	I-1
1.2	MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN	I-3
1.3	RUANG LINGKUP	I-4
1.3.1	Lingkup Wilayah	I-4
1.3.2	Lingkup Substansi	I-4
1.4	DASAR HUKUM	I-4
1.5	WAKTU PELAKSANAAN	I-6
1.6	KENDALA PELAKSANAAN	I-6
1.7	SISTEMATIKA PEMBAHASAN	I-6

BAB II	PROFIL WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT ..	II-1
---------------	---	-------------

2.1	ASPEK GEOGRAFIS DAN FISIK DASAR	II-1
2.1.1	Letak Geografis dan Administrasi	II-1
2.1.2	Kondisi Fisik Wilayah	II-3
2.2	ASPEK TATA RUANG WILAYAH	II-14
2.2.1	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	II-14



2.2.2	Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)	II-15
2.2.3	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	II-15
2.2.4	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).....	II-16
2.3	ASPEK DEMOGRAFI.....	II-17
2.4	ASPEK EKONOMI WILAYAH	II-18
2.4.1	Pertanian	II-18
2.4.2	Perkebunan.....	II-19
2.4.3	Perikanan	II-19
2.4.4	Peternakan	II-19
2.4.5	Kehutanan	II-19
2.4.6	Industri	II-20
2.4.7	Pertambangan.....	II-20
2.4.8	Pariwisata	II-21
2.4.9	Pesisir dan Kelautan.....	II-21
2.5	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2017-2022.....	II-22
2.5.1	Visi.....	II-22
2.5.2	Misi	II-22
2.5.3	Tujuan dan Sasaran.....	II-22

BAB III PROSES, LINGKUP KEGIATAN, METODE, DAN HASIL

	PELAKSANAAN KLHS	III-1
3.1	PRINSIP DASAR KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	III-1
3.2	PENDEKATAN PENYUSUNAN	III-4
3.2.1	Pendekatan.....	III-4
3.2.2	Metode Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-5
3.3	METODE PENGUMPULAN DATA.....	III-6



3.3.1	Survey Lapangan.....	III-6
3.3.2	Survey Instansional	III-7
3.3.3	Diskusi/ Wawancara.....	III-7
3.4	TAHAP PERSIAPAN	III-8
3.5	TAHAP PRA PELINGKUPAN	III-8
3.6	TAHAP PELINGKUPAN	III-19
3.7	TAHAP PENGKAJIAN	III-23
3.7.1	Kajian Pengaruh RPJMD	III-56
3.7.2	Kajian Dampak Negatif Program terhadap Isu	III-62
3.7.3	Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif Dampak	III-64
3.8	REKOMENDASI	III-66

BAB IV PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS KE DALAM RANCANGAN RPJMD IV-1

4.1	KONSEP INTEGRASI.....	IV-1
4.2	PRAKTEK INTEGRASI	IV-2
4.2.1	Tiga Komponen Utama KLHS.....	IV-2
4.2.2	Kajian terhadap Isu Strategis.....	IV-4
4.2.3	Integrasi Rekomendasi.....	IV-5

BAB V HASIL PENGAWASAN MUTU IV-1

5.1	HASIL PENGAWASAN MUTU	V-1
-----	-----------------------------	-----



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan.....	II-1
Tabel 2. 2	Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-3
Tabel 2. 3	Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-4
Tabel 2. 4	Suhu Udara Rata-Rata Maksimum/Minimum dan Kelembaban Udara	II-5
Tabel 2. 5	Kecepatan Angin Rata-Rata(Knot).....	II-5
Tabel 2. 6	Banyaknya Curah Hujan di Kabupaten Kotawaringin Barat (mm) ..	II-5
Tabel 2. 7	Keadaan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-6
Tabel 2. 8	Formasi Geologi Di Kabupaten Kotawaringin Barat	II-9
Tabel 2. 9	Land System di Kabupaten Kotawaringin Barat	II-10
Tabel 2. 10	Penggunaan Lahan Di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-12
Tabel 2. 11	Rencana Sistem Pusat Perkotaan/Kegiatan	II-16
Tabel 2. 12	Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2001 – 2007	II-18
Tabel 2. 13	Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009	II-18
Tabel 2. 14	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022.....	II-23
Tabel 3. 1	Daftar Panjang Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022.....	III-8
Tabel 3. 2	Hasil Verifikasi dan Pengelompokan Daftar Panjang Isu	III-11
Tabel 3. 3	Hasil Pra Pelingkupan Isu Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Tema	III-13
Tabel 3. 4	Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan vs Kriteria	III-20
Tabel 3. 5	Pembobotan Kriteria.....	III-21
Tabel 3. 6	Penilaian - Pembobotan Isu Pembangunan Berkelanjutan vs Kriteria	III-22
Tabel 3. 8	Kajian Pengaruh RPJMD dengan RTRW	III-26
Tabel 3. 9	Kajian Konsistensi RPJMD Kabupaten/Kota – Provinsi - Nasional	III-36



Tabel 3. 10 Kajian Persandingan Rencana Pembangunan Daerah Sekitar	III-41
Tabel 3. 11 Instrumen Kajian Prinsip Keterkaitan RPJMD	III-46
Tabel 3. 12 Instrumen Kajian Prinsip Keseimbangan RPJMD	III-50
Tabel 3. 13 Instrumen Kajian Prinsip Keadilan RPJMD	III-53
Tabel 3. 14 Indikasi Program Prioritas	III-57
Tabel 3. 15 Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh	III-60
Tabel 3. 16 Analisis Pengaruh Kumulatif Dampak Negatif terhadap Isu Pembangunan Berkelanjutan	III-63
Tabel 3. 17 Instrumen Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif RPJMD dan Renstra SKPD	III-65
Tabel 3. 18 Instrumen Perumusan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD	III-67
Tabel 5. 1 Instrumen Pengawasan Mutu Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022	V-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	II-2
Gambar 2. 2 Peta Guna Lahan	II-13



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada posisi 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, dan 111°20'-112°6' Bujur Timur. Luas wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km².

Proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menunjukkan hasil yang positif di berbagai segi kehidupan masyarakat, meskipun dalam beberapa hal masih terdapat isu-isu yang terus-menerus menjadi perhatian untuk dapat diatasi secara optimal.

Secara praktis, KLHS wajib diintegrasikan kedalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) beserta rencana rincinya, termasuk memaduserasikan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen seperti diantaranya dokumen lingkungan dan kajian-kajian teknis lainnya; dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup secara optimal mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan, rencana dan/atau program.

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15), menyebutkan bahwa Pemerintah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa



.....

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS adalah sebuah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif, dan merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

Berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SE.04/Menlhk-II/2015 Tanggal 13 Mei 2015 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), mengamanatkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sesuai dengan kewenangannya. Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJMD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kegiatan yang harus dilaksanakan pasca terselenggaranya KLHS adalah melaksanakan publikasi laporan KLHS. Adapun dokumen pelaksanaan KLHS merupakan dokumen publik yang harus dapat diakses oleh setiap orang. Dalam kasus tertentu, pembuat kebijakan dapat mengadakan publikasi atau



.....

pengumuman hasil kegiatan KLHS. Pengumuman ini dapat berupa penyelenggaraan sosialisasi yang dapat ditanggapi oleh publik. Ada baiknya, kegiatan ini dalam format diskusi yang konstruktif melalui dialog intensif. Dalam hal pemantauan dan/atau evaluasi terhadap implementasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang telah melalui proses KLHS, dilakukan sesuai prosedur pemantauan dan/atau evaluasi masing – masing kebijakan, rencana, dan/atau program.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Penyusun Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dimaksudkan sebagai upaya pengkajian terhadap Kebijakan Rencana dan Program yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 telah memenuhi kaidah lingkungan dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Sedang tujuan penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat; dan.
2. Meningkatkan kualitas RPJMD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan KLHS RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Terinventarisasinya kajian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Terinventarisasinya kondisi fisik alam, sumberdaya alam, demografi, sarana dan prasarana, sosial ekonomi, dan kondisi lingkungan hidup (misalnya : isu-isu lingkungan hidup, sumber dan potensi pencemaran lingkungan hidup, masalah lingkungan hidup dan lain-lain) Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Terumuskannya pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - a. Teridentifikasinya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;



- b. Teridentifikasinya isu pembangunan berkelanjutan;
 - c. Teridentifikasinya Kebijakan, Rencana, dan/atau Program RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
 - d. Terumuskannya hasil telaah pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Terumuskannya alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
 5. Terumuskannya rekomendasi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat dan pengintegrasian hasil KLHS.

1.3 RUANG LINGKUP

1.3.1 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah pelaksanaan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 10.759 km².

1.3.2 Lingkup Substansi

Lingkup materi/ kegiatan dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, secara garis besar yaitu:

- a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Tahun 2017-2022 terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Tahun 2017-2022; dan
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 – 2022 meliputi:



1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);



11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2025.

1.5 WAKTU PELAKSANAAN

Seluruh rangkaian kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 diselenggarakan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak SPMK diterbitkan. Kegiatan dimulai dengan tahap persiapan, kegiatan lapangan, kegiatan diskusi, kegiatan kompilasi dan analisa data, kegiatan pelaporan, kegiatan penyerahan akhir kegiatan dan seminar. Keseluruhan kegiatan pelaksanaan KLHS secara lengkap dan tercantum dalam laporan atau dokumen tertulis.

1.6 KENDALA PELAKSANAAN

Secara umum, pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 - 2022 ini tidak mengalami kendala berarti, namun masih ada kendala yang terkait dengan:

1. Dukungan data secara series untuk mendukung analisis *base-line* terkait isu-isu lingkungan, ekonomi, dan sosial.
2. Dukungan data terkait pembuatan peta/ analisis spasial.

1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Laporan Pendahuluan dari kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 - 2022 ini disusun berdasar pada sistematika sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup kegiatan dan wilayah, dasar hukum, waktu pelaksanaan, kendala pelaksanaan serta sistematika pembahasan dalam penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 – 2022.

BAB II PROFIL WILAYAH

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum wilayah perencanaan yakni Kabupaten Kotawaringin Barat. Gambaran umum yang akan diuraikan meliputi kondisi fisik dasar, kondisi sosio-kependudukan, kondisi perekonomian wilayah, serta kondisi pemanfaatan ruang yang terdapat pada wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB III PROSES, LINGKUP KEGIATAN, METODE DAN HASIL

Pada bab ini berisi tentang metode dan pendekatan pelaksanaan kegiatan yang meliputi metode pengumpulan data dan informasi, metode analisa serta metode penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 – 2022.

BAB IV PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS

Pada bab ini berisi tentang konsep integrasi, praktek integrasi ketiga komponen KLHS ke dalam Rancangan RPJMD RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022.

BAB V HASIL PENGAWASAN MUTU



BAB II PROFIL WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN FISIK DASAR

2.1.1 Letak Geografis dan Administrasi

Secara geografis berdasarkan peta rekomendasi RTRWK tahun 2009 berada pada posisi adalah $1^{\circ}26'$ - $3^{\circ}33'$ Lintang Selatan, $111^{\circ}13'$ - $112^{\circ}6'$ Bujur Timur. Secara administratif, luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 Km² yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan meliputi: Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng. Adapun batas-batas wilayah secara administratif, yaitu sebagai berikut:

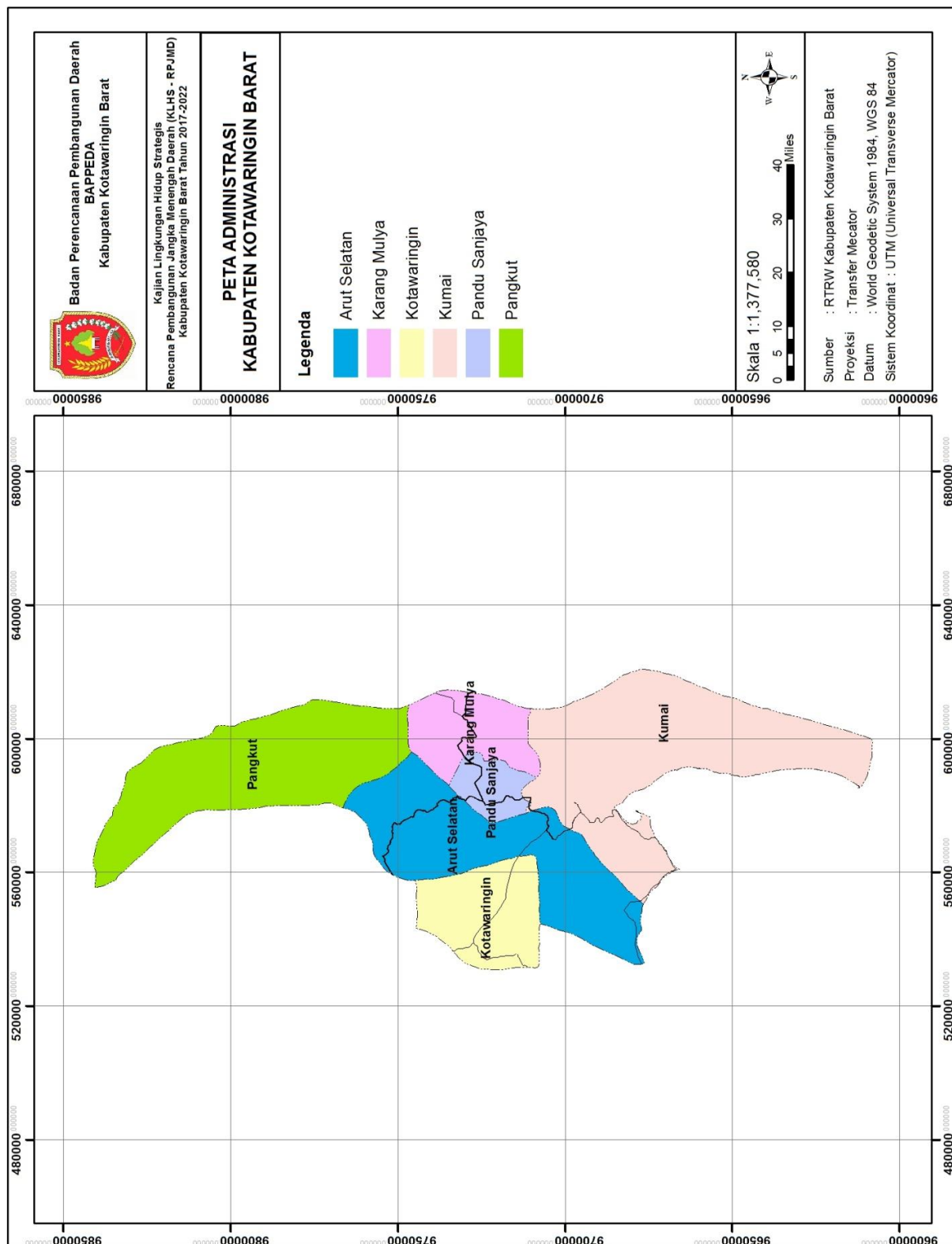
- sebelah Utara : Kabupaten Lamandau
- sebelah Selatan : Kabupaten Laut Jawa
- sebelah Barat : Kabupaten Sukamara dan Lamandau
- sebelah Timur : Kabupaten Seruyan

Untuk lebih jelasnya mengenai Kecamatan serta luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km²)	Prosentase Luas Terhadap Kabupaten
1.	Arut Selatan	2.400	22,31
2.	Kumai	2.921	28,13
3.	Kotawaringin Lama	1.218	11,32
4.	Arut Utara	2.685	24,96
5.	Pangkalan Lada	229	3,08
6.	Pangkalan Banteng	1.306	10,21
Kotawaringin Barat		10.759	100,00

Sumber : Penduduk Kotawaringin Barat, BPS Tahun 2009



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat



2.1.2 Kondisi Fisik Wilayah

A. Topografi

Ketinggian merupakan faktor yang penting dalam penyebaran kegiatan budidaya terutama pertanian, sehingga ketinggian merupakan faktor yang perlu diperhatikan didalam pembangunan pertanian dalam arti luas. Ketinggian tempat dari permukaan air laut berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata-rata 0,6°, sehingga makin tinggi suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut mempunyai suhu lebih rendah. Rincian luas wilayah berdasarkan ketinggian di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	Luas (Ha)					Jumlah
		0 – 7 m	7 – 25 m	25–100 m	100–500 m	> 500 m	
1.	Kotawaringin Lama	3.365,80	39.882,86	65.419,93	4.810,42	165,39	113.643,89
2.	Arut Selatan	20.550,80	69.478,81	70.475,03	35.504,88	21.654,33	217.663,86
3.	Kumai	169.112,31	109.700,59	22.572,55	0	0	301.385,44
4.	Pangkalan Banteng	15.426,27	1.183,84	50.624,44	5.598,03	0	72.832,58
5.	Pangkalan Lada	15.426,27	1.183,84	50.624,44	5.598,03	0	72.832,58
6.	Arut Utara	0	0	29.225,39	96.718,10	123.507,29	249.450,97
Jumlah		215.644,74	220.246,10	262.437,02	142.631,43	145.327,20	986.286,49

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2009

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa - rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Wilayah daratan dengan ketinggian 0 - 7 m dari permukaan laut mempunyai areal yang cukup luas dan lokasinya menyebar, meliputi seluas 215.644,74 Ha atau 21,86% dari luas wilayah. Wilayah ini mempunyai sifat datar dan dipengaruhi pasang surut. Wilayah dengan ketinggian 100 - 500 m dari permukaan laut juga cukup luas yaitu 142.631,43 Ha atau 14,46 % dan lokasinya juga menyebar. Wilayah dengan ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut, ada seluas 145.327,20 Ha atau 14,73% dari luas wilayah. Pada daerah ini sebagian besar merupakan daerah perbukitan hingga brgunung dengan kelerengan lebih dari 40 %, sangat berpotensi erosi.



B. Kelerengan

Persebaran kondisi kelerengan di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup variatif. Tipe kelerengan 2 - 15 % banyak mewarnai kondisi wilayahnya, yaitu sekitar 462.109,68 Ha atau 46,85 % dari total wilayah, disusul kemudian oleh tipe kelerengan 0 – 2 % dan 15 – 40 % masing-masing sekitar 292.410,98 Ha dan 159.305,86 Ha. Lahan dengan kemiringan > 40 % seluas 72.459,964 ha atau 7,35 % dari luas wilayahnya.

Dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan lahan, mayoritas lahan di daerah ini dapat diarahkan penggunaannya untuk budidaya pertanian, jika faktor lain mendukung. Lahan ini adalah lahan yang mempunyai kemiringan <40%. Lahan yang mempunyai kemiringan > 40% karena lahan ini termasuk peka terhadap erosi. Kelerengan di atas 40 penyebarannya terkonsentrasi di bagian utara, dimana ketinggian wilayahnya di atas 500 meter di atas permukaan laut. Tipe kelas lereng ini hanya terdapat di wilayah Kecamatan Arut Utara. Rincian luasan masing-masing kelas lereng dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Jumlah
		0 – 2 %	2 – 15 %	15 – 40 %	> 40 %	
1	Kotawaringin Lama	45.903,35	64.739,94	3.000,60	0	113.643,89
2	Arut Selatan	113.593,76	69.107,06	34.963,03	0	217.663,86
3	Kumai	278.812,90	22.572,55	0	0	301.385,44
4	Pangkalan Banteng	16.610,11	56.222,47	0	0	72.832,58
5	Pangkalan Lada	7.189,56	24.120,18	0	0	31.309,74
6	Arut Utara	0	292.410,98	121.342,23	72.460,00	249.450,98
Jumlah		462.109,98	292.410,98	159.305,86	72.460,00	986.286,49
%		46,85	29,65	16,15	7,35	100

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2007

C. Klimatologi

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada daerah beriklim panas dan lembab. Hal ini disebabkan karena secara geografis, masih terletak di sekitar khatulistiwa dan bercurah hujan tinggi. Suhu maksimum berkisar 30,9°C – 32,7 °C dan suhu minimum antara 22,5°C - 23,7°C. Rata-rata kecepatan angin dalam 10 tahun terakhir berkisar antara 4 - 6 knot. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan September. Jumlah hari hujan 202 hari. Curah Hujan di



Kabupaten Kotawaringin Barat mulai dari wilayah Selatan hingga ke pedalaman yang menjadi semakin meningkat. Jumlah curah hujan 3.000 mm/tahun dalam 10 tahun terakhir. Rincian kondisi suhu udara, kecepatan angin dan banyaknya curah hujan disajikan pada Tabel 2.4, Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2. 4 Suhu Udara Rata-Rata Maksimum/Minimum dan Kelembaban Udara

No.	Bulan	Suhu Udara (°C)				Kelembaban Udara (%)	
		2006		2007		2006	2007
		Maks	Min	Maks	Min		
1.	Januari	32,0	23,	31,8	23,2	87	88
2.	Pebruari	32,3	23,0	32,0	23,3	90	88
3.	Maret	32,8	23,1	32,7	23,3	88	86
4.	April	31,0	22,6	32,0	23,4	88	89
5.	Mei	32,5	23,4	32,5	23,7	88	88
6.	Juni	30,5	22,8	31,2	23,4	90	89
7.	Juli	31,8	22,4	30,9	22,6	80	88
8.	Agustus	32,0	21,3	31,0	22,5	84	85
9.	September	32,8	21,8	31,8	22,7	80	84
10.	Oktober	33,8	21,6	32,0	22,9	78	87
11.	Nopember	32,6	23,0	32,1	23,2	86	89
12.	Desember	31,3	22,8	31,4	23,4	88	89

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka, Tahun 2007

Tabel 2. 5 Kecepatan Angin Rata-Rata(Knot)

No.	Bulan	1999	2000	2001	2002	2003	2007	2005	2006	2007
1.	Januari	05	05	05	05	06	05	05	06	06
2.	Pebruari	05	05	06	05	05	05	05	06	05
3.	Maret	05	06	05	05	05	05	05	05	06
4.	April	06	05	05	05	05	05	05	05	05
5.	Mei	06	05	05	05	06	05	06	05	05
6.	Juni	06	05	05	05	06	06	06	05	06
7.	Juli	05	06	06	06	06	06	06	05	06
8.	Agustus	05	06	07	07	06	06	06	06	06
9.	September	05	06	06	07	06	06	06	07	06
10.	Oktober	05	05	05	06	06	06	06	07	06
11.	Nopember	06	05	06	06	05	05	05	05	06
12.	Desember	05	05	06	05	06	05	06	05	05

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka, Tahun 2007

Tabel 2. 6 Banyaknya Curah Hujan di Kabupaten Kotawaringin Barat (mm)

No.	Bulan	Curah Hujan
1.	Januari	246,5
2.	Pebruari	295,7
3.	Maret	252,3
4.	April	339,4
5.	Mei	336,4
6.	Juni	215,5
7.	Juli	224,3
8.	Agustus	257,7
9.	September	104,7
10.	Oktober	141,5



11.	Nopember	325,5
12.	Desember	400,1
Tahun 2007		3.145,6
2006		2.492,7
2005		2.637,6
2004		2.286,3
2003		2.993,7
2002		3.133,1
2001		2.963,4

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka, Tahun 2006 Tahun 2007

D. Hidrologi

Potensi hidrologi Kabupaten Kotawaringin Barat cukup besar, terutama adanya aliran beberapa sungai, seperti Sungai Lamandau, Sungai Arut, Sungai Kumai, dan beberapa sungai kecil lainnya. Kondisi sungai - sungai utama di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2. 7 Keadaan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-rata Kedalaman (m)	Rata-rata Lebar (m)
1	Kumai	175.00	100.00	6.00	300.00
2	Lamandau	300.00	250.00	6.00	200.00
3	Arut	250.00	190.00	4.00	100.00

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka, Tahun 2007

E. Fisiografi

Fisiografi menjelaskan bentuk wilayah dilihat dari proses pembentukannya. Secara garis besar, satuan fisiografis yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat dikelompokkan kedalam 5 satuan fisiografi, yaitu:

1. Daerah dataran alluvial

Dataran alluvial merupakan dataran yang terbentuk oleh endapan sungai dan endapan laut akibat pengaruh pasang surut. Dataran ini dijumpai 2 – 5 km kiri kanan sepanjang Sungai Lamandau, Sungai Kumai dan sepanjang pantai. Daerah ini biasanya mempunyai drainase yang jelek.

2. Dataran Gambut

Dataran gambut atau *dome* terbentuk dari endapan bahan organik dalam kondisi drainase yang terhambat. Dataran ini dapat dijumpai di daerah Tanjung Puting, daerah belakang pantai dan daerah belakang sungai. Dataran gambut yang luas ditemukan diantara muara Sungai Lamandau dan Sungai Arut.



3. Daerah teras-teras

Daerah teras-teras ditemukan setelah dataran gambut dan daerah belakang pantai, terbentuk dari endapan tua dengan formasi material penyusun batuan pasir. Dataran ini banyak ditemukan pada sekitar pantai dan di daerah Tanjung Puting.

4. Daerah Dataran

Dataran ini merupakan daerah peralihan antara dataran teras-teras dengan daerah perbukitan. Dataran ini dijumpai mulai dari batas Tanjung Puting ke utara dan dari selatan Pangkalan Bun hingga utara di daerah Pangkut.

5. Daerah Perbukitan

Daerah perbukitan merupakan daerah patahan dan lipatan yang terbentuk dari batuan beku dengan material penyusun granit dan batuan pasir serta terbentuk dari endapan dengan bahan induk batuan liat, lempung dan pasir. Bentuk wilayah berbukit hingga bergunung. Daerah ini ditemukan sekitar jalan Runtu – Nanga Bulik dan sebelah utara Pangkut.

F. Jenis Tanah

Jenis tanah di daerah selatan berbeda jenis tanah yang terdapat di daerah utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- **Podsolik Merah Kuning**, tanah podsolik merah kuning merupakan jenis tanah yang sering dijumpai terletak menyebar di tengah sampai hulu sungai kecamatan Arut Utara, sedikit Arut Selatan dan kecamatan Kumai. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsolik ini adalah warna merah kuning dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam.
- **Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol)**, tanah regosol podsol merupakan jenis tanah terletak menyebar di tengah kecamatan



Kumai, Arut Selatan dan sedikit Kotawaringin Lama. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsol ini adalah warna coklat dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam.

- **Kompleks Regosol (Podsol)**, dijumpai menyebar dibagian Timur kecamatan Kumai, tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam.
- **Aluvial**, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di sekitar daerah aliran sungai Lamandau, Arut, dan Kumai serta di daerah pantai sampai sebagian tengah kecamatan Kumai. Tanah tersebut relatif lebih subur jika dibandingkan dengan tanah-tanah yang mengalami perkembangan lanjut.
- **Organosol**, tanah ini terbentuk dari bahan organik yang tertimbun di tempat tersebut, menyebar di kecamatan Kumai dan sedikit di kecamatan Kotawaringin lama dan Arut Selatan. Warna tanah ini hitam bersifat asam.
- **Oksisol (Lateritik)**, Jenis tanah oksilik (lateritik) terdapat bagian atas (hulu) kecamatan Arut Utara. Keadaan medan bergelombang, berbukit, dan bergunung dengan solum tanahnya dalam. Tanah jenis ini memiliki tekstur halus, berdrainase baik, hanya saja daerah ini curah hujan sangat tinggi. Warna tanah oksolik adalah kuning kemerahan dan termasuk jenis tanah yang telah lanjut mengalami perkembangan pelapukan.

G. Geologi

Susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat tersusun atas 10 formasi, yaitu :

1. Batuan Terobosan Sintang,
2. Granit Mandahan,
3. Granit Sukadana,
4. Batuan GA Berapi,
5. Tonalik Sepauk,



6. Formasi Dahor,
7. Endapan Rawa,
8. Batuan Gunungapi,
9. Alluvium, dan
10. Formasi Laut.

Rincian mengenai susunan geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2. 8 Formasi Geologi Di Kabupaten Kotawaringin Barat

Jenis Formasi	Kecamatan						Jumlah	Persentase (%)
	Ktw. Lama	Arut Selatan	Kumai	Arut Utara	Pangk. Banteng	Pangk. Lada		
Batuan Terobosan Sintang	0	0	0	89,22	0	0	89,22	0,01
Granit Mandahan	265,77	0	0	1.159,50	0	0	1.425,27	0,16
Granit Sukadana	0	0	0	84.598,66	0	0	84.598,66	9,71
BatuanGA Berapi	10.173,09	0	0	2.115,31	0	0	12.288,40	1,41
Tonalit Sepauk	0	0	0	47.049,37	0	0	47.049,37	5,40
Formasi Dahor	50.565,04	50.084,89	57.449,03	5.959,05	34.956,68	24.208,56	223.223,25	25,61
Endapan Rawa	52.640,00	118.916,03	120.353,27	0	37.083,02	7.101,18	336.093,50	38,56
Batuan Gunungapi	0	48.533,61	0	108.479,87	792,87	0	157.806,35	18,11
Alluvium	0	0	1.997,15	0	0	0	7.041,34	0,81
Formasi Laut	0	0	1.997,15	0	0	0	1.997,15	0,23
JUMLAH	113.643,89	217.663,86	186.711,46	249.450,98	72.832,57	31.309,74	871.612,50	100,00

Sumber : Diolah dari Peta Geologi Kalimantan Tengah, Tahun 2004

* Luas lebih kecil, karena sebagian data tidak ada di Kawasan Taman Nasional Tanjung Putting.

Berdasarkan Tabel 2.8 diatas terlihat bahwa formasi geologi terbanyak yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah formasi endapan rawa dan formasi dahor masing-masing seluas 336.093,50 Ha dan 223.223,25 Ha.

H. Sistem Lahan

Sistem lahan adalah pengelompokan lahan berdasarkan kesamaan karakteristik fisik, seperti lereng, fisiografi, batuan induk dan jenis tanah. Sistem lahan ini dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan kesesuaian lahan untuk berbagai peruntukan lahan, utamanya untuk penggunaan pertanian dan kehutanan. Berdasarkan hasil studi Repprot tahun 1992, sistem lahan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, terdiri dari 23 sistem lahan, seperti yang terdapat pada Tabel 2.9.



Tabel 2. 9 Land System di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sistem Lahan	Luas (Ha)	Batuan Induk	Jenis Tanah/Ordo	Lereng (%)	Bentuk Medan
Kahayan (KHY)	67.425,63	Endapan Sungai	Entisol, Inceptisol	0 - 2	Datar
Kajapah (KJP)	27.594,89	Endapan laut, pasang surut	Entisol	0 - 2	Datar
Beliti (BLI)	11.148,80	Endapan sungai dan bahan organik	Entisol	0 - 2	Datar
Gambut (GBT)	138.521,22	Endapan bahan organik	Histosol	0 - 2	Datar
Mendawai (MDW)	28.981,43	Endapan bahan organik dan sungai	Histosol, Entisol	0 - 2	Datar
Bawin (BWN)	160.583,67	Endapan liat, Lempung dan pasir	Ultisol	0 - 2	Datar – bergelombang
BRH (Barah)	13.094,84	Endapan pasir dan bahan organik	Histosol, Entisol	0 - 2	Datar
SBG (Sebangau)	6.957,74	Endapan liat dan Lempung	Entisol	0 - 2	Datar
SGT (Sigintung)	105.551,99	Endapan pasir	Entisol	0 - 2	Datar
SRM (Sirimbang)	34.999,52	Endapan pasir	Entisol	0 - 2	Datar
TBA (Tambera)	28,35	Batuan beku	Ultisol, Inceptisol	> 40	Sangat curam
TWI (Talawi Baru)	2.856,50		Ultisol, Inceptisol	> 40	Sangat curam
Putting (PTG)	16.850,43	Endapan laut dan pasir	Entisol	0 - 2	Datar
BKN (Bakunan)	1.975,21	Endapan sungai	Entisol	0 - 2	Datar
Klaru (KLR)	8.890,71	Endapan pasir	Entisol	0 - 2	Datar
Pakunan (PKU)	19.280,76	Endapan pasir	Entisol	2 - 8	Datar - bergelombang
Honja (HJA)	86.438,62	Batuan beku	Ultisol	15 - 25	Agak curam
Rangankau (RGK)	58.446,22	Batuan beku	Ultisol	2 - 8	Datar-bergelombang
Pakalunai (PLN)	46.000,48	Batuan endapan	Ultisol, Inceptisol	16 - 25	Agak curam
Bukit Pandan (BPD)	69.575,11	Batuan endapan	Ultisol, Inceptisol	> 40	Sangat curam
Lawangumang (LWW)	54.217,76	Batuan endapan	Ultisol, Inceptisol	2 - 8	Datar-bergelombang
Juloh (JLH)	26.866,76	Batuan endapan	Ultisol, Inceptisol	25 - 40	Curam
986.286,49	-	-	-	-	

Sumber: Peta *Land System* Kalimantan Tengah

Berdasarkan Tabel 2.9 diatas dapat dijelaskan bahwa distribusi tanah alluvial sebesar 11,46 % dan terdiri atas satuan lahan KHY, KJP, SBG dan BLI. Tanah yang tersusun dari material endapan liat membentuk tanah alluvial yang banyak ditemui di bantaran sungai. Umumnya tanah ini merupakan tanah yang relatif lebih subur, sehingga sebagian besar tanah ini merupakan tanah yang relatif lebih subur, sehingga sebagian besar tanah ini telah digunakan untuk lokasi usaha tani dan permukiman. Tanah alluvial lainnya dengan material penyusunan pasir meliputi 18,87 %, terdiri dari satuan lahan SGT, PTG, SRM, KLR, dan PKU; selebihnya adalah tanah mineral jenis ultisol dan inceptisol. Khusus sistem lahan



KJP merupakan tanah alluvial yang terbentuk dari endapan laut yang dipengaruhi oleh pasang surut laut. Untuk tanah gambut besarnya 18,30 % dan terdiri dari satuan lahan GBT, MDW, dan BRH. Tanah ini terbentuk dari batuan endapan bahan organik. Dalam kondisi jenuh air yang membentuk tanah organik atau gambut.

Sistem lahan JLH, TWA, TWI, dan BPD tersusun dari material liat sebagai hasil pelapukan batuan endapan. Dilihat dari aspek kemiringan lahan, mayoritas termasuk lereng di bawah 40 %. Lahan dengan kemiringan > 40 % luasannya sekitar 7,34 % yang terdiri dari satuan lahan TBA, TWI dan BPD. Bentuk medan sebagian besar termasuk landai sampai agak curam dan yang curam sampai sangat curam adalah sistem lahan JLH, Twa, TWI dan BPD. Sebaran tanah alluvial, gambut dan pasir dimulai dari bagian tengah hingga ke selatan, sedangkan tanah lainnya tersebar dari bagian tengah hingga ke utara. Tanah dengan kemiringan yang tinggi terdapat di bagian Utara.

Dilihat dari aspek kemiringan lahan, mayoritas termasuk lereng dibawah 40 %. Lahan dengan kemiringan > 40 % luasannya sekitar 10,47 % yang terdiri dari satuan lahan TWA, TWI dan BPD. Bentuk medan sebagian besar termasuk landai sampai agak curam dan yang curam sampai sangat curam adalah sistem lahan JLH, TWA, TWI dan BPD. Sebaran tanah alluvial, gambut dan pasir dimulai dari bagian tengah hingga ke selatan, sedangkan tanah lainnya tersebar dari bagian tengah hingga ke utara. Tanah dengan kemiringan yang tinggi terdapat di bagian Utara.

I. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di suatu daerah mencerminkan hubungan antara faktor fisik tanah dengan manusia dan kegiatannya. Suatu wilayah yang jumlah penduduknya masih sedikit akan memperlihatkan pola penggunaan tanah yang belum bervariasi. Penggunaan lahan dapat juga digunakan untuk menjelaskan struktur penggunaan lahan. Struktur penggunaan lahan bermanfaat untuk menganalisa komposisi penggunaan lahan dan memprediksi perubahan lingkungan sebagai akibat adanya perubahan penggunaan lahan.

Pola penggunaan tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu :



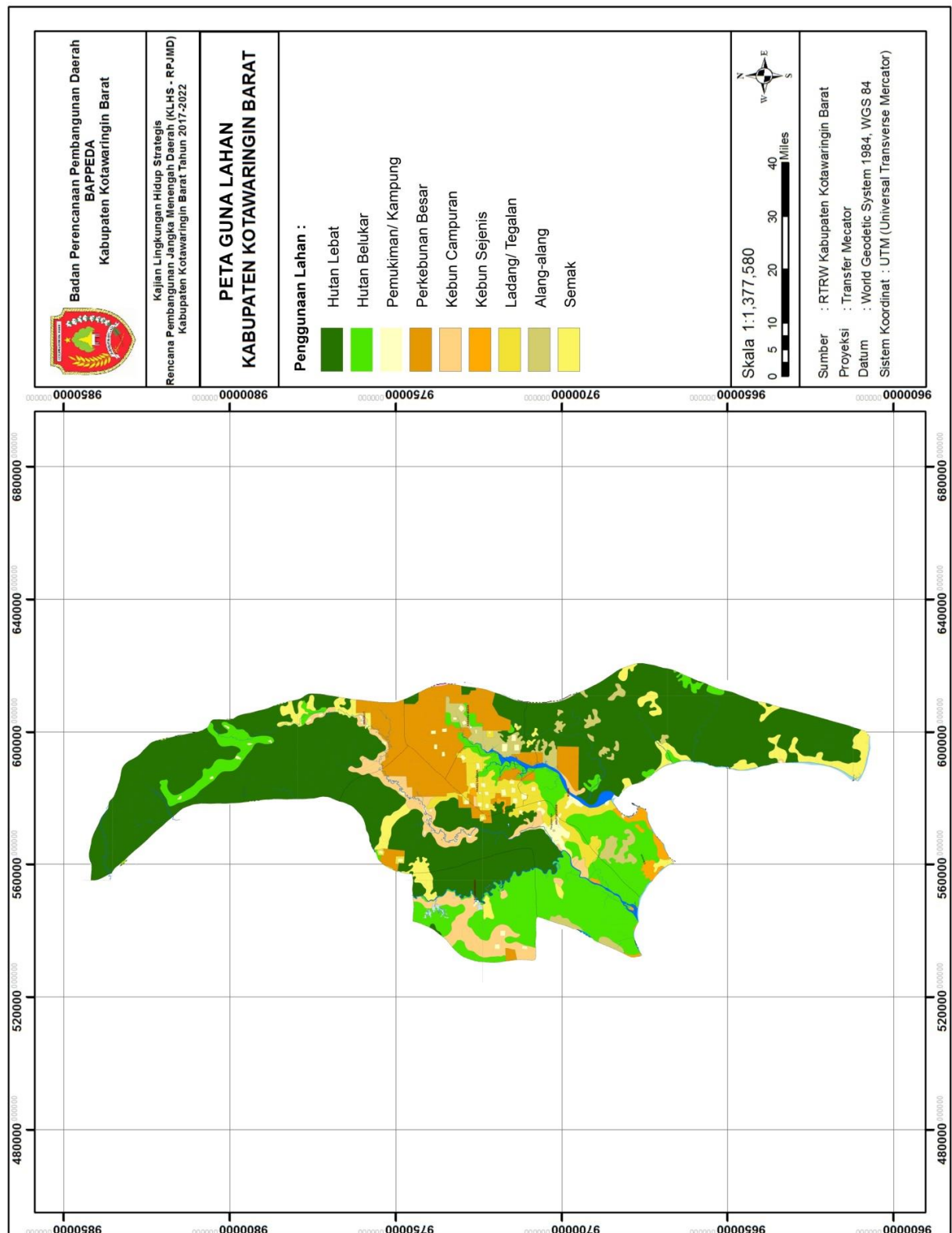
1. Penggunaan tanah menetap terdiri dari pemukiman, perkebunan, sawah dan kebun campuran.
2. Penggunaan tanah tidak menetap, yaitu perladangan, semak dan alang-alang serta hutan belukar.
3. Tanah yang belum diusahakan yaitu hutan, sungai dan danau.

Jenis penggunaan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada Tabel 2.10, sedangkan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Tabel 2. 10 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Hutan Lebat	513.917,11	52,11
2.	Ladang/Tegalan	35.635,55	3,61
3.	Perairan	11.258,62	1,14
4.	Alang-Alang	33.968,94	3,44
5.	Semak	46.722,67	4,74
6.	Hutan Belukar	167.255,64	16,96
7.	Kebun Sejenis	8.201,72	0,83
8.	Pemukiman/Kampung	13.042,39	1,32
9.	Kebun Campuran	54.984,28	5,57
10.	Perkebunan Besar	101.299,57	10,27
Jumlah		986.286,49	100,00

Sumber: BPN KalTeng, Tahun 2009. Catatan: terdapat perbedaan luas dengan luas kab.



Gambar 2. 2 Peta Guna Lahan



Berdasarkan Tabel 2.10 diatas dapat dijelaskan bahwa penggunaan lahan hutan masih dominan yaitu sekitar 52,11 % termasuk kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, sisanya adalah lahan budidaya yang diusahakan secara intensif seperti perkebunan kelapa sawit, kebun campuran dan permukiman. Tanah-tanah yang tidak digunakan secara intensif adalah hutan belukar, semak dan padang ilalang. Jika dibanding dengan data penggunaan tanah pada tahun 1990, dimana komposisi hutan sekitar 67 %, maka dalam kurun waktu 17 tahun terjadi perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi areal non kehutanan, yaitu menjadi lokasi perkebunan besar, permukiman dan lahan usaha tani masyarakat.

J. Penguasaan Tanah

Penguasaan lahan berkaitan dengan hubungan orang atau badan dengan tanah. Hubungan ini dikenal dengan istilah hak atas tanah, baik dalam bentuk sertifikat maupun penguasaan secara adat. Penjelasan mengenai hak atas tanah sangat penting dalam penyusunan rencana penggunaan lahan. Tanah-tanah yang sudah ada hak, khususnya dalam skala luas yang besar tidak mungkin dirubah fungsinya tanpa persetujuan pemilik lahan.

Penguasaan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari tanah yang dikuasai pemerintah, meliputi Kawasan Lindung yang sudah mempunyai ketetapan dari pemerintah seluas 265.990 Ha (27,72 %), Hak Guna Usaha perkebunan seluas 203.334 Ha (21.32 %), tanah bersertifikat 2.333 bidang, dan tanah negara yang dikuasai masyarakat secara adat seluas 131.264 ha (kampung, kebun campuran dan ladang).

2.2 ASPEK TATA RUANG WILAYAH

Rencana pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat mengatur susunan pusat-pusat kegiatan yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang hierarkis memiliki hubungan fungsional.

2.2.1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kabupaten Kotawaringin Barat

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan pusat kegiatan permukiman perkotaan dengan hirarki pelayanan skala regional/kecamatan (hirarki I), terletak di Kota Pangkalan Bun yang merupakan Ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat



dengan arahan pengembangan kegiatan utama yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik, perekonomian dan regional, pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa, pusat jasa pendukung kegiatan perekonomian (pengolahan dan pemasaran). Sedangkan untuk kegiatan penunjang utama yaitu sebagai pusat kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, dan permukiman.

2.2.2 Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Kabupaten Kotawaringin Barat

Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) merupakan pusat permukiman perkotaan dengan skala pelayanan kecamatan (hirarki II) dengan orientasi kegiatan berupa pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan masyarakat dan lain-lain. PKLp ini terletak di ibukota Kecamatan yaitu di Kota Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

2.2.3 Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kabupaten Kotawaringin Barat

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman/kegiatan dengan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan (hirarki III) dengan arahan pengembangan dan pelayanan sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Ibukota Kecamatan (IKK) Pangkalan Banteng kawasan ini diharapkan menjadi kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat produksi pertanian dan perkebunan (*agropolitan area*) dengan skala pelayanan beberapa kecamatan.

Lokasi yang direncanakan sebagai PPK di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah beberapa pusat permukiman/kegiatan yang menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan (hirarki III) dengan arahan pengembangan dan pelayanan sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya. Meliputi Pangkalan Banteng, IKK Pangkalan Lada, IKK Kotawaringin Lama dan IKK Arut Utara, desa Runtu Kecamatan Arut Selatan, desa Teluk Bogam dan desa Kubu di Kecamatan Kumai, desa Sidomulyo Kecamatan Pangkalan Banteng, dan Despot Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama.



2.2.4 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kabupaten Kotawaringin Barat

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman/kegiatan dengan skala desa/kelurahan atau beberapa kampung (hirarki IV) dengan arahan pengembangan skala pelayanan sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya. Pusat pengembangan kegiatan terletak di seluruh pusat desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2. 11 Rencana Sistem Pusat Perkotaan/Kegiatan

Tingkat Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat (Kota Pangkalan Bun)	- Pusat pemerintahan dan pelayanan publik - Perekonomian jasa kabupaten dan regional - Pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa - Pusat jasa pendukung kegiatan perekonomian (pengolahan dan pemasaran) - Pusat pengembangan wilayah bagian barat Kal-Teng	- Pendidikan - Kesehatan - Peribadatan - Perdagangan/ pemasaran - Permukiman - Pariwisata	- Pengembangan jalan arteri primer - Pengembangan prasarana lingkungan - Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa - Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan - Pengembangan kawasan pariwisata - Optimalisasi Bandara Iskandar
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kota Kumai (Kecamatan Kumai)	- Pusat pengembangan sekunder untuk menunjang pusat pelayanan kota hirarki I (PKW) - Pusat permukiman perdesaan di seluruh kecamatan - Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan - Pusat pengumpul hasil bumi - Outlet masuk wilayah kabupaten/provinsi melalui laut - Industri pengolahan hasil-hasil pertanian - Distributor barang dan jasa skala regional	- Pelayanan sosial - Perumahan - Pertanian - Perkebunan dan kehutanan - Industri - Pariwisata	- Pengembangan jalan arteri sekunder - Pengembangan dan perbaikan jalan akses ke PPK - Pengembangan fasilitas lingkungan - Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa - Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan - Pengembangan industri - Optimalisasi pelabuhan Kumai
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	(IKK) Pangkalan Banteng, IKK Pangkalan Lada, IKK Kotawaringin Lama dan IKK Arut Utara, desa Runtu Kecamatan Arut Selatan, desa Teluk Bogam dan desa Kubu di Kecamatan Kumai, desa Sidomulyo Kecamatan Pangkalan Banteng,	- Pusat pengembangan sekunder untuk menunjang pusat pelayanan kota hirarki I (PKW) - Pusat permukiman perdesaan di seluruh kecamatan - Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan - Pusat pemerintahan dan pelayanan publik skala kecamatan	- Pelayanan sosial - Perumahan - Pertanian - Perkebunan	- Pengembangan jalan arteri sekunder - Pengembangan dan perbaikan jalan akses ke PPK - Pengembangan fasilitas lingkungan - Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa - Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan - Pengembangan fasilitas agropolitan area



Tingkat Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	dan Despot Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama Semua desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat	▪ Pusat pengumpul hasil bumi ▪ Pusat pengembangan tersier untuk menunjang pusat pelayanan kota hirarki II dan III ▪ Pengumpul hasil bumi agropolitan	▪ Permukiman ▪ Pertanian ▪ Perkebunan ▪ Perdagangan	▪ Pengembangan jalan poros desa ▪ Pengembangan fasilitas lingkungan ▪ Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa ▪ Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan ▪ Pengembangan fasilitas agropolitan area

Sumber: Hasil Rencana, Tahun 2011

2.3 ASPEK DEMOGRAFI

Berdasarkan data yang dihimpun, bahwa jumlah penduduk pada tahun 2009 tercatat 230.984 jiwa yang tersebar secara tidak merata di enam Kecamatan. Dari jumlah penduduk tersebut yang terbanyak berada di Kecamatan Arut Selatan (92.963 jiwa) dan yang terendah berada di Kecamatan Arut Utara (3.984 jiwa). Tidak meratanya penyebaran penduduk ini diakibatkan oleh berbagai hal, antara lain: kondisi geografis, ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga menyebabkan ketersediaan jumlah sumber daya manusia di masing-masing wilayahnya.

Sementara itu, dari data yang terkumpul selama enam tahun terakhir, menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat selalu bertambah tiap tahunnya, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,52 % (lihat Tabel 1.12). Hal ini tentu akan menambah ketersediaan jumlah sumber daya manusia yang ada juga akan mempengaruhi dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Apabila dilihat berdasarkan kepadatannya, bahwa Kecamatan Pangkalan Lada merupakan wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi sebesar 119,31 jiwa/Km², sedangkan tingkat kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Arut Utara sebesar 5,32 jiwa/Km². Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Pangkalan Lada karena luas wilayah yang sangat kecil sedangkan jumlah penduduk cukup besar. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah



dan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2.12.

**Tabel 2. 12 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2001 – 2007
di Kabupaten Kotawaringin Barat (Jiwa)**

No.	Kecamatan	Tahun						Laju Per- tumbuhan (%)
		2001	2002	2003	2007	2005	2007	
1.	Kotawaringin Lama	14.611	15.814	13.944	15.124	15.360	15.553	1,26
2.	Arut Selatan	76.637	77.568	79.332	83.335	84.846	86.027	2,34
3.	Kumai	69.764	70.952	88.271	88.502	40.697	41.274	5,33
4.	Arut Utara	-	-	-	-	24.186	11.804	16,60
5.	Pangkalan Banteng	-	-	-	-	25.355	24.509	5,24
6.	Pangkalan Lada	5.476	5.760	6.947	11.406	11.627	25.739	6,32
	Jumlah	166.488	170.094	188.494	198.367	202.071	204.906	4,24

Sumber : Penduduk Kotawaringin Barat, BPS Tahun 2009

**Tabel 2. 13 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2009**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rumah Tangga	Luas Wilaya h (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Km ² /Jiwa)
		Laki- laki (jiwa)	Perempua n (jiwa)	Jumlah (jiwa)			
1.	Kotawaringin Lama	9.225	8.543	17.768	4.821	1.218	14,52
2.	Arut Selatan	47.238	45.725	92.963	25.233	2.400	38,73
3.	Kumai	23.733	21.634	45.367	10.112	2.921	15,53
4.	Arut Utara	7.999	6.293	14.292	3.984	2.685	5,32
5.	Pangkalan Banteng	18.896	14.377	33.273	8.712	1.306	25,48
6.	Pangkalan Lada	14.230	13.091	27.321	7.347	229	119,31
	Jumlah	121.650	109.334	230.984	60.209	10.759	43,778

Sumber : Penduduk Kotawaringin Barat, BPS Tahun 2009

2.4 ASPEK EKONOMI WILAYAH

Yang dimaksud dengan sektor perekonomian wilayah adalah sektor-sektor ekonomi yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah, serta berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi tersebut. Adapun sektor-sektor ekonomi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain pertanian, pertambangan, industri, perdagangan dan pariwisata.

2.4.1 Pertanian

Khusus di Kabupaten Kotawaringin Barat, secara struktural, sektor pertanian merupakan *leading sector* dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya yang mencapai 46,96 % dari seluruh PDRB tahun 2007 dan tingkat pertumbuhannya sebesar 6,62 %. Sektor



pertanian ini mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.

2.4.2 Perkebunan

Sub-sektor perkebunan, belakangan ini semakin menjadi primadona dalam berinvestasi. Perkembangan produksinya dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini menunjukkan besarnya minat masyarakat dalam mengembangkan sub-sektor perkebunan. Adapun komoditi yang dicakup disini adalah hasil tanaman perkebunan baik yang diusahakan oleh rakyat maupun yang dikelola oleh perusahaan perkebunan (perkebunan skala besar), seperti karet, kelapa/kopra, kopi, cengkeh, lada dan lain sebagainya.

2.4.3 Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini masih bertumpu pada usaha penangkapan ikan di perairan laut. Peningkatan produksi ikan perairan laut tersebut berhubungan dengan: a). Permintaan pasar meningkat dan b). Sumberdaya perairan laut yang masih potensial. Berdasarkan jenis pemeliharaan ikan yang ada, jenis keramba merupakan jenis pemeliharaan ikan yang paling diminati. Sedangkan untuk jenis nelayan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, mayoritas merupakan nelayan laut.

2.4.4 Peternakan

Sub-sektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil-hasil ternak, seperti sapi, kerbau, babi, unggas, ayam buras, ayam petelur dan itik. Hingga tahun 2007, produksi daging tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat berasal dari ternak unggas, yaitu sebesar 982,13 Ton atau sekitar 70,77 % dari total produksi daging. Sementara itu, produksi telur tertinggi berasal dari ternak itik, yaitu sebesar 154,65 Ton atau sekitar 56,96 % dari total produksi telur.

2.4.5 Kehutanan

Kontribusi terbesar dari sub-sektor kehutanan berasal dari kelompok kayu meranti yang pada tahun 2007 mencapai 98.149,79 M³, diikuti oleh kelompok kayu rimba campuran sebesar 23.455,94 M³ dan kelompok kayu indah sebesar 437,42 M³. Produksi kayu di atas dihasilkan dari Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Terdapat 8 HPH di daerah ini dengan luas areal mencapai 210,77 Ha. Sementara



itu, luas kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan data BPS tahun 2007 sebesar 959.452,77 Ha, yang terdiri atas kawasan lindung sebesar 265.990,74 Ha atau 27,72 % dan kawasan budidaya 693.462,03 Ha atau 72,28 %.

2.4.6 Industri

Secara garis besar, pengelompokan industri terbagi atas 2 macam, yaitu: industri migas dan industri non migas. Jenis industri yang ada saat ini berupa industri non migas dengan skala kecil dan sedang. Sedangkan untuk industri migas, hingga kini belum nampak. Kelompok industri yang paling banyak adalah kelompok industri kerajinan. Hingga kini kondisi industri di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berkembang secara optimal. Kecilnya peranan sektor industri ini dapat dimungkinkan oleh masih sedikitnya jumlah usaha industri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu, industri yang ada pada umumnya merupakan industri dengan skala kecil.

Besar kecilnya skala kegiatan suatu industri dapat dilihat dari tingkat penyerapan tenaga kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dapat diperoleh gambaran bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja oleh industri yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat relatif kecil, yaitu rata-rata untuk 1 unit usaha menyerap 3 – 5 tenaga kerja.

2.4.7 Pertambangan

Potensi pertambangan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah tereka adalah bahan galian B dan C. Beberapa bahan galian golongan B yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

- Emas, terdapat di Desa Sambu, Kecamatan Arut Utara;
- Batu kecubung, terdapat di Desa Pangkut dan Desa Gandis Kecamatan Arut Utara; dan
- Kaolin, terdapat di Desa Keraya dan Desa Kubu Kecamatan Kumai.

Sedangkan bahan galian golongan C yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain pasir kwarsa, batu kali, tanah urug, kerikil, batu kapur, batu belah, batu pecah dan tanah pilihan. Jenis bahan galian ini merupakan bahan yang sering digunakan untuk membangun sarana dan prasarana wilayah.



2.4.8 Pariwisata

Secara umum Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup beraneka ragam jenisnya. Secara garis besar, jenis wisata yang ditawarkan terbagi atas 2 kelompok, yaitu:

1. Wisata alam, antara lain Pantai Kubu dan Tanjung Keluang, Pantai Teluk Bogam, Tanjung Penghujan dan Taman Nasional Tanjung Puting.
2. Wisata sejarah/budaya, antara lain Istana Kuning, Istana Kotawaringin dan Masjid Kyai Gede.

2.4.9 Pesisir dan Kelautan

Kewenangan pemerintah propinsi atas ruang lautan yang berbatasan dengan pantainya adalah 12 mil dari garis pantai. Sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten adalah sepertiga dari wilayah kewenangan propinsi atau 4 mil dari garis pantai. Berdasarkan batas administrasi kecamatan, pesisir kabupaten Kotawaringin Barat di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai. Pantai ini memanjang dari pantai Kubu Kecamatan Kumai Desa Kumai Batu i Keamatan Arut Selatan.

Ekosistem pesisir Kotawaringin Barat terdiri dari estuaria, perairan pantai, pantai berpasir, hutan pantai, laut dangkal, mangrove dan hutan rawa serta kawasan budidaya. Kondisi umum pesisir Kabupaten Kotawaringin Barat Adalah sebagai berikut:

- Kondisi pantai berpasir masih alami dan belum banyak terpengaruh oleh pencemaran
- Kondisi mangrove sebagian sudah rusak karena pembukaan tambak udang
- Kondisi estuaria sungai Kumai dan Sungai Lamandau sudah menurun karena meningkatnya sedimentasi
- Sebagian garis pantai telah mengalami abrasi oleh ombak laut yang merusak bangunan fasilitas umum dan permukiman
- Batimetri (kedalaman laut) perairan Kotawaringin Barat berkisar antara beberapa meter sampai > 20 m, termasuk laut dangkal.
- Variasi tunggang pasut, berkisar antara 47,35 cm di Tanjung Keluang (Tanjung Penghujan), hingga 321,54.



- Tinggi gelombang rerata berkisar antara 0,35 – 2 m
- Kecerahan perairan sangat buruk (<2,50 m) karena pengaruh sedimentasi
- Kelimpahan dan keanekaragaman Plankton rendah atau termasuk miskin
- Kekeruhan air tinggi sekitar 9 – 28 gram / l, TSS berkisar 0,121 – 2,39 mg/l.
- Derajat keasaman masih baik berkisar 3,5 – 10,5.

2.5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTAWARINGIN BARAT 2017-2022

2.5.1 Visi

"Gerakan membangun Kotawaringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas"

2.5.2 Misi

Misi dari RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Maju pembangunan sesuai iptek dan infrastruktur yang representatif.
- b. Masyarakat yang bermoral punya ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Keberagaman masyarakat yang harmonis.
- d. Interaksi dan pergaulan yang langgeng.
- e. Keberadaan hidup yang aman.
- f. Kehidupan masyarakat sejahtera, cukup pangan, sandang dan papan.

2.5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan, sasaran, dan indikator sasaran dari RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022 dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 2. 14 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 1.	TUJUAN 1	SASARAN 1	
Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan	1. Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Nilai akuntabilitas kinerja 3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah/ Opini WTP atas Laporan Keuangan 4. Jumlah Perda bermasalah 5. Indeks kepuasan masyarakat 6. Persentase penerapan SPM 7. Ketersediaan Sistem e-Government
	TUJUAN 2	SASARAN 2	
	Peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase pajak retribusi terhadap PAD (%) Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah (%) Persentase belanja pegawai (%)
	TUJUAN 3	SASARAN 3	
	Peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah	Meningkatnya konektivitas antar daerah	Persentase jalan mantap Persentase konektivitas jalan



			Jumlah pelabuhan/dermaga penyeberangan
		SASARAN 4	
		Meningkatnya ketercukupan energi listrik dan air bersih	Kapasitas pembangkit
			Rasio elektrifikasi
			Rasio Desa Berlistrik
			Rasio cakupan air bersih RT
	TUJUAN 4	SASARAN 5	
	Peningkatan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas	Merealisasikan perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten	Presentase kesesuaian RTRW terhadap kebutuhan ruang
MISI 2.	TUJUAN 5	SASARAN 6	
Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. IPM
			2. Rata-rata Lama Sekolah
			3. Angka Melek Huruf
			4. Persentase sekolah berkreditasi
			5. Persentase APK
			6. Persentase perpustakaan desa/ kelurahan
		SASARAN 7	
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup
			2. Angka Kematian Ibu
			3. Angka Kematian Bayi
			4. Prevalensi balita gizi buruk



			5. Prevalensi Tuberkulosis (TB)
			6. Rasio posyandu persatuan balita
			7. Rasio puskesmas, pustu, poliklinik persatuan penduduk
			8. Rasio tenaga medis persatuan penduduk
			9. Jumlah puskesmas yang terakreditasi
			10. Jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
			11. Laju pertumbuhan penduduk
			12. Prevalensi pemakaian alat kontrasepsi
		SASARAN 8	
		3. Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	Ketersediaan sarana olahraga Prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional
MISI 3.	TUJUAN 6	SASARAN 9	
Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.	Peningkatan ketahanan pangan	Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan kelautan	Jaringan irigasi pertanian, perkebunan dan tambak Jalan usaha tani pertanian, perkebunan dan tambak Ketersediaan sarana dan prasana perikanan dan kelautan Pelabuhan perikanan Kapal penangkapan ikan Jaring tangkap ikan



Keramba apung
Produksi komoditas pangan
Padi
Jagung
Kedelai
Produksi Hortikultura :
Cabai
Bawang Merah
Sayur dan Buah
Produktivitas Hortikultura :
Cabai
Bawang Merah
Sayur dan Buah
Populasi Ternak :
Sapi
Kambing/Domba
Ayam Buras
Ayam Pedaging
Ayam Petelur
Itik
Produksi ternak :
Daging
Telur
Produktivitas perkebunan :
Kelapa Sawit
Karet
Lada



		Kelapa
		Aren
		Produktivitas kelautan dan perikanan :
		Ikan Laut
		Ikan Air Tawar
		Udang
		Ketersediaan pangan utama
		Kontribusi pertanian pada PDRB
		Ketersediaan kawasan pangan utama
TUJUAN 7	SASARAN 10	
Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	1. Pertumbuhan PDRB
		2. Pertumbuhan Ekonomi
		3. PDRB perkapita
		4. Indeks Gini
		5. Laju inflasi
TUJUAN 8	SASARAN 11	
Pengembangan industri, koperasi dan UMKM serta daya saing daerah	Meningkatnya industri hulu-hilir dan kemitraan usaha	Persentase Koperasi Aktif
		Jumlah UMKM
		Jumlah IKM dan Besar
		Kawasan Industri/ KEK
		Jumlah Investor PMA/ PMDN
		Kontribusi industri pada PDRB
	SASARAN 12	
	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Nilai realisasi investasi PMA/PMDN
		Nilai ekspor perdagangan
		Kontribusi BUMD terhadap PAD



	TUJUAN 9 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari	SASARAN 13 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pencemaran air Pencemaran udara Cakupan pengamanan kawasan sungai, DAS, lautan dan pesisir pantai Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Tempat Bermain Ketersediaan Hutan Kota
		SASARAN 14 Meningkatnya pengelolaan persampahan	Rasio ketersediaan Ruang Untuk Rokok pada SKPD Ketersediaan infrastruktur persampahan Persentase penanganan sampah
MISI 4.	TUJUAN 10 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.	SASARAN 15 Peningkatan pemahaman, kesadaran dan pengamalan agama dan nilai sosial budaya masyarakat	Meningkatnya layanan kehidupan beragama
		SASARAN 16 Meningkatnya kerukunan dan kesejahteraan masyarakat	Pembinaan FKUB Rumah ibadah bersertifikat tanah dan IMB Kuota haji Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan nikah berakte nikah



			Cakupan KB aktif
			Rasio KDRT
			Jumlah kasus perceraian
			Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah
MISI 5.	TUJUAN 11	SASARAN 17	
Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kesempatan kerja, dan penurunan angka pengangguran	Persentase angkatan kerja perempuan
			Persentase pengangguran terbuka (TPT)
			Persentase penduduk miskin
			Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan
			Jumlah desa tertinggal
			Jumlah desa mandiri
	TUJUAN 12	SASARAN 18	
	Peningkatan ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Meningkatnya rasa aman dan tenteram bagi masyarakat	Tingkat partisipasi politik pemilu
			Jumlah aksi demonstrasi
			Angka kriminalitas
			Jumlah pelanggaran penangkapan ikan
			Prevalensi penyalahgunaan Narkoba
MISI 6.	TUJUAN 13	SASARAN 19	
Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.	Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya	Persentase pengembangan dan pelestarian budaya
			Jumlah Situs budaya
			Ketersediaan infrastruktur kebudayaan



TUJUAN 14		SASARAN 20	
Peningkatan pariwisata daerah		Meningkatnya kunjungan wisatawan dan destinasi wisata	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisatawan
			Wisatawan mancanegara
			Wisatawan lokal/ nusantara
			Jumlah destinasi wisata
			Ketersediaan infrastruktur pariwisata
			Bus wisata
			Kapal wisata
			Pelabuhan wisata
			Kontribusi pariwisata pada PDRB



2.5.4 Program

Program dari RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Program RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022

Misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022	Program RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022
Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.	• Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah • Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan • Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah • Program Pembinaan dan pengembangan organisasi dan kepegawaian • Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH • Program litren pemb. Daerah • Program Pengendalian dan Evaluasi Pemb. Daerah • Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup • Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi • Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan • Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur • Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan • Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas an • Program Pengembangan Data/ Informasi Bidang Pengadaan • Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa • Program peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi • Program implementasi dan pengembangan egovernment • Program pengembangan data/informasi/statistik daerah • Program pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika • Program Penataan Administrasi Kependudukan • Program Pelayanan Pencatatan Sipil • Program Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan • Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan • Program Peningaktan Pelayanan Angkutan • Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah



	• Prog. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa • Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa • Program Pembinaan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.	• Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan • Program manajemen pelayanan pendidikan • Program pendidikan anak usia dini (PAUD) • Program pendidikan Nonformal • Program Pendidikan Sekolah Dasar • Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan • Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit • Program Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan • Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan • Program Upaya kesehatan Masyarakat • Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit • Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan • Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat • Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan • Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga • Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga • Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri, serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energy melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan.	• Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri • Program Pengembangan IKM • Program perlindungan HKI dan standardisasi Industri • Program Optimalisasi Perdagangan Dalam Negeri • Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan • Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor • Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan • Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar • Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan • Program Peningkatan Produksi Hortikultura • Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan • Program Peningkatan Produksi Perkebunan • Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak • Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan • Program Peningkatan Agribisnis Peternakan • Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengembangan Perikanan • Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan



-
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
 - Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
 - Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
 - Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
 - Program Pengembangan Usaha Koperasi
 - Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
 - Program Penumbuhan Wirausaha Baru
 - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal
 - Program Ekstensifikasi Pajak Daerah
 - Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan Pelayanan Keluhan Masyarakat
 - Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah
 - Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah
 - Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - Program pembangunan infrastruktur perdesaan
 - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan
 - Program Pembangunan dan Rehabilitasi /pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ
 - Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - Program Pembangunan dan rehabilitasi /pemeliharaan Prasarana dan fasilitas ASDP
 - Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Areal Pemakaman
 - Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong
 - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
-



	• Program pengendalian banjir • Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah • Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang • Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup • Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam • Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam • Program Peningkatan Pengendalian Polusi • Program Pengendalian kebakaran hutan • Program pengawasan ketaatan pemegang perijinan lingkungan hidup • Program peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup • Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) • Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan • Program Pencegahan dini dan kesiapsiagaan • Program Tanggap Darurat
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat	• Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan • Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan • Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama • Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan • Program Pembinaan Kemasyarakatan • Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan • Program peningkatan perlindungan Hak perempuan • Program Pembinaan Keluarga Berencana • Program peningkatan kualitas Hidup perempuan • Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan • Program pengembangan Kabupaten Layak Anak • Program Peningkatan Perlindungan Anak • Program Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak
Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis	• Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial • Program perlindungan dan jaminan sosial • Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya • Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial



-
- Program pembinaan anak terlantar
 - Program Pemberdayaan masyarakat miskin dan Desa Tertinggal
 - Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
 - Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
 - Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
 - Program peningkatan kesempatan kerja
 - Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM dan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
 - Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Program Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak criminal

Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

-
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - Program Pengembangan Nilai Budaya
 - Program Pengembangan Ekonomi kreatif
 - Program pengembangan pemasaran pariwisata
 - Program pengembangan kemitraan
-



***Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022***





BAB III PROSES, LINGKUP KEGIATAN, METODE, DAN HASIL PELAKSANAAN KLHS

3.1 PRINSIP DASAR KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

KLHS ditujukan untuk menjamin pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan. Ada tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*justice*).

Keterkaitan (*interdependency*) dijadikan nilai penting agar penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana atau program yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, wilayah, global-lokal. Nilai ini juga mengandung makna dihasilkannya KLHS yang bersifat holistik berkat adanya keterkaitan analisis antar komponen fisik-kimia, biologi dan sosial ekonomi.

Keseimbangan (*equilibrium*) dijadikan nilai penting agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai keseimbangan antara kepentingan sosial-ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, antara kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan keseimbangan-keseimbangan lainnya. Implikasinya, usaha pemetaan ragam dan bentuk kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS.

Keadilan (*justice*) dijadikan nilai penting agar penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan tertentu masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan.

KLHS dibangun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan berbagai kepentingan. Makna pendekatan tersebut adalah bahwa penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau sekedar mengkritisi



kebijakan, rencana dan/atau program, melainkan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau program, khususnya dari perspektif pembangunan berkelanjutan. KLHS adalah strategi yang cenderung bersifat persuasif, dalam pengertian lebih mengutamakan proses pembelajaran dan pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup pada Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 6 (enam) prinsip KLHS yang seyogyanya dianut dijelaskan berikut ini:

- **Prinsip 1: Penilaian Diri (*Self Assessment*)**

Makna prinsip ini adalah sikap dan kesadaran yang diharapkan muncul dari diri pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap keputusannya. Prinsip ini berasumsi bahwa setiap pengambil keputusan secara apriori mempunyai tingkat kesadaran dan kepedulian atas lingkungan. KLHS menjadi media atau katalis agar kesadaran dan kepedulian tersebut terefleksikan dalam proses dan terformulasikan dalam produk pengambilan keputusan untuk setiap kebijakan, rencana dan/atau program.

- **Prinsip 2: Penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program
(*Improvement of the Policy, Plan, and/or Program*)**

Prinsip ini menekankan pada upaya untuk penyempurnaan pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS tidak menghambat proses perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program, melainkan menjadi media atau katalisator untuk memperbaiki proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau program. Prinsip ini berasumsi bahwa perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program di Indonesia selama ini belum mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan secara optimal dan KLHS dapat memicu perbaikan atau penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program bersangkutan.



- **Prinsip 3: Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran Sosial**
(Sosial Learning and Capacity Building)

Prinsip ini menekankan bahwa integrasi KLHS dalam perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program harus menjadi media untuk belajar bersama khususnya tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan, baik bagi masyarakat umum dan khususnya bagi para birokrat dan pengambil keputusan. KLHS harus memungkinkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program untuk meningkatkan kapasitasnya mengapresiasi lingkungan hidup dalam keputusannya. Melalui KLHS, dapat dicapai masyarakat, birokrat, dan pengambil keputusan yang lebih cerdas dan kritis dalam menentukan keputusan pembangunan agar berkelanjutan.

- **Prinsip 4: Memberi Pengaruh pada Pengambilan Keputusan**
(Influencing Decision Making)

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus memberikan pengaruh yang positif pada pengambilan keputusan. KLHS akan mempunyai makna apabila pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya untuk memilih atau menetapkan kebijakan, rencana dan/atau program yang lebih menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

- **Prinsip 5: Akuntabel (*Accountable*)**

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan pada publik secara luas. Azas akuntabilitas KLHS sejalan dengan semangat akuntabilitas dari kebijakan, rencana dan/atau program itu sendiri, sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan KLHS dapat lebih menjamin akuntabilitas perumusan kebijakan, rencana dan/atau program bagi seluruh pihak. KLHS tidak ditujukan untuk menjawab tuntutan para pihak, karena lingkup KLHS terbatas, sedangkan tuntutan dapat berdimensi luas.

- **Prinsip 6: Partisipatif**

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan, rencana



dan/atau program. Prinsip ini telah menjadi amanat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan harus diwadahi dalam penyelenggaraan KLHS. Dengan prinsip ini diharapkan proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau program semakin mendapatkan legitimasi atau kepercayaan publik.

3.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN

Penyusunan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 ini dapat digunakan beberapa pendekatan yang diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Pendekatan

Dalam kegiatan penyusunan dokumen KLHS ini terdapat paling tidak 4 (empat) jenis pendekatan yang dapat digunakan. Empat kategori atau model pendekatan tersebut muncul sebagai refleksi atas adanya perbedaan dalam menyikapi kebijakan dan peraturan perundangan yang diterapkan oleh pemerintah (UNEP 2002; Saddler 2005).

- a. KLHS dengan kerangka dasar AMDAL (*EIA Mainframes*);
- b. KLHS sebagai kajian penilaian keberlanjutan lingkungan (*Environmental Appraisal Style*);
- c. KLHS sebagai kajian terpadu atau penilaian keberlanjutan (*Integrated Assessment/ Sustainability Appraisal*);
- d. KLHS sebagai pendekatan untuk pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam (*Sustainable Resource Management*).

Berdasarkan 4 (empat) jenis pendekatan tersebut maka pendekatan yang akan dipilih dalam penyusunan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 yakni model pendekatan ketiga yaitu KLHS sebagai kajian terpadu atau penilaian keberlanjutan (*integrated assessment/ sustainability appraisal*). Berdasar pada jenis pendekatan tersebut, maka dokumen KLHS akan ditempatkan sebagai bagian dari kajian secara terpadu (*integratif*) terhadap rencana program dan proyek yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah terutama dalam kaitannya untuk menilai dampak pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.



3.2.2 Metode Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, metode pendekatan KLHS sebagai kajian terpadu atau penilaian berkelanjutan ini adalah analisis terkait dengan kondisi lingkungan hidup berdasar pada isu-isu strategis pembangunan yang ada pada suatu wilayah perencanaan, dalam hal ini pada Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode pendekatan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari kajian yang lebih luas untuk menilai atau menganalisa dampak program dan proyek pembangunan daerah terhadap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Adapun azas-azas yang mendasari penyusunan KLHS dalam kegiatan perencanaan pembangunan wilayah adalah:

- Keterkaitan (*interdependency*). Keterkaitan menekankan pertimbangan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya.
- Keseimbangan (*equilibrium*). Keseimbangan menekankan aplikasi keseimbangan antar aspek, kepentingan, maupun interaksi antara makhluk hidup dan ruang hidupnya, seperti diantaranya adalah keseimbangan laju pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan dengan perlindungan dan pemulihan cadangan sumber daya alam, keseimbangan antara pemanfaatan ruang dengan pengelolaan dampaknya, dan lain sebagainya.
- Keadilan (*justice*). Keadilan untuk menekankan agar dapat dihasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam, modal dan infrastruktur, atau pengetahuan dan informasi kepada sekelompok orang tertentu.

Metode dan langkah penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022 ini didasarkan pada ketentuan dan pedoman yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Permen LH RI) Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kajian terkait pengaruh atau dampak dari kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan terhadap kondisi



lingkungan hidup pada suatu wilayah dalam KLHS menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Merumuskan tujuan KLHS yang hendak dicapai.
- Menentukan dan menetapkan pemangku kepentingan yang terkait kebijakan/program (pemerintah daerah/SKPD, akademisi, LSM, swasta serta masyarakat).
- Mengidentifikasi beberapa isu pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Dalam pengumpulan isu-isu strategis yang terkait dengan KLHS RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 – 2022 dapat dilaksanakan dengan diskusi, pembagian kuesioner dan wawancara.

3.3 METODE PENGUMPULAN DATA

Pada bagian ini diuraikan upaya dan metode untuk melakukan identifikasi dan pendataan pada wilayah perencanaan untuk memperoleh data dan informasi yang berguna dalam kegiatan penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 – 2022. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami karakteristik wilayah perencanaan melalui identifikasi potensi dan permasalahan dalam pembangunan serta menampung berbagai informasi, kendala dan aspirasi dari instansi maupun masyarakat umum yang terkait dengan muatan dalam KLHS. Kegiatan pengumpulan data ini dapat dilakukan secara bersamaan ataupun secara menerus mengingat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara kontinyu. Adapun kegiatan yang akan dilakukan pada tahapan pendataan dan identifikasi ini adalah:

3.3.1 Survey Lapangan

Survey lapangan dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi mengenai kondisi dan situasi secara langsung pada wilayah perencanaan yang meliputi:

- Kondisi fisik wilayah;
- Kondisi eksisting pemanfaatan ruang;
- Kondisi fungsi dan sarana permukiman;
- Kondisi jaringan jalan dan sistem transportasi wilayah;



- Kondisi jaringan prasarana wilayah;
- Kondisi kependudukan;
- Kondisi kegiatan dan sosial-ekonomi masyarakat lokal.

3.3.2 Survey Instansional

Survey instansional dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang tidak bisa didapatkan di lapangan. Beberapa jenis informasi yang dibutuhkan diharapkan terdapat pada instansi yang bersangkutan dengan anggapan adanya relevansi antara data dan informasi tersebut dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi tersebut, perinciannya adalah sebagai berikut:

- Data RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat,
- Data RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat,
- Data RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat,
- Data RPJMD Kalimantan Tengah,
- Data RPJMD Kabupaten Sekitar (Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Lamandau/ Kabupaten Sukarbara),
- Data Rencana Strategis SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat,
- Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka,
- Data/informasi pemanfaatan ruang wilayah,
- Data kependudukan/demografi,
- Data karakteristik perekonomian wilayah,
- Data sosial kemasyarakatan,
- Data/informasi terkait lingkungan.

3.3.3 Diskusi/ Wawancara

Diskusi/ wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penyusunan dokumen KLHS. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat atau *stakeholders* (pemangku kepentingan) secara langsung tentang potensi dan permasalahan maupun arah kebijakan yang diinginkan untuk pembangunan dan pengembangan wilayah studi. Diskusi/ wawancara dapat dilakukan dengan



masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah, tokoh pemuda, ataupun perwakilan RT/RW.

3.4 TAHAP PERSIAPAN

Tahap persiapan dilakukan dengan inventarisasi isu-isu strategis yang terdapat pada wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Isu strategis ini tidak harus sama dengan isu strategis yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan inventarisasi ini menghasilkan daftar panjang isu strategis yang terkait dengan upaya pembangunan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan daftar panjang isu tersebut, dilakukan penyortiran berdasarkan isu prioritas untuk dijadikan dasar pertimbangan kondisi faktual sektoral dan wilayah (spasial) di Kabupaten Kotawaringin Barat secara faktual.

3.5 TAHAP PRA PELINGKUPAN

Tahap pra pelingkupan ini merupakan tahapan penentuan isu yang didasarkan pada rancangan muatan dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022. Dari hasil penyortiran isu strategis maka akan diperoleh hasil pelingkupan untuk masing-masing isu strategis prioritas.

Proses pra pelingkupan dapat dilakukan diskusi bersama atau *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan oleh *stakeholder*/pemangku kepentingan. Pembentukan kelompok kerja dapat dibagi menurut tema besar isu permasalahan yang ada, anggota FGD disesuaikan dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Setelah terbentuk kelompok sesuai tema besar isu permasalahan, tahap selanjutnya maka dapat dilakukan kegiatan diskusi guna menentukan isu permasalahan yang lebih spesifik dari isu permasalahan tema besar yang ada. Proses akhir pada tahapan pra pelingkupan ini akan gambaran rumusan identifikasi isu, data yang dibutuhkan dan analisis data yang dibutuhkan, serta analisis pemangku kepentingan. Isu-isu strategis yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Daftar Panjang Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022**

No	Daftar Isu Panjang
----	--------------------



1. Masih rendahnya kualitas SDM dan sumber daya aparatur
2. Belum optimalnya pengelolaan SDA sebagai nilai tambah ekonomi (*value added*) dan upaya pelestarian SDA secara berkelanjutan (*sustainable resource*);
3. Kurangnya prasarana jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan pusat permukiman, terutama dari desa ke kota.
4. Adanya potensi pencemaran yang diakibatkan oleh pencemaran kegiatan industri dibidang pengolahan limbah kelapa sawit;
5. Adanya kebakaran hutan / lahan yang disebabkan oleh aktifitas manusia dalam membuka lahan baik untuk perkebunan maupun kegiatan ladang berpindah yang diakukan oleh masyarakat peladang;
6. Belum optimalnya penggalian sejarah dan keragaman suku budaya dalam pengembangan kepariwisataan;
7. Belum optimalnya peran perempuan dalam pelaksanaan pembangunan (kesetaraan gender);
8. Masih adanya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga mengurangi ketersediaan jumlah potensi sumber daya manusia yang tersedia.
9. Rumah Burung Walet menjadi keresahan warga karena menimbulkan banyak nyamuk, terutama di Kumai dan Pangkalan Bun.
10. Industri sawit menimbulkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan.
11. Abu pengolahan dari pabrik kayu lapis di Kelurahan Mendawai (PT. Korindo) mencemari udara dan berlokasi ditepi sungai sehingga limbahnya dapat mencemari sungai.
12. PLTU Batubara di Kumai membuang limbah sembarangan (langsung ke Sungai Kumai).
13. Daerah *buffer zone* Sungai Kumai masih dimanfaatkan sebagai guna lahan budidaya (pasar, rumah Burung Walet, permukiman).
14. Kualitas air di Sungai Tempenek menurun karena terkena limbah.
15. Penurunan jumlah air tanah di perkotaan.
16. Belum terdapat *green transportation*.
17. Penurunan air permukaan dan kualitas air sungai akibat penggunaan sehari-hari dan pembuangan limbah domestik.
18. Terdapat penambangan emas ilegal di Arut Utara mengakibatkan kerusakan lingkungan.
19. Terdapat pembukaan lahan yang menimbulkan asap yang mengganggu pernafasan.
20. Ketaatan perusahaan terhadap ijin untuk menjaga lingkungan kurang.
21. Terdapat penambang pasir (galian C) yang ilegal.
22. Menurunnya kualitas air sungai (sekonyer) dan permukaan.
23. Lemahnya pengamanan/ perlindungan kawasan sempadan.
24. Aktivitas penambangan liar di bantaran sungai Sekonyer dan Arut
25. Penambangan liar (PETI) di pantai kawasan Tanjung Puting
26. Kurangnya fungsi daerah resapan air (kota)
27. Pembangunan jaringan irigasi yang mengeringkan (drain) lahan/rawa (Kumpai batu, Arut Selatan)
28. Minimnya ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan atau IKK
29. Lahan pertanian tanaman pangan berkurang (Kumpai Batu Bawah, lahan basah menjadi kebun)
30. Lemahnya pengawasan/ pengendalian pemanfaatan ruang kota, (Lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat)
31. Lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang kota (Lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat)
32. Kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat peduli hutan.
33. Pembuangan limbah domestik di badan air/sungai.



34. Lemahnya sanksi yang tegas terhadap pembuangan limbah di kawasan sempadan atau pertambangan yang tidak sesuai aturan.
35. Penangkapan ikan dengan cara tidak ramah lingkungan misalnya dengan menggunakan racundan/ atau listrik.
36. Lemahnya pengawasan/ pengendalian pemanfaatan ruang kota.
37. Lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang kota.
38. Masih adanya potensi kebakaran hutan dan lahan.
39. Kurangnya kesadaran menjaga hutan dengan cara pembukaan lahan
40. Masih adanya aktivitas perburuan (di Suaka Margasatwa Lamandau)
41. Berkembangnya bangunan-bangunan sarang walet di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
42. Perubahan fungsi kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan (misal; kebun masyarakat/perusahaan) yang belum sesuai dengan prosedur perijinan.
43. Pengelolaan sampah Domestik dari TPS ke TPA (IKK)
44. Belum adanya sinkronisasi dan persamaan persepsi penerapan tata ruang wilayah dengan tata ruang dari hulu ke hilir dan antar kabupaten.
45. Penambangan liar di kawasan pantai (Arut Selatan dan Kumai)
46. Degradasi rawa gambut (Arut Selatan dan Kumai)
47. Belum siapnya aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan konsep *good governance*
48. Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar wilayah.
49. Kurangnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik pada daerah terpencil.
50. Terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.
51. Terdapat penurunan produksi sejumlah komoditas pertanian pangan seperti padi.
52. Rendahnya nilai tukar petani.
53. Rendahnya nilai tambah ekonomi produk.
54. Rendahnya mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.
55. Kualitas pendidikan yang masih relatif rendah.
56. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dan persebaran tenaga pendidik yang belum memadai.
57. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang belum memadai.
58. Rendahnya tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik pendidikan.
59. Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
60. Belum optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
61. Lapangan pekerjaan formal yang tersedia belum mampu menyerap sepenuhnya tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.
62. Masih banyak lulusan S1 yang belum mendapat pekerjaan.
63. Masih besarnya perbedaan permintaan tenaga kerja dan jumlah lulusan.
64. Masih rendahnya lulusan perguruan tinggi, sehingga daya saing tenaga kerja rendah.
65. Kebakaran hutan masih sering terjadi setiap musim kemarau panjang, akibat belum optimalnya perhatian terhadap lingkungan hidup dan pengelolaan lahan pertanian secara berkelanjutan.
66. Kegiatan eksploitasi Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) dengan menggunakan air raksa (Hg), penambnagan pasir zircon, kegiatan industri dengan pencemaran udara, dampak limbah domestik organik dan non organik.

Berdasarkan sejumlah isu yang terkumpul kemudian dilakukan verifikasi, dipetakan dan dikelompokkan berdasarkan tema untuk memudahkan tahap



selanjutnya. Verifikasi awal dibutuhkan untuk membedakan antara isu dan bukan isu serta memastikan bahwa semua isu sudah terkumpul.

Tabel 3. 2 Hasil Verifikasi dan Pengelompokan Daftar Panjang Isu

Daftar Isu Panjang	Kelompok Tema
Rendahnya mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dan persebaran tenaga pendidik yang belum memadai. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang belum memadai. Rendahnya tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik pendidikan. Masih rendahnya kualitas SDM dan sumber daya aparatur. Masih adanya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga mengurangi ketersediaan jumlah potensi sumber daya manusia yang tersedia. Masih rendahnya lulusan perguruan tinggi, sehingga daya saing tenaga kerja rendah. Lapangan pekerjaan formal yang tersedia belum mampu menyerap sepenuhnya tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Masih banyak lulusan S1 yang belum mendapat pekerjaan. Masih besarnya perbedaan permintaan tenaga kerja dan jumlah lulusan.	Masih rendahnya kualitas pendidikan menyebabkan rendahnya SDM.
Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Belum optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kurangnya prasarana jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan pusat permukiman, terutama dari desa ke kota. Belum terdapat <i>green transportation</i> . Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar wilayah Kurangnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik pada daerah terpencil. Terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.	Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan rata-rata masih rendah. Sarana prasarana permukiman belum memenuhi kebutuhan penduduk.
Industri sawit menimbulkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Abu pengolahan dari pabrik kayu lapis di Kelurahan Mendawai (PT. Korindo) mencemari udara dan berlokasi ditepi sungai sehingga limbahnya dapat mencemari sungai. PLTU Batubara di Kumai membuang limbah sembarangan (langsung ke Sungai Kumai). Daerah <i>buffer zone</i> Sungai Kumai masih dimanfaatkan sebagai guna lahan budidaya (pasar, rumah Burung Walet, permukiman).	Kerusakan lingkungan dan hutan meningkat.



Kualitas air di Sungai Tempenek menurun karena terkena limbah.

Penurunan jumlah air tanah di perkotaan.

Adanya potensi pencemaran yang diakibatkan oleh pencemaran kegiatan industri dibidang pengolahan limbah kelapa sawit.

Adanya kebakaran hutan/ lahan yang disebabkan oleh aktifitas manusia dalam membuka lahan baik untuk perkebunan maupun kegiatan ladang berpindah yang dilakukan oleh masyarakat peladang.

Penurunan air permukaan dan kualitas air sungai akibat penggunaan sehari-hari dan pembuangan limbah domestik.

Terdapat penambangan emas ilegal di Arut Utara mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Terdapat pembukaan lahan yang menimbulkan asap yang mengganggu pernafasan.

Ketaatan perusahaan terhadap ijin untuk menjaga lingkungan kurang.

Terdapat penambang pasir (galian C) yang ilegal.

Menurunnya kualitas air sungai (sekonyer) dan permukaan.

Lemahnya pengamanan/ perlindungan kawasan sempadan.

Aktivitas penambangan liar di bantaran sungai Sekonyer dan Arut.

Penambangan liar (PETI) di pantai kawasan Tanjung Puting

Kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat peduli hutan.

Pembuangan limbah domestik di badan air/sungai.

Penangkapan ikan dengan cara tidak ramah lingkungan misalnya dengan menggunakan racun dan/ atau listrik.

Masih adanya potensi kebakaran hutan dan lahan.

Kurangnya kesadaran menjaga hutan dengan cara pembukaan lahan.

Masih adanya aktivitas perburuan (di Suaka Margasatwa Lamandau)

Berkembangnya bangunan-bangunan sarang walet di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pengelolaan sampah Domestik dari TPS ke TPA (IKK)

Penambangan liar di kawasan pantai (Arut Selatan dan Kumai)

Degradasi rawa gambut (Arut Selatan dan Kumai)

Kebakaran hutan masih sering terjadi setiap musim kemarau panjang, akibat belum optimalnya perhatian terhadap lingkungan hidup dan pengelolaan lahan pertanian secara berkelanjutan.

Kegiatan eksploitasi Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) dengan menggunakan air raksa (Hg), penambangan pasir zircon, kegiatan industri dengan pencemaran udara, dampak limbah domestik organik dan



non organik.	
Kurangnya fungsi daerah resapan air (kota).	
Pembangunan jaringan irigasi yang mengeringkan (<i>drain</i>) lahan/rawa (Kumpai batu, Arut Selatan)	
Minimnya ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan atau IKK.	
Lahan pertanian tanaman pangan berkurang (Kumpai Batu Bawah, lahan basah menjadi kebun).	
Lemahnya pengawasan/ pengendalian pemanfaatan ruang kota.	Penegakan hukum masih lemah.
Lemahnya sanksi yang tegas terhadap pembuangan limbah di kawasan sempadan atau pertambangan yang tidak sesuai aturan.	
Perubahan fungsi kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan (misal; kebun masyarakat/perusahaan) yang belum sesuai dengan prosedur perijinan	
Belum optimalnya pengelolaan SDA sebagai nilai tambah ekonomi (<i>value added</i>) dan upaya pelestarian SDA secara berkelanjutan (<i>sustainable resource</i>).	Pengelolaan SDA belum optimal.
Rendahnya nilai tukar petani.	
Rendahnya nilai tambah ekonomi produk.	
Terdapat penurunan produksi sejumlah komoditas pertanian pangan seperti padi.	
Belum optimalnya penggalan sejarah dan keragaman suku budaya dalam pengembangan kepariwisataan.	Pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata belum optimal.

Berdasarkan isu-isu strategis yang sudah dilakukan verifikasi sesuai tema, berikut merupakan hasil pra pelingkupan isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan tema untuk masing-masing isu strategis prioritas yang dihasilkan.

Tabel 3. 3 Hasil Pra Pelingkupan Isu Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Tema

Tema Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan	Uraian
Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Gambaran Singkat: Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki sarana pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Namun, kualitas pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum masih dibawah rata-rata. Hal ini berkaitan dengan aksesibilitas yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat yang masih buruk sehingga penduduk harus menempuh jarak yang panjang dengan sistem transportasi umum yang belum memenuhi kebutuhan penduduk. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk berpendidikan tinggi dan berprestasi cenderung masih rendah sehingga kualitas SDM di Kabupaten Kotawaringin Barat masih rendah. Tujuan (Target dan Indikator): Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas layanan pendidikan kepada masyarakat baik pendidikan formal maupun non formal.



		• Meningkatkan kualitas moral dan perilaku masyarakat. • Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. • Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, ketrampilan dan pengetahuan umum.
		Isu-Isu Penting Terkait yang Perlu Didiskusikan: • Kurangnya sarana prasarana serta aksesibilitas.
		Data dan Informasi yang Diperlukan untuk Analisis Baseline: • Data jumlah sarana pendidikan baik formal maupun non formal beserta lokasinya. • Data jumlah penduduk yang tidak dapat membaca. • Data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan. • Data jumlah penduduk yang memiliki ketrampilan. • Data jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan.
		Pemangku Kepentingan: • Dinas Pendidikan • Dinas Ketenagakerjaan
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Gambaran Singkat:	Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan rata-rata masih rendah didukung oleh kualitas pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang masih terbilang rendah sehingga rata-rata masyarakat belum memiliki pengetahuan untuk menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat. Pada Kabupaten Kotawaringin Barat, kebersihan dan kesehatan masyarakat yang rata-rata masih rendah terlihat pada daerah sempadan sungai yang digunakan sebagai permukiman (rumah panggung). Pada daerah ini terdapat banyak sampah di sempadan sungai (dibawah rumah panggung) sehingga menimbulkan aroma tidak sedap dan menimbulkan bibit-bibit penyakit. Selain itu, masyarakat sekitar sungai menggunakan sungai untuk tempat pembuangan kotoran, serta menggunakan air sungai untuk mandi dan untuk kebutuhan air sehari-hari.
	Tujuan (Target dan Indikator):	• Meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. • Meningkatkan kualitas, kuantitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan pada masyarakat (puskesmas, rumah sakit, dan lainnya). • Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan dan mengatur penyebarannya agar merata.
	Isu-Isu Penting Terkait yang Perlu Didiskusikan:	• Kapasitas dan layanan sanitasi, kebersihan lingkungan permukiman dan air bersih masih rendah. • Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. • Kesadaran masyarakat untuk tidak mencemari lingkungan kurang.
	Data dan Informasi yang Diperlukan untuk Analisis Baseline:	• Data mortalitas • Data morbiditas • Data penduduk gizi buruk • Lokasi permukiman kumuh • Data jumlah sarana kesehatan • Data jumlah tenaga kesehatan



		Pemangku Kepentingan: • Dinas Kesehatan • Dinas Kebersihan dan Pertamanan • Dinas Sosial • Dinas Permukiman
Peningkatan prasarana memenuhi kebutuhan penduduk	sarana untuk kebutuhan	Gambaran Singkat: Beberapa wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki aksesibilitas yang buruk, terutama di daerah pedesaan. Selain itu untuk pelayanan jaringan transportasi antar wilayah masih terbatas, sehingga mobilitas penduduk terhambat. Terdapat beberapa wilayah yang tidak memiliki penerangan jalan sehingga penduduk yang ingin melakukan mobilitas pada malam hari rawan kecelakaan dan rawan kriminal. Kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik pada bagian wilayah yang terpencil juga masih kurang. Disamping itu infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan juga masih terbatas sehingga hasil panen mengalami penurunan. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam rangka mewujudkan kawasan yang tertata baik, manusiawi, serta menjamin tatanan kehidupan yang selaras dengan tujuan peningkatan kualitas ekologis, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial budaya untuk mencapai pembangunan perumahan dan permukiman yang manusiawi dan berkelanjutan. Tujuan (Target dan Indikator): • Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang permukiman • Menambah rute dan moda transportasi umum, terutama di pedesaan. • Memperbaiki dan menambah aksesibilitas antar wilayah terutama di pedesaan. • Menambah sumberdaya tenaga listrik pada daerah terpencil. • Memperbaiki dan menambah infrastruktur pengairan untuk pertanian. Isu-Isu Penting Terkait yang Perlu Didiskusikan: • Jaringan transportasi umum kurang memenuhi kebutuhan masyarakat. • Hasil panen mengalami penurunan dikarenakan infrastruktur pengairan yang kurang. Data dan Informasi yang Diperlukan untuk Analisis <i>Baseline</i>: • Data jumlah dan kondisi sarana prasarana permukiman. • Data rute dan moda transportasi umum. • Data dan lokasi aksesibilitas antar wilayah. • Data wilayah yang kekurangan sumberdaya tenaga listrik. • Data lokasi dan kondisi infrastruktur pengairan untuk pertanian. Pemangku Kepentingan: • Dinas PU dan Tata Ruang • Dinas Perhubungan • Dinas Pengairan • BAPPEDA
Menjaga	lingkungan	Gambaran Singkat:



dan hutan agar kerusakan menurun Beberapa industri di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaan kegiatan industrinya memberikan dampak negatif bagi lingkungan dikarenakan banyak yang melanggar prosedur kelestarian lingkungan. Terdapat beberapa industri dan rumah burung walet yang berlokasi ditepi sungai sehingga menurunkan kualitas air sungai, mayoritas terdapat pada *buffer zone* Sungai Kumai. Selain itu terdapat pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri dibidang pengolahan limbah kelapa sawit. Pembukaan hutan menjadi lahan menyebabkan penurunan jumlah air tanah di perkotaan dan menimbulkan asap yang mengganggu pernafasan. Terdapat pula penambang pasir (galian C) yang illegal yang dapat merusak ekosistem lingkungan.

Tujuan (Target dan Indikator):

- Pengelolaan limbah industri dengan mengharuskan adanya instalasi pengelolaan limbah di setiap industri.
- Pemberian batasan jumlah rumah burung walet dan merencanakan lokasinya agar tidak mencemari lingkungan.
- Peraturan tegas terkait sanksi pembukaan hutan ilegal, penambangan ilegal, dan kegiatan lainnya yang dapat merusak lingkungan.
- Pengendalian tingkat pencemaran air sungai.
- Pengelolaan sumber air sungai agar higienis untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat
- Peningkatan mutu kualitas air minum untuk layak minum masyarakat.

Isu-Isu Penting Terkait yang Perlu Didiskusikan:

- Rendahnya pelayanan sanitasi lingkungan permukiman dan air bersih.
- Kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat masih rendah.
- Kesadaran dan perilaku masyarakat serta pemilik industri untuk menjaga kelestarian lingkungan masih rendah.

Data dan Informasi yang Diperlukan untuk Analisis *Baseline*:

- Jumlah industri yang mencemari lingkungan.
- Jumlah dan lokasi permukiman yang mencemari lingkungan.
- Data pembukaan lahan hutan ilegal.
- Jumlah sanitasi dan air bersih.
- Data jumlah penggunaan air bersih dan sumber air bersih.
- Data ekosistem atau keanekaragaman hayati di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Data guna lahan beserta luasannya di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Data kualitas air sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemangku Kepentingan:

- Dinas Pengairan
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Permukiman
- Dinas Perindustrian
- PDAM
- Dinas Kehutanan

Meningkatkan

Gambaran Singkat:



penegakan hukum	Penegakan hukum disuatu wilayah/daerah memberikan pengaruh paling besar dalam suatu pembangunan. Tanpa adanya penegakan hukum yang baik, pembangunan dari segala aspek tidak akan berjalan dengan baik. Penegakan hukum di Kabupaten Kotawaringin Barat masih terbilang lemah. Terlihat dari lemahnya pengawasan/ pengendalian pemanfaatan ruang kota, lemahnya sanksi terhadap pembuangan limbah yang tidak sesuai aturan. Contohnya pabrik kayu lapis di Kelurahan Mendawai (PT. Korindo) berlokasi tepi sungai sehingga limbahnya mencemari sungai dan abu pengolahannya mencemari udara. Daerah <i>buffer zone</i> Sungai Kumai masih dimanfaatkan sebagai guna lahan budidaya yang seharusnya dimanfaatkan sebagai daerah resapan air. Selain itu, terdapat perubahan fungsi kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan, misalnya untuk kebun masyarakat/perusahaan yang belum sesuai dengan prosedur perijinan. Tujuan (Target dan Indikator): • Meningkatkan kinerja aparat hukum untuk menindak tegas pelanggar hukum. • Menegaskan kepada masyarakat dan pelaku industri terkait sanksi jika melanggar hukum. • Meningkatkan penegakan hukum pada diseluruh bidang untuk pembangunan yang berkelanjutan. Isu-Isu Penting Terkait yang Perlu Didiskusikan: • Pemanfaatan ruang belum sesuai dengan kaidah yang benar. • Beberapa perusahaan masih belum memiliki prosedur pengelolaan limbah sehingga mencemari lingkungan. • Pembukaan hutan ilegal masih banyak terjadi. Data dan Informasi yang Diperlukan untuk Analisis <i>Baseline</i>: • Jumlah industri/masyarakat yang masih melanggar hukum beserta lokasinya. • Data lokasi dan luas kerusakan lingkungan (air, udara, hutan, daratan, laut) • Data lokasi dan luas hutan. • Data lokasi dan luas pembukaan hutan ilegal. • Data ekosistem sungai dan hutan (flora dan fauna). Pemangku Kepentingan: • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Kehutanan • Polres Kotawaringin Barat
Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Gambaran Singkat: Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sumber daya hutan, sungai, kelautan, pertambangan, pertanian, perkebunan dan peternakan. Namun saat ini pengelolaan sumber daya alam belum dimanfaatkan oleh penduduk lokal secara optimal. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan masyarakat lokal yang masih rendah sehingga perekonomian masyarakat lokal mayoritas masih rendah. Pengelola sumber daya alam di Kotawaringin Barat mayoritas adalah penduduk pendatang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan



	ketrampilan yang lebih baik, sehingga tingkat perekonomian penduduk lokal sulit untuk meningkat. Tujuan (Target dan Indikator): • Pengelolaan SDA secara optimal oleh penduduk lokal. • Peningkatan ekonomi penduduk lokal dengan memanfaatkan SDA lokal. • Memperkenalkan ketrampilan dan teknologi kepada penduduk lokal untuk mengoptimalkan pengelolaan SDA. Isu-Isu Penting Terkait yang Perlu Didiskusikan: • Rendahnya pendidikan dan ketrampilan penduduk lokal. • Rendahnya tingkat perekonomian penduduk lokal. Data dan Informasi yang Diperlukan untuk Analisis <i>Baseline</i>: • Data hasil sumberdaya alam (pertanian, perkebunan kelautan, kehutanan, sungai, danau, dan sebagainya). • Data PDRB • Data tingkat pendidikan dan ketrampilan penduduk • Data jenis pekerjaan penduduk Pemangku Kepentingan: • Dinas Ketenagakerjaan • Dinas Pertanian • Dinas Perkebunan • Dinas Kehutanan • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah • Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa • Dinas Lingkungan Hidup
Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata	Gambaran Singkat: Kotawaringin Barat merupakan kota bekas peninggalan Kerajaan Kotawaringin yang berpusat di Kotawaringin Lama. Oleh karena itu, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki banyak peninggalan bersejarah antara lain istana kerajaan, benda-benda peninggalan kerajaan sampai makam peninggalan kerajaan yang berpotensi untuk dijadikan objek pariwisata budaya yang menarik banyak wisatawan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat sekitar. Adanya Taman Nasional Tanjung Puting yang mendatangkan banyak wisatawan dalam negeri dan mancanegara akan memberikan dampak yang positif jika peninggalan budaya dan sejarah di Kotawaringin Barat dimanfaatkan sebagai objek pariwisata budaya. Selain itu, jika peninggalan sejarah dan budaya dimanfaatkan sebagai objek pariwisata budaya secara tidak langsung akan menjaga kelestariannya sehingga tidak hilang tertelan oleh modernisasi atau rusak karena tidak dijaga dan tidak dilestarikan. Tujuan (Target dan Indikator): • Pengoptimalan potensi daya tarik wisata Kabupaten Kotawaringin Barat. • Meningkatkan daya saing objek dan daya tarik wisata Kabupaten Kotawaringin Barat • Meningkatkan fasilitas dan komponen pendukung pengembangan kegiatan pariwisata • Meningkatkan promosi dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan kerjasama-kerjasama strategis dengan



-
- operator wisata di daerah lain.
 - Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan.

Isu-Isu Penting Terkait yang Perlu Didiskusikan:

- Belum efektifnya usaha peningkatan dan penguatan perekonomian lokal.
- Tidak stabilnya ketersediaan energi listrik di beberapa daerah.
- Tingkat pendidikan masih di bawah angka standar nasional.

Data dan Informasi yang Diperlukan untuk Analisis *Baseline*:

- Data lokasi dan jenis wisata
- Data kondisi dan jumlah fasilitas/utilitas wisata
- Data karakteristik wisatawan di Kotawaringin Barat
- Data jumlah wisatawan di Kotawaringin Barat

Pemangku Kepentingan:

- Dinas Pariwisata
 - BAPPEDA
 - Dinas PU
-

3.6 TAHAP IDENTIFIKASI DAN ANALISIS DATA

Analisis baseline dilakukan untuk melihat kecenderungan masa lampau dan saat ini setiap isu pembangunan berkelanjutan teridentifikasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selanjutnya berdasarkan kecenderungan masa lalu dan masa kini, perkembangan kondisi kecenderungan di masa akan datang dapat teridentifikasi. Berikut adalah tabel dari hasil analisa *baseline* untuk setiap isu di Kabupaten Kotawaringin Barat.



3.7 TAHAP PELINGKUPAN

Hasil dari tahap pra pelingkupan yang diuraikan sebelumnya maka selanjutnya dilakukan analisis untuk pemusatan masing-masing isu sesuai dengan kriteria penilaiannya sehingga dapat dikonfirmasi prioritas berupa isu strategis yang telah dipilih. Berdasarkan dari 66 isu hasil verifikasi tahap sebelumnya, kemudian disepakati 7 isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan;
3. Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk;
4. Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun;
5. Meningkatkan penegakan hukum;
6. Mengoptimalkan pengelolaan SDA;
7. Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata.

Parameter dari setiap kriteria penilaian isu pembangunan berkelanjutan yang terdapat pada tabel 3.4 adalah sebagai berikut:

a. Dampak kumulatif:

- Nilai 1: Jika dampak terjadi dalam waktu 6 tahun.
- Nilai 2: Jika dampak terjadi dalam waktu 5 tahun.
- Nilai 3: Jika dampak terjadi dalam waktu 4 tahun.
- Nilai 4: Jika dampak terjadi dalam waktu 3 tahun.
- Nilai 5: Jika dampak terjadi dalam waktu 2 tahun.
- Nilai 6: Jika dampak terjadi dalam waktu 1 tahun.

b. Lintas sektoral:

- Nilai 1: Jika dampak mempengaruhi pada 1 sektor saja.
- Nilai 2: Jika dampak mempengaruhi pada 2 sektor.
- Nilai 3: Jika dampak mempengaruhi pada 3 sektor.
- Nilai 4: Jika dampak mempengaruhi pada 4 sektor.
- Nilai 5: Jika dampak mempengaruhi pada 5 sektor.
- Nilai 6: Jika dampak mempengaruhi pada 6 sektor.

c. Lintas wilayah:

- Nilai 1: Jika dampak mempengaruhi pada 1 desa saja



- Nilai 2: Jika dampak mempengaruhi pada total <25% dari seluruh kabupaten.
 - Nilai 3: Jika dampak mempengaruhi pada total 25-<50% dari seluruh kabupaten.
 - Nilai 4: Jika dampak mempengaruhi pada total 50-<75% dari seluruh kabupaten.
 - Nilai 5: Jika dampak mempengaruhi pada total 75-99% dari seluruh kabupaten.
 - Nilai 6: Jika dampak mempengaruhi pada kabupaten terdampak dan kabupaten sekitar.
- d. Dampak jangka panjang:
- Nilai 1: Jika dampak terjadi pada <1 tahun.
 - Nilai 2: Jika dampak terjadi pada 1-5 tahun.
 - Nilai 3: Jika dampak terjadi pada 6-10 tahun.
 - Nilai 4: Jika dampak terjadi pada 11-15 tahun.
 - Nilai 5: Jika dampak terjadi pada 16-20 tahun.
 - Nilai 6: Jika dampak terjadi lebih dari >20 tahun.
- e. Dampak Luas terhadap Pemangku Kepentingan:
- Nilai 1: Jika dampak yang terjadi hanya mempengaruhi 1 stakeholder.
 - Nilai 2: Jika dampak yang terjadi mempengaruhi 2 stakeholder.
 - Nilai 3: Jika dampak yang terjadi mempengaruhi 3 stakeholder.
 - Nilai 4: Jika dampak yang terjadi mempengaruhi 4 stakeholder.
 - Nilai 5: Jika dampak yang terjadi mempengaruhi 5 stakeholder.
 - Nilai 6: Jika dampak yang terjadi mempengaruhi >5 stakeholder.
(misal: masyarakat setempat, pemerintah, investor, petani, pembudidaya keramba).
- f. Darurat segera harus diatasi serta berpotensi dampak jangka panjang:
- Nilai 1: Dampak yang terjadi dapat ditangani dalam waktu >5 tahun.
 - Nilai 2: Dampak yang terjadi harus segera ditangani dalam waktu 4-5 tahun.
 - Nilai 3: Dampak yang terjadi harus segera ditangani dalam waktu 3-4 tahun.



- Nilai 4: Dampak yang terjadi harus segera ditangani dalam waktu 2-3 tahun.
 - Nilai 5: Dampak yang terjadi harus segera ditangani dalam waktu 1-2 tahun.
 - Nilai 6: Dampak yang terjadi harus segera ditangani dalam waktu <1 tahun.
- g. Mempunyai keterkaitan/ berpengaruh terhadap visi, misi dan tujuan pembangunan daerah:
- Nilai 1: Jika isu tersebut tidak memiliki hubungan/faktor dengan visi, misi dan tujuan RPJMD
 - Nilai 2: Jika isu tersebut memiliki hubungan/faktor secara tidak langsung dengan dengan visi, misi dan tujuan RPJMD
 - Nilai 3: Jika isu tersebut memiliki hubungan/faktor secara langsung dengan visi, misi dan tujuan RPJMD
 - Nilai 4: Jika isu tersebut memiliki keterkaitan dampaknya namun tidak langsung dengan visi, misi dan tujuan RPJMD.
 - Nilai 5: Jika isu tersebut memiliki keterkaitan dampaknya langsung dengan visi, misi dan tujuan RPJMD.
 - Nilai 6: Jika isu tersebut tersebutkan pada visi, misi dan tujuan RPJMD.

Hasil dari tahap pelingkupan di atas, selanjutnya dilakukan pembobotan untuk masing-masing isu sesuai dengan kriteria penilaiannya untuk mengkonfirmasi prioritas terhadap isu strategis yang terpilih. Penilaian untuk masing-masing isu dapat dilihat pada Tabel 3.4, Tabel 3.5 dan Tabel 3.6.



Tabel 3. 4 Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan vs Kriteria

Daftar Isu	Kriteria Penilaian Isu							Total Nilai Bobot Per Isu (Nilai Penting Untuk Menetapkan Isu Strategis)
	Dampak Kumulatif	Lintas Sektoral	Lintas Wilayah	Dampak Jangka Panjang	Dampak Luas terhadap Pemangku Kepentingan	Darurat segera harus diatasi serta berpotensi dampak jangka panjang	Mempunyai keterkaitan/ berpengaruh terhadap visi, misi dan tujuan pembangunan daerah	
Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	5	6	5	6	3	5	6	36
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	4	4	3	4	4	5	6	30
Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	6	6	4	5	3	5	6	34
Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	6	4	6	5	5	5	6	37
Meningkatkan penegakan hukum	3	3	4	4	4	5	6	29
Mengoptimalkan pengelolaan SDA	4	3	4	3	4	4	6	28
Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata	4	3	2	4	4	4	6	27



Tabel 3. 5 Pembobotan Kriteria

Daftar Isu	Kriteria Penilaian Isu							Total Nilai Bobot Per Isu (Nilai Penting Untuk Menetapkan Isu Strategis)
	Dampak Kumulatif	Lintas Sektoral	Lintas Wilayah	Dampak Jangka Panjang	Dampak Luas terhadap Pemangku Kepentingan	Darurat segera harus diatasi serta berpotensi dampak jangka panjang	Mempunyai keterkaitan/ berpengaruh terhadap visi, misi dan tujuan pembangunan daerah	
Isu-isu	15%	10%	10%	10%	15%	25%	15%	100%

Keterangan:

Nilai 1: Sangat kurang penting.

Nilai 2: Kurang penting

Nilai 3: Cukup penting

Nilai 4: Lebih dari penting

Nilai 5: Penting

Nilai 6: Sangat penting

Sumber: <https://sumberbagi.wordpress.com/2013/02/26/cara-mengolah-skor-atau-nilai-dan-mencari-nilai-akhir/>



Tabel 3. 6 Penilaian-Pembobotan Isu Pembangunan Berkelanjutan vs Kriteria

Daftar Isu	Kriteria Penilaian Isu							Total
	Dampak Kumulatif	Lintas Sektoral	Lintas Wilayah	Dampak Jangka Panjang	Dampak Luas terhadap Pemangku Kepentingan	Darurat segera harus diatasi serta berpotensi dampak jangka panjang	Mempunyai keterkaitan/berpengaruh terhadap visi, misi dan tujuan pembangunan daerah	
Bobot	0.15	0.1	0.1	0.1	0.15	0.25	0.15	
Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	0.75	0.6	0.5	0.6	0.45	1.25	0.9	5.05
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	0.6	0.4	0.3	0.4	0.6	1.25	0.9	4.45
Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	0.6	0.3	0.4	0.3	0.6	1	0.9	4.1
Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	0.9	0.4	0.6	0.5	0.75	1.25	0.9	5.3
Meningkatkan penegakan hukum	0.9	0.6	0.4	0.5	0.45	1.25	0.9	5
Mengoptimalkan pengelolaan SDA	0.6	0.3	0.4	0.3	0.6	1	0.9	4.1
Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata	0.6	0.3	0.2	0.4	0.6	1	0.9	4



Berdasarkan hasil penilaian dan pembobotan isu pembangunan berkelanjutan dengan kriteria di dapatkan tiga isu yang menjadi isu prioritas atau isu strategis di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu :

1. Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun

Hutan dan lingkungan merupakan elemen yang cukup penting dan vital dimana kondisi hutan dan lingkungan sekitar sangat mempengaruhi kehidupan. Hutan sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati, flora dan fauna, sebagai paru-paru dunia menghasilkan oksigen, juga sebagai penyimpan air tanah. ketika hutan mulai rusak akan banyak sendi-sendi kehidupan manusia yang terganggu, mulai dari ketersediaan air tanah, pasokan udara yang bersih, dan hilangnya sumber makanan yang terdiri dari hewan dan tumbuhan yang berlindung dalam hutan. Hutan dan lingkungan sekitar juga berperan sebagai lahan produksi, namun jika tidak dilakukan pengawasan dalam pengelolaannya akan menimbulkan kerugian dimasa yang akan datang.

2. Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM

Tingkat pendidikan berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia, dimana hal tersebut juga akan berpengaruh dalam kehidupan sosial maupun ekonomi suatu masyarakat. Diperlukan adanya peningkatan kualitas pendidikan untuk menunjang kemajuan jaman di era modernisasi ini. Beberapa teknologi sudah dikembangkan pada daerah-daerah terpencil, namun bila tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai, program-program tersebut tidak akan berjalan optimal.

3. Meningkatkan penegakan hukum

Penegakan hukum dalam hal ini adalah banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun aktivitas ekonomi yang berlangsung secara ilegal. Hal tersebut selain mengancam keselamatan jiwa, juga menimbulkan kerusakan alam dan lingkungan serta kerugian yang dialami oleh masyarakat maupun daerah/negara.

3.8 TAHAP PENGKAJIAN

Pada tahap ini akan dilakukan kajian terhadap rancangan RPJMD sehingga dapat diketahui potensi pengaruh, terutama yang mempunyai resiko terhadap lingkungan hidup terutama yang terkait dengan konteks isu-isu



pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memuat kajian antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan,
- b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup,
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem,
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam,
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Tingkat kedalaman pengkajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJMD terkait muatan-muatan kajian diatas sangat relatif, tergantung pada kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah.

Metodologi pengkajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan RPJMD yang ditentukan adalah:

a. Mengkaji Prinsip Keterkaitan

Kajian prinsip keterkaitan dilakukan dengan analisis substansi (*content analysis*) terhadap rumusan isu strategis yang termuat dalam visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, baik secara horisontal maupun vertikal. Kajian keterkaitan mempertimbangkan keterkaitan: a) antar wilayah; dan b) antar waktu, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan.

1. Keterkaitan Antar Wilayah

Keterkaitan antar wilayah meliputi wilayah administrasi (formal) dan wilayah fungsional. Keterkaitan antar wilayah administrasi adalah keterkaitan antara visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan wilayah administrasi yang bersangkutan dengan wilayah administrasi yang ada di sekitarnya dan dengan tingkat di atasnya. Keterkaitan antar wilayah fungsional menjelaskan keterkaitan antar wilayah yang didasarkan pada kesamaan karakteristik fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Penetapan wilayah fungsional menjadi basis entitas geografis yang diperoleh atas dasar hasil tahapan



pelingkupan. Wilayah fungsional ini dapat melintasi batas wilayah administrasi daerah yang bersangkutan.

2. Keterkaitan Antar Waktu, Antar Sektor, dan Antar Pemangku Kepentingan

Keterkaitan antar waktu Keterkaitan antar waktu menjelaskan: (a) keterkaitan rangkaian waktu pelaksanaan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada 5 tahun pertama hingga keempat dalam satu kurun waktu perencanaan jangka panjang daerah; (b) keterkaitan dengan kurun waktu perencanaan pembangunan jangka panjang sebelumnya. Keterkaitan antar sektor menjelaskan keterkaitan antar kebijakan dan/atau program pembangunan dari setiap sektor untuk mencapai suatu sinergitas. Keterkaitan antar pemangku kepentingan menjelaskan keterkaitan antara pemangku kepentingan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi/tokoh masyarakat dalam hal pengaruh mereka, baik manfaat maupun resiko, dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD.

b. Mengkaji Prinsip Keseimbangan

Pengkajian prinsip keseimbangan dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup dalam satu daerah kajian yang bersangkutan (provinsi atau kabupaten/kota). Keseimbangan yang dimaksud adalah bersifat proporsional sesuai dengan karakteristik pada wilayah masing-masing dan juga termasuk wilayah sekitarnya secara fungsional.

c. Mengkaji Prinsip Keadilan

Pengkajian prinsip keadilan dimaksudkan untuk mencapai keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Pengkajian prinsip keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi lebih menitikberatkan pada orientasi pencapaian kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan. Indikator utama yang dikaji dalam hal ini adalah:

- Keadilan pemerataan pembangunan bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat sosial ekonomi pembangunan,



-
- Keadilan dalam akses, memperoleh, dan memanfaatkan sumber daya alam dan memperoleh manfaat dari kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan lestari.

Sebelum melakukan kajian keterkaitan antar wilayah, perlu dilakukan kajian konsistensi antar dokumen terlebih dahulu, yaitu antara RPJMD dan RTRW provinsi/kabupaten/kota. Untuk keperluan ini dapat digunakan Tabel berikut.



Tabel 3. 7 Kajian Pengaruh RPJMD dengan RTRW

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022	RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037	Tingkat Konsistensi/Keterkaitan			Catatan Perbaikan
		Konsisten	Kurang	Tidak	
VISI: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas. Kata kunci: Kerja nyata dan ikhlas (maju, taqwa, harmonis, langgeng, aman, sejahtera)	VISI: Kabupaten Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan dengan Masyarakatnya yang Maju, Aman, Tertib, Damai, Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Kata kunci: maju, aman, tertib, damai, sejahtera, demokratis dan berkeadilan	√			Beberapa kata kunci dalam visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 belum menunjukkan kesinambungan dengan rumusan visi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat 2015-2034. Kata kunci tertib, demokratis dan berkeadilan yang terindikasi dalam RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat 2015-2034 masih belum terakomodasi dalam visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022.
MISI: 1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga. 3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada	MISI: 1. Melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan daerah dengan mengedepankan stabilitas politik, supremasi hukum, demokratisasi, berkeadilan dan akuntabilitas. 2. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi	√			Berdasarkan kata kunci yang ada dalam RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat 2015-2034, rumusan misi pelayanan public secara bertanggung jawab dan benar belum terdapat pada rumusan misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022.



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022	RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037	Tingkat Konsistensi/Keterkaitan			Catatan Perbaikan
		Konsisten	Kurang	Tidak	
pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup. 4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat. 5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis. 6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata. Kata Kunci: pemerintahan yang baik, pendidikan, kesehatan dan olahraga, pertanian, kelautan, industri, pengelolaan potensi daerah dan sumber energi, beragama, bermasyarakat dengan baik, aman, tenteram, dinamis, peningkatan pariwisata budaya.	kerakyatan yang berorientasi kepada kekuatan ekonomi pasar serta berbasis pada sumber daya alam dan SDM yang produktif, kompetitif, mandiri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 3. Mengembangkan dan melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah di daerah secara demokratis, transparan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menyusun dan melaksanakan program pembangunan berdasarkan skala prioritas secara demokratis, adil dan merata sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. 5. Melakukan pelayanan publik secara bertanggung jawab dan benar untuk terselenggaranya proses pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna.				



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022	RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037	Tingkat Konsistensi/ Keterkaitan			Catatan Perbaikan
		Konsisten	Kurang	Tidak	
	Kata Kunci: pemerintahan yang baik, kekuatan ekonomi pasar berbasis pada sumber daya alam dan SDM yang produktif, kompetitif, mandiri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, demokratis, transparan, adil, merata, pelayanan publik bertanggung jawab dan benar.				
TUJUAN: TUJUAN MISI 1: 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>). 2. Peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan. 3. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah. 4. Peningkatan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas. TUJUAN MISI 2: 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. TUJUAN MISI 3: 1. Peningkatan ketahanan pangan.	TUJUAN PENATAAN RUANG: Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, agroindustri, dan pariwisata ekologis. Kata kunci: aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, pertanian, kelautan, agroindustri, pariwisata ekologis.	√			Dengan mempertimbangkan bahwa RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat 2015-2034 merupakan suatu kebijakan pembangunan spasial yang harus diterjemahkan ke dalam rumusan kebijakan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022, maka: 1. Secara konseptual, semua kata kunci dalam rumusan tujuan penataan ruang sudah terdetailkan ke dalam masing-masing tujuan perencanaan pembangunan dalam



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022	RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037	Tingkat Konsistensi/Keterkaitan			Catatan Perbaikan
		Konsisten	Kurang	Tidak	
2. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. 3. Pengembangan industri, koperasi dan UMKM serta daya saing daerah. 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari. TUJUAN MISI 4: 1. Peningkatan pemahaman, kesadaran dan pengamalan agama dan nilai sosial budaya masyarakat. TUJUAN MISI 5: 1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat. 2. Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat. TUJUAN MISI 6: 1. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya. 2. Peningkatan pariwisata daerah. Kata kunci: pemerintahan yang baik, kemandirian, pemerataan infrastruktur, kesesuaian tata ruang, kualitas SDM, ketahanan pangan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pengembangan					Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022. 2. Perlu segera adanya perincian masing-masing tujuan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 ke dalam rencana yang lebih bersifat praktis yang terselaraskan dengan perincian perencanaan pemanfaatan ruang sebagai turunan dari RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2037.



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022	RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037	Tingkat Konsistensi/Keterkaitan			Catatan Perbaikan
		Konsisten	Kurang	Tidak	
industri, kualitas lingkungan hidup, pengamalan agama, pemberdayaan masyarakat, ketertiban dan ketenteraman, pelestarian nilai-nilai budaya, pariwisata daerah.					
ARAH KEBIJAKAN: ARAH KEBIJAKAN 1: 1. Peningkatan SDM aparatur Daerah. 2. Peningkatan sistem tata kelola pemerintahan. 3. Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan daerah. 4. Peningkatan pelayanan publik. 5. Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat. 6. Peningkatan pengelolaan data dan informasi daerah. ARAH KEBIJAKAN 2: Peningkatan sumber pendapatan daerah. ARAH KEBIJAKAN 3: 1. Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi. 2. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastuktur transportasi yang layak	ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN RUANG: 1. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan; 2. Pengembangan pertanian dan perkebunan sawit didukung oleh agroindustri yang berwawasan lingkungan; 3. Pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya kelautan sepanjang pantai kumai yang tidak merusak lingkungan 4. Pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya kerajaan kotawaringin dan pariwisata ekologis berbasis hutan untuk taman nasional tanjung puting, taman wisata tanjung keluang dan suaka margasatwa sungai lamandau; 5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;	✓			1. Beberapa kata kunci pada RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat 2015-2034 yang masih belum terlihat terjemahannya dalam rumusan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 adalah pengembangan perkebunan sawit dan agroindustri. 2. Kata kunci peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan pada RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2037 masih belum terlihat dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022. 3. Penetapan pusat-pusat kegiatan yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Kotawaringin



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022	RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037	Tingkat Konsistensi/Keterkaitan			Catatan Perbaikan
		Konsisten	Kurang	Tidak	
pendukung investasi. 3. Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar desa/kelurahan dan antar kecamatan. 4. Peningkatan ketercukupan energi listrik. 5. Peningkatan ketersediaan air bersih. 6. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pelabuhan/dermaga, terminal dan bandara.	dan 6. Penetapan pusat-pusat kegiatan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah guna mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah.				Barat 2017-2037 masih belum terlihat dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022.
ARAH KEBIJAKAN 4: 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang. 2. Pembangunan/pengembangan wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang.	Kata kunci: pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, pertanian, perkebunan sawit, agroindustri berwawasan lingkungan, kelautan, pariwisata cagar budaya dan ekologis, kawasan pertahanan dan keamanan, pusat-pusat kegiatan.				
ARAH KEBIJAKAN 5: 1. Peningkatan kualitas dan pemerataan guru pada semua jenjang pendidikan. 2. Pengoptimalisasian manajemen pendidikan. 3. Peningkatan kualitas dan					



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022	RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037	Tingkat Konsistensi/Keterkaitan			Catatan Perbaikan
		Konsisten	Kurang	Tidak	
pemerataan sarana dan prasarana.					
4. Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan.					
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.					
6. Peningkatan kualitas dan pemerataan dokter dan paramedis.					
7. Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana kepustakaan dan arsiparis.					
8. Peningkatan dan pemerataan layanan kesehatan keluarga dan masyarakat.					
ARAH KEBIJAKAN 6:					
Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.					
ARAH KEBIJAKAN 7:					
1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan kelautan.					
2. Peningkatan produksi pertanian dan kelautan.					
3. Optimalisasi dan mempertahankan kawasan pangan utama.					



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022	RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037	Tingkat Konsistensi/Keterkaitan			Catatan Perbaikan
		Konsisten	Kurang	Tidak	
4. Peningkatan ketersediaan bahan pokok strategis.					
ARAH KEBIJAKAN 8:					
1. Peningkatan perekonomian daerah.					
ARAH KEBIJAKAN 9:					
1. Peningkatan investasi daerah.					
2. Peningkatan produksi pertanian dan kelautan.					
3. Penyiapan kawasan pengembangan industri.					
4. Peningkatan layanan permodalan koperasi dan UMKM.					
ARAH KEBIJAKAN 10:					
1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.					
2. Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan.					
ARAH KEBIJAKAN 11:					
1. Meningkatnya layanan kehidupan beragama.					
2. Peningkatan pembinaan dan pelayanan sosial kemasyarakatan.					
3. Peningkatan perlindungan KDRT dan					



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022	RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037	Tingkat Konsistensi/ Keterkaitan			Catatan Perbaikan
		Konsisten	Kurang	Tidak	
anak.					
4. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan layak anak.					
ARAH KEBIJAKAN 12:					
1. Peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan masyarakat.					
2. Peningkatan penanggulangan kriminalitas dan narkoba.					
ARAH KEBIJAKAN 13:					
1. Peningkatan pengelolaan aset budaya dan pariwisata.					
2. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata.					
3. Peningkatan SDM pariwisata.					



Tabel 3.9 sampai dengan Tabel 3.11 digunakan untuk melakukan kajian prinsip keterkaitan. Kajian konsistensi vertikal dilakukan dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan antar urusan pemerintahan di daerah secara vertikal sampai tingkat nasional yang relevan. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini diantaranya adalah Tabel 3.9. Tabel 3.10 digunakan untuk menunjukan kaitan antara rumusan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 dengan dokumen RPJMD daerah tetangga, yaitu RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018 dan RPJMD Kabupaten Sukamara 2013-2018 yang masih berlaku selama penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 ini. Sedangkan Tabel 3.11 digunakan untuk mengkaji keterkaitan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 pada antar waktu, antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Sehingga dalam perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 tepat sasaran pada semua aspek.



Tabel 3. 8 Kajian Konsistensi RPJMD Kabupaten/Kota – Provinsi - Nasional

Dokumen Perencanaan	Substansi yang Dikaji		Catatan Perbaikan
	Visi dan Misi	Sasaran Pokok	
RPJMN Tahun 2015-2019	Visi: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong Misi: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	1. SASARAN MAKRO: Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dan Ekonomi Makro. 2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT: Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pembangunan Masyarakat. 3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN: Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi, Maritim dan Kelautan, Pariwisata dan Industri Manufaktur, Ketahanan Air, dan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas. 4. SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN: Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi, dan Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu. 5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH: Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah. 6. SASARAN PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN: Politik dan Demokrasi, Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi,	Kata kunci: Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian, Gotong-Royong. Dengan mempertimbangkan hirarki kedudukan perencanaan, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 telah menjadi terjemahan dari konsep pembangunan nasional jangka menengah sekaligus juga konsep pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah. Rumusan visi Misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 menjabarkan visi-misi nasional dan provinsi kedalam rumusan yang berorientasi spesifik pada kondisi di Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini hingga lima tahun mendatang.



Dokumen Perencanaan	Substansi yang Dikaji		Catatan Perbaikan
	Visi dan Misi	Sasaran Pokok	
	6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah, dan Pertahanan dan Keamanan.	
RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021	Visi: Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis). Misi: 1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi 2. Pengelolaan Infrastruktur 3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai 4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan 5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah 6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata 7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam	1. Terwujudnya perencanaan tata ruang yang akomodif dan konsisten, dengan indikator persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah terhadap kebutuhan ruang. 2. Meningkatnya konektivitas antar daerah, dengan indikator persentase jalan mantap dan persentase konektivitas jalan. 3. Meningkatnya ketercukupan energi, dengan indikator meningkatnya rasio desa berlistrik dan Rasio elektrifikasi. 4. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, dengan indikator produktivitas padi, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan. 5. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator tingkat kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi. 6. Meningkatnya daya beli masyarakat,	Kata kunci: Maju, Mandiri, Adil, Sejahtera, Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis. Misi kedua dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 yaitu Pengelolaan Infrastruktur belum terumuskan kedalam misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022. Selain itu, visi dan misi dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 telah diterjemahkan kedalam rumusan visi Misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 yang berorientasi spesifik pada kondisi di Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini hingga lima tahun mendatang.



Dokumen Perencanaan	Substansi yang Dikaji		Catatan Perbaikan
	Visi dan Misi	Sasaran Pokok	
	8. Pengelolaan Pendapatan Daerah	dengan indikator Laju Inflasi dan pendapatan perkapita.	
	7. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau, dengan indikator Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB.		
	8. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, dengan indikator Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dan tingkat pengangguran terbuka.		
	9. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator opini BPK.		
	10. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).		
	11. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dengan indikator hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.		
	12. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan, dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dan predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah.		
	13. Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator IPM, rata-rata lama		



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



Dokumen Perencanaan	Substansi yang Dikaji		Catatan Perbaikan
	Visi dan Misi	Sasaran Pokok	
		sekolah dan angka harapan usia sekolah 14. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator angka harapan hidup. 15. Terpasarkannya destinasi wisata, dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan. 16. Menurunnya degradasi lingkungan, dengan indikator peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. 17. Meningkatnya pendapatan asli daerah, dengan indikator persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, persentase PAD terhadap total pendapatan transfer dan persentase belanja langsung (BL) terhadap APBD.	
RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022	Visi: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas. Misi: - Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. - Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan,	- Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan. - Meningkatnya pendapatan asli daerah. - Meningkatnya konektivitas antar daerah. - Meningkatnya ketercukupan energi listrik dan air bersih. - Merealisasikan perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten. - Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



Dokumen Perencanaan	Substansi yang Dikaji		Catatan Perbaikan
	Visi dan Misi	Sasaran Pokok	
	kesehatan dan olahraga. 3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup. 4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat. 5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis. 6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.	8. Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga. 9. Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan kelautan. 10. Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat. 11. Meningkatnya industri hulu-hilir dan kemitraan usaha. 12. Meningkatnya daya saing investasi daerah. 13. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 14. Meningkatnya pengelolaan persampahan. 15. Meningkatnya layanan kehidupan beragama. 16. Meningkatnya kerukunan dan kesejahteraan masyarakat. 17. Meningkatnya kesempatan kerja, dan penurunan angka pengangguran. 18. Meningkatnya rasa aman dan tenteram bagi masyarakat. 19. Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya. 20. Meningkatnya kunjungan wisatawan dan destinasi wisata.	



Tabel 3. 9 Kajian Persandingan Rencana Pembangunan Daerah Sekitar

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022	RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018	RPJMD Kabupaten Sukamara 2013-2018
VISI: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas. Kata kunci: Kerja nyata dan ikhlas (maju, taqwa, harmonis, langgeng, aman, sejahtera).	VISI: Terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata Kunci: Kesejahteraan Masyarakat, Pemerintahan yang Baik, Keimanan, Ketaqwaan.	VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sukamara Yang Lebih Maju, Sejahtera, Mandiri, Aman, Damai Dan Bermartabat Kata Kunci: Lebih maju, sejahtera, mandiri, aman, damai, bermartabat
MISI: 1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui Pendidikan, kesehatan, dan olahraga. 3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industry serta pengelolaan potensi daerah dan energi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat. 5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan dinamis. 6. Melestarikan situs budaya, kesenian local dan masyarakat lainnya guna meningkatkan	MISI: 1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri. 3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun. 4. Menciptakan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau. 5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa. 6. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten	MISI: 1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkelanjutan serta bermanfaat kepada masyarakat. 2. Mewujudkan pendidikan gratis yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat guna membangun sumber daya manusia yang cerdas, beriman, unggul dan tangguh. 3. Mewujudkan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat dengan mengutamakan kepada keluarga yang kurang mampu 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pertanian, perikanan, peternakan, UKM, Koperasi, jasa, dll) yang mampu menyerap lapangan pekerjaan dengan memaksimalkan pengelolaan potensi



RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022	RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018	RPJMD Kabupaten Sukamara 2013-2018
kunjungan wisata. Kata Kunci: pemerintahan yang baik, pendidikan, kesehatan dan olahraga, pertanian, kelautan, industri, pengelolaan potensi daerah dan sumber energi, beragama, bermasyarakat dengan baik, aman, tenteram, dinamis, peningkatan pariwisata budaya.	Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya. 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani. 8. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 9. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan. 10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kata Kunci: kualitas SDM, ekonomi kerakyatan, perekonomian perdesaan, investasi dan UMKM, infrastruktur, good governance.	sumber daya alam yang efektif dan efisien. 5. Meningkatkan program transmigrasi untuk menggeliatkan sektor perekonomian 6. Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah untuk kesejahteraan masyarakat 7. Meningkatkan pemberdayaan pemuda, organisasi kemasyarakatan, kepramukaan, olah raga serta sosial budaya. 8. Mewujudkan Kabupaten Sukamara yang aman, rukun, damai dan bersih sebagai pengejawantahan masyarakat yang beriman dan bertaqwa 9. Penataan tata ruang kota yang berkelanjutan dengan mengutamakan pelestarian Lingkungan Hidup. 10. Menyelenggarakan <i>Good and Clean Governance</i> (pemerintahan yang baik, efisien, efektif, bersih dan bebas KKN) dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. 11. Memaksimalkan potensi cagar budaya, kesenian daerah, wisata daerah sebagai sarana promosi dan identitas daerah Kabupaten Sukamara. Kata Kunci: Infrastruktur, pertumbuhan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, transmigrasi,



RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022	RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018	RPJMD Kabupaten Sukamara 2013-2018
TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (BERDASAR MISI): TUJUAN MISI 1: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>), Peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan, Peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah, Peningkatan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas. TUJUAN MISI 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia. TUJUAN MISI 3: Peningkatan ketahanan pangan, Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, Pengembangan industri, koperasi dan UMKM serta daya saing daerah, Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari. TUJUAN MISI 4: Peningkatan pemahaman, kesadaran dan pengamalan agama dan nilai sosial budaya masyarakat. TUJUAN MISI 5: Peningkatan pemberdayaan masyarakat,	TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (BERDASARKAN MISI): TUJUAN MISI 1: Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam. Meningkatkan investasi melalui penyediaan fasilitas dan insentif serta kemitraan dengan UMKM, Koperasi dan IKM. TUJUAN MISI 2: Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia handal dengan produktivitas tinggi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. TUJUAN MISI 3: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan. TUJUAN MISI 4: Mewujudkan kehidupan yang tenteram, nyaman, dan terpeliharanya keamanan serta semangat berkebangsaan. TUJUAN MISI 5: Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan keseimbangan lingkungan	kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan pemuda, keamanan, lingkungan hidup, <i>good and clean governance</i>, kebudayaan. TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (BERDASARKAN MISI): TUJUAN MISI 1: Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana umum. TUJUAN MISI 2: Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. TUJUAN MISI 3: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat. TUJUAN MISI 4: Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. TUJUAN MISI 5: Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui program transmigrasi. TUJUAN MISI 6: Peningkatan pendapatan daerah secara optimal sesuai dengan potensi daerah. TUJUAN MISI 7: Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dan olahraga. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.



RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022	RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018	RPJMD Kabupaten Sukamara 2013-2018
Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat. TUJUAN MISI 6: Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya, Peningkatan pariwisata daerah.	dan tata ruang yang sesuai peruntukan. TUJUAN MISI 6: Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat. TUJUAN MISI 7: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel. Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan publik. TUJUAN MISI 8: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. TUJUAN MISI 9: Meningkatkan daya saing pariwisata. TUJUAN MISI 10: Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.	TUJUAN MISI 8: Terwujudnya kabupaten Sukamara yang aman, rukun, damai dan bersih. TUJUAN MISI 9: Kota yang tertata, tertib, bersih dan lestari. Pelestarian hutan. TUJUAN MISI 10: Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bebas KKN. TUJUAN MISI 11: Melestarikan Seni dan Budaya Lokal sebagai warisan leluhur. Tertatanya Objek Wisata Alam guna menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Catatan hasil persandingan: Terdapat beberapa kesamaan visi-misi-tujuan pembangunan dalam setiap rumusan RPJMD di masing-masing daerah. Jika RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018 maka misi yang belum terdapat pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 adalah mengenai peningkatan infrastruktur dan membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa. Jika RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Sukamara 2013-2018 maka misi yang belum terdapat pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 adalah mengenai peningkatan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan gratis, transmigrasi, dan pemberdayaan pemuda. Meskipun dalam rumusan detail di setiap visi-misi dan tujuan terkadang berbeda, akan tetapi mayoritas penjabarannya sama. Perlu diperhatikan yaitu kesamaan target pembangunan di setiap daerah memungkinkan sama, akan tetapi ciri khas potensi dan masalah di setiap daerah berbeda. Perbedaan		



***Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022***



**RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat
2017-2022**

RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018

RPJMD Kabupaten Sukamara 2013-2018

ini yang seharusnya mampu diakomodasi dalam rumusan visi-misi-tujuan pembangunan setiap daerah. Perbedaan potensi dan masalah ini juga menjadi dasar untuk menentukan fungsi spesifik suatu daerah dalam sistem pembangunan wilayah.



Tabel 3. 10 Instrumen Kajian Prinsip Keterkaitan RPJMD

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022	Prinsip Pembangunan Berkelanjutan			Catatan Perbaikan
	Keterkaitan			
	Antar Waktu	Antar Sektor	Antar Pemangku Kepentingan	
Visi: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas.	Jika dibandingkan dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016, visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 sudah lebih maju, dengan mengedepankan IPTEK dan infrastruktur, moral, keharmonisan, aman dan sejahtera.	Kata Kunci: Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Olahraga, Pertanian, Kelautan, Industri, Energi, Kebudayaan, Keagamaan, Pariwisata. Dengan mengutamakan peningkatan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga maka pertanian, kelautan, industri, energi, kebudayaan, keagamaan, pariwisata menjadi sektor pendukung yang terintegrasi.	Kata kunci: Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Olahraga, Pertanian, Kelautan, Industri, Energi, Kebudayaan, Keagamaan, Pariwisata. Penggunaan kata-kata kunci di atas seharusnya tidak hanya mengandung pengertian aktivitas sektoral, tetapi juga mempunyai makna pelaku masing-masing aktivitasnya.	Sebagai sebuah konsep, visi dan misi terumus sudah mendefinisikan keterkaitan sektoral dan pemangku kepentingan dengan jelas. Memperjelas misi kedalam rincian misi pada setiap tahun akan lebih mempermudah penjabarannya ke dalam program-kegiatan masing-masing SKPD dalam Renstra.
Misi: 1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga. 3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan	1. Peningkatan SDM pada misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 lebih baik jika dibandingkan dengan misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016 yaitu melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga. 2. Pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016 terdapat misi pemerataan pembangunan yang tidak			



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022	Prinsip Pembangunan Berkelanjutan			Catatan Perbaikan
	Keterkaitan			
	Antar Waktu	Antar Sektor	Antar Pemangku Kepentingan	
memperhatikan lingkungan hidup. 4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat. 5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis. 6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.	terdapat pada misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022.			
Sasaran: 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan. 2. Meningkatnya pendapatan asli daerah. 3. Meningkatnya konektivitas antar daerah. 4. Meningkatnya ketercukupan energi listrik dan air bersih. 5. Merealisasikan perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten. 6. Meningkatnya derajat pendidikan	Sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan dan destinasi wisata pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 belum terdapat pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016.	Setiap kata kunci di atas, diterjemahkan ke dalam bentuk sasaran terukur dalam rumusan RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022. Dengan demikian, keterkaitan antar sektor dalam sasaran ini sudah diidentifikasi secara spesifik sesuai dengan kebutuhan pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat serta kemampuan masing-masing sektor terkait. Secara langsung, keterkaitan sektoral ini berimplikasi pada keterkaitan antar pemangku kepentingan.	Perlu segera tersusun dokumen rincian program dan kegiatan untuk masing-masing tujuan dan sasaran yang telah teridentifikasi disertai dengan definisi keterlibatan antar sektor dan antar pemangku kepentingannya. Ada baiknya, bila rincian tersebut masuk ke dalam RENSTRA masing-masing SPKD dengan adanya penjelasan porsi keterlibatan masing-masing.	



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022	Prinsip Pembangunan Berkelanjutan			Catatan Perbaikan
	Keterkaitan			
	Antar Waktu	Antar Sektor	Antar Pemangku Kepentingan	
masyarakat.				
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.				
8. Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.				
9. Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan kelautan.				
10. Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat.				
11. Meningkatnya industri hulu–hilir dan kemitraan usaha.				
12. Meningkatnya daya saing investasi daerah.				
13. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.				
14. Meningkatnya pengelolaan persampahan.				
15. Meningkatnya layanan kehidupan beragama.				
16. Meningkatnya kerukunan dan kesejahteraan masyarakat.				
17. Meningkatnya kesempatan kerja, dan penurunan angka pengangguran.				
18. Meningkatnya rasa aman dan				



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022	Prinsip Pembangunan Berkelanjutan			Catatan Perbaikan
	Keterkaitan			
	Antar Waktu	Antar Sektor	Antar Pemangku Kepentingan	
tenteram bagi masyarakat.				
19. Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya.				
20. Meningkatnya kunjungan wisatawan dan destinasi wisata.				



Tabel 3. 11 Instrumen Kajian Prinsip Keseimbangan RPJMD

RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022	Keseimbangan			Catatan Perbaikan
	Ekonomi	Sosial	Lingkungan Hidup	
Visi: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas.	Kata Kunci: Kejayaan	Kata Kunci: Kerja nyata, ikhlas, taqwa, harmonis, langgeng, aman, sejahtera.	Kata kunci: Tidak teridentifikasi	Dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka perlu adanya definisi yang merujuk pada istilah 'keberlanjutan' kedalam visi.
Misi: 1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga. 3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan energi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat. 5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan dinamis. 6. Melestarikan situs budaya,	Kata Kunci: Pertanian, kelautan, industri, pengelolaan potensi daerah, energi, pariwisata.	Kata Kunci: Pemerintahan yang baik, pendidikan, kesehatan dan olahraga, beragama, bermasyarakat, aman, tentram, dinamis.	Kata kunci: kelestarian lingkungan hidup	Perlu adanya penyelarasan antara kepentingan ekonomi dan sosial terhadap misi pembangunan keberlanjutan. Hal ini perlu memperkuat misi yang secara langsung dapat mewakili kelestarian lingkungan hidup.



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022	Keseimbangan			Catatan Perbaikan
	Ekonomi	Sosial	Lingkungan Hidup	
kesenian local dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.				
SASARAN:				
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan				
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah				
3. Meningkatkan konektivitas antar daerah				
4. Meningkatkan ketercukupan energi listrik dan air bersih				
5. Merealisasikan perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten				
6. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat				
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.				
8. Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga				
9. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas dan kelautan				
10. Meningkatkan kinerja ekonomi				



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022	Keseimbangan			Catatan Perbaikan
	Ekonomi	Sosial	Lingkungan Hidup	
dan pendapatan masyarakat				
11. Meningkatnya industri hulu-hilir dan kemitraan usaha				
12. Meningkatnya daya saing investasi daerah				
13. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				
14. Meningkatnya pengelolaan persampahan.				
15. Meningkatnya layanan kehidupan beragama				
16. Meningkatnya kerukunan dan kesejahteraan masyarakat				
17. Meningkatnya kesempatan kerja, dan penurunan angka pengangguran				
18. Meningkatnya rasa aman dan tenteram bagi masyarakat				
19. Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya				
20. Meningkatnya kunjungan wisatawan dan destinasi wisata.				



Tabel 3. 12 Instrumen Kajian Prinsip Keadilan RPJMD

RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022	Keadilan		Catatan Perbaikan
	Antar Kelompok Masyarakat	Antar Generasi	
VISI: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas.	Kata kunci: Kerja nyata dan ikhlas (maju, taqwa, harmonis, langgeng, aman, sejahtera)		Sebagai konsep, visi tidak bisa menunjukkan secara spesifik bentuk keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Keadilan dapat dilihat dengan proporsi kebijakan yang mampu memberikan akses (peluang) yang sama besar kepada masyarakat baik secara berkelompok maupun antar generasi. Prinsip keadilan seharusnya terdefinisi dalam perumusan sasaran. Penjabaran prinsip ini dapat dinyatakan dengan mencantumkan kelompok sasaran/target yang akan dituju oleh setiap program/kegiatan. Sehingga porsi untuk setiap kelompok dan generasi dapat terbaca dengan jelas.
MISI: - Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. - Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga. - Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup. - Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat. - Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis. - Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.	Kata kunci: Pemerintahan yang baik, pendidikan, kesehatan dan olahraga, pertanian, kelautan, industri, pengelolaan potensi daerah dan sumber energi, beragama, bermasyarakat dengan baik, aman, tenteram, dinamis, pariwisata budaya.		
SASARAN: Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan			



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022	Keadilan		Catatan Perbaikan
	Antar Kelompok Masyarakat	Antar Generasi	
aparatur pemerintahan.			
2. Meningkatnya pendapatan asli daerah.			
3. Meningkatnya konektivitas antar daerah.			
4. Meningkatnya ketercukupan energi listrik dan air bersih.			
5. Merealisasikan perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.			
6. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.			
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.			
8. Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.			
9. Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan kelautan.			
10. Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat.			
11. Meningkatnya industri hulu-hilir dan kemitraan usaha.			
12. Meningkatnya daya saing investasi daerah.			
13. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.			
14. Meningkatnya pengelolaan persampahan.			
15. Meningkatnya layanan kehidupan beragama.			
16. Meningkatnya kerukunan dan kesejahteraan masyarakat.			
17. Meningkatnya kesempatan kerja, dan			



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022	Keadilan		Catatan Perbaikan
	Antar Kelompok Masyarakat	Antar Generasi	
penurunan angka pengangguran.			
18. Meningkatnya rasa aman dan tenteram bagi masyarakat.			
19. Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya.			
20. Meningkatnya kunjungan wisatawan dan destinasi wisata.			



3.8.1 Kajian Pengaruh RPJMD

Maksud tahapan pengkajian ini adalah menganalisis dampak positif dan negatif indikasi program prioritas RPJMD dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan. Analisis dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan dimasa yang akan datang sebagaimana digambarkan dalam analisis baseline. Untuk kajian pengaruh Renstra SKPD, digunakan hasil pelingkupan dari proses KLHS dalam penyusunan RPJMD.

Kajian pengaruh dilakukan melalui 2 tahap, yaitu: (a) memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan, (b) memberikan penilaian pengaruh (negatif atau positif) dan mendeskripsikan pengaruh tersebut, dan (c) menganalisis pengaruh kumulatif masing-masing isu pembangunan berkelanjutan.

a. Memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan.

Belum tentu semua program prioritas memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan identifikasi untuk memilih program-program mana saja yang dapat dikaji lebih lanjut. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan tabel dan dinilai berdasarkan ada tidaknya keterkaitan antara program prioritas dengan daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan.



Tabel 3. 13 Indikasi Program Prioritas

Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022	Isu Pembangunan Berkelanjutan						
	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	Meningkatkan penegakan hukum	Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata
Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi	0	0	0	0	0	0	0
Peningkatan evaluasi dan pelaporan yang akurat untuk predikat WTP	0	0	0	0	1	0	0
Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja ASN dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN	1	0	0	0	0	0	0
Peningkatan	1	0	0	0	0	0	0



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022	Isu Pembangunan Berkelanjutan						
	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	Meningkatkan penegakan hukum	Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata
kapasitas sumberdaya aparatur dengan manajemen ASN berbasis merit sistem							
Penerapan e- Government mewujudkan open government	0	0	1	1	0	0	0
Kemudahan akses secara IT dalam program keterbukaan informasi public	1	0	0	0	0	0	0
Menjamin kepuasan masyarakat dalam setiap layanan pemerintah	1	1	1	0	0	0	1



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022	Isu Pembangunan Berkelanjutan						
	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	Meningkatkan penegakan hukum	Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata
daerah							
Tata kelola desa dan pengawasan dalam penggunaan dana desa	1	1	1	0	1	0	0
Menyediakan Pendidikan yang berkualitas bagi putra putri daerah	1	0	1	0	0	0	1
Mempermudah dan memeratakan akses terhadap Pendidikan	1	0	1	0	0	0	0
Menjamin akses terhadap fasilitas kesehatan khususnya bagi	1	1	1	0	0	0	0



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022	Isu Pembangunan Berkelanjutan						
	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	Meningkatkan penegakan hukum	Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata
warga kurang mampu							
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	1	1	1	0	0	0	0
Meningkatkan potensi pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai ekonomi unggulan daerah	0	0	0	1	0	1	0
Mengoptimalkan produksi perikanan melalui peningkatan hasil panen dan	0	0	0	0	0	1	0



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022	Isu Pembangunan Berkelanjutan						
	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	Meningkatkan penegakan hukum	Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata
perluasan hasil pertanian							
Pengenmbangan integrated farming sistem berbasis kewilayahan	0	0	0	1	0	1	0
Pengembangan kawasan pelabuhan perikanan dan revitalisasi tambak	0	0	0	1	0	1	0
Intensifikasi bibit unggulan pertanian: padi, ikan, ternak sapi, rumput laut	0	0	0	1	0	1	0
Pengembangan produk pertanian	0	0	0	1	0	1	0



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022	Isu Pembangunan Berkelanjutan						
	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	Meningkatkan penegakan hukum	Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata
organic unggulan							
Menciptakan kemandirian pangan dengan swasembada komoditas konsumsi pangan	0	0	0	0	0	0	0
Penguatan petani dan nelayan miskin melalui kebijakan yang afirmatif terhadap pupuk, harga, dan pasar	0	0	0	0	0	0	0
Pengembangan agroindustry berbasis kerakyatan dan keterpaduan	0	0	0	0	0	0	0



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022	Isu Pembangunan Berkelanjutan						
	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	Meningkatkan penegakan hukum	Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata
antar wilayah							
Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada pengembangan koperasi dan UMKM	0	0	0	0	0	0	0
Menguatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam fasilitasi hak merk, sertifikat halal, izin usaha, bantuan modal, dan pemasaran	0	0	1	0	0	0	0
Pemberdayaan dan pengembangan kelompok usaha masyarakat	0	0	1	0	0	0	0



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022	Isu Pembangunan Berkelanjutan						
	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	Meningkatkan penegakan hukum	Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata
disetiap desa/kelurahan							
Meningkatkan kerjasama dan promosi dalam pengembangan produk koperasi dan UMKM	0	0	1	0	0	0	0
Peningkatan investasi PMDN dan PMA serta penguatan partnership sistem	0	0	0	0	0	1	0
Peningkatan potensi energi dan mineral yang berwawasan lingkungan	0	0	0	1	0	1	0
Pengembangan kawasan	0	0	0	0	0	0	0



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022	Isu Pembangunan Berkelanjutan						
	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	Meningkatkan penegakan hukum	Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata
ekonomi industry dan perdagangan							
Pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi pendukung sector unggulan dan aksesibilitas masyarakat	0	0	1	0	0	0	0
Penyebarluasan cakupan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi	0	0	1	0	0	0	0
Pembangunan infrastruktur utama ke pusat- pusat destinasi pariwisata	0	0	1	0	0	0	1



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022	Isu Pembangunan Berkelanjutan						
	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	Meningkatkan penegakan hukum	Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata
Pemabangunan kawasan terpadu dengan pasar produk- produk unggulan daerah	0	0	1	0	0	0	1
Pengendalian dan pengawasan lingkungan dalam menciptakan green economy	0	0	0	1	0	1	0
Pengendalian dan pengawasan tata ruang wilayah dalam menciptakan pembangunan yang	0	0	1	0	0	0	0



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022	Isu Pembangunan Berkelanjutan						
	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	Meningkatkan penegakan hukum	Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata
berkelanjutan							
Pemberian insentif guru- guru informal dan pemuka agama	1	0	1	1	0	0	1
Bantuan sarana dan prasarana ibadah dan perayaan hari besar	0	0	1	0	0	0	0
Bantuan sosial untuk peralatan rukun kematian	0	0	1	0	0	0	0
Meningkatkan budaya gotong royong masyarakat	0	0	1	0	0	1	0
Pembangunan karakter masyarakat	1	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan	1	1	1	1	1	1	1



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022	Isu Pembangunan Berkelanjutan						
	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	Meningkatkan penegakan hukum	Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata
masyarakat dalam pembangunan desa							
Pengadaan listrik tenaga surya	0	0	1	0	0	0	0
Tambahan insentif terhadap perangkat desa	0	0	1	0	1	0	0
Perekrutan pendamping desa	0	0	1	0	0	0	0
Pendampingan insentif terhadap pengelolaan APBDes	0	0	0	0	1	0	0
Memberikan perlindungan hukum terhadap	0	0	1	0	1	0	0



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022	Isu Pembangunan Berkelanjutan						
	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	Meningkatkan penegakan hukum	Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata
anak-anak disabilitas							
Meningkatkan keterpenuhinya hak anak-anak	0	0	1	0	1	0	0
Meningkatkan peran ibu rumah tangga yang mandiri dan berdaya saing	1	0	0	0	0	0	0
Meningkatkan peran perempuan dalam pemerintahan, politik, ekonomi, dan pembangunan	1	0	0	0	0	0	0
Meningkatkan kondusifitas masyarakat dengan	0	0	0	0	1	0	0



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022	Isu Pembangunan Berkelanjutan						
	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	Meningkatkan penegakan hukum	Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata
bersinergi dengan TNI dan Polri.							
Meningkatkan kesiapsiagaan dan penambahan insentif	0	0	0	0	1	0	0
Penambahan personal satpol PP dalam menegakkan Perda	0	0	0	0	1	0	0
Terciptanya 15.000 lapangan kerja	0	1	1	1	1	1	1
Melatih 1500 tenaga kerja tersertifikasi	1	1	0	1	1	1	1
Membina transmigran dalam	1	0	0	1	0	1	0



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022	Isu Pembangunan Berkelanjutan						
	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	Meningkatkan penegakan hukum	Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata
pemanfaatan lahan untuk potensi unggulan							
Bantuan BPJS seluruh masyarakat miskin	0	1	1	0	0	0	0
Jaminan perlindungan serta pemberian bantuan sosial masyarakat miskin	0	1	1	0	0	0	0
Membangun dan pemberantasan prostitusi	1	0	0	0	0	0	0
Pelatihan dan pembinaan PMKS	1	0	0	0	0	1	0
Pemberian bantuan modal usaha	1	0	0	0	0	1	0



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022	Isu Pembangunan Berkelanjutan						
	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	Meningkatkan penegakan hukum	Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata
Meningkatkan konduktivitas masyarakat dengan bersinergi dengan polri TNI	0	0	0	0	1	0	0
Meningkatkan kesiapsiagaan dan penambahan insentif	0	0	0	0	1	0	0
Penambahan personel satpol PP dalam menegakkan pembangunan karakter masyarakat	0	0	0	0	1	0	0
Program pengembangan ekonomi kreatif	1	0	0	0	0	1	0



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022	Isu Pembangunan Berkelanjutan						
	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	Meningkatkan penegakan hukum	Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata
Program pengembangan destinasi pariwisata	0	0	0	0	0	0	1
Program pengelolaan kekayaan budaya	0	0	0	0	0	0	1
Program pengembangan kekayaan pariwisata	0	0	0	0	0	0	1
Program pengembangan pemasaran pariwisata	1	0	0	0	0	0	1
Program pengembangan kemitraan	0	0	0	0	0	0	1

Keterangan:

- * Angka 0 – apabila tidak ada keterkaitan antara program prioritas dengan isu PB (program tidak mempunyai dampak negatif atau positif terhadap isu yang ada).



***Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022***



** Angka 1 – apabila ada keterkaitan antara program dan isu strategis (program kemungkinan dapat mempengaruhi isu, baik positif maupun negatif).



Berdasarkan penilaian tabel di atas, maka dipilih program-program yang mendapat penilaian angka 1 untuk dikaji lebih lanjut.

b. Memberikan penilaian dan mendeskripsikan pengaruh

Program-program prioritas yang terpilih melalui proses sebagaimana dimaksud diatas, diberikan nilai besaran pengaruh positif dan negatifnya (+, ++, +++, -, --, --). Diberikan deskripsi pengaruh meliputi pengaruh langsung maupun tidak langsung. Tabel 3.15 di bawah digunakan untuk memberikan penilaian dan mendeskripsikan pengaruh.



Tabel 3. 14 Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh

Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022	Isu Pembangunan Berkelanjutan						
	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk	Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	Meningkatkan penegakan hukum	Mengoptimalkan pengelolaan SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata
Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan evaluasi dan pelaporan yang akurat untuk predikat WTP	-	-	-	-	+	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja ASN dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN	+	-	-	-	-	-	-
Peningkatan	+	-	-	-	-	-	-



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



kapasitas sumberdaya aparatur dengan manajemen ASN berbasis merit sistem							
Penerapan e-Government mewujudkan open government	-	-	+	+	-	-	-
Kemudahan akses secara IT dalam program keterbukaan informasi public	+	-	-	-	-	-	-
Menjamin kepuasan masyarakat dalam setiap layanan pemerintah daerah	+	+	+	-	-	-	+
Tata kelola desa dan pengawasan dalam penggunaan dana desa	+	+	+	-	+	-	-
Menyediakan	++	-	+	-	-	-	+



Pendidikan yang berkualitas bagi putra putri daerah							
Mempermudah dan pemeratakan akses terhadap Pendidikan	++	-	+	-	-	-	-
Menjamin akses terhadap fasilitas kesehatan khususnya bagi warga kurang mampu	+	++	+	-	-	-	-
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	++	+	+	-	-	-	-
Meningkatkan potensi pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai ekonomi unggulan daerah	-	-	-	+	-	+	-



Mengoptimalkan produksi perikanan melalui peningkatan hasil panen dan perluasan hasil pertanian	-	-	-	+	-	+	-
Pengenmbangan integrated farming sistem berbasis kewilayahan	-	-	-	+	-	+	-
Pengembangan kawasan pelabuhan perikanan dan revitalisasi tambak	-	-	-	+	-	+	-
Intensifikasi bibit unggulan pertanian: padi, ikan, ternak sapi, rumput laut	-	-	-	+	-	+	-
Pengembangan produk pertanian organik unggulan	-	-	-	+	-	+	-



Menciptakan kemandirian pangan dengan swasembada komoditas konsumsi pangan	-	-	-	-	-	-	-
Penguatan petani dan nelayan miskin melalui kebijakan yang afirmatif terhadap pupuk, harga, dan pasar	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan agroindustry berbasis kerakyatan dan keterpaduan antar wilayah	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada pengembangan koperasi dan UMKM	-	-	-	-	-	-	-
Menguatkan pemberdayaan	-	-	+	-	-	-	-



koperasi dan UMKM dalam fasilitasi hak merk, sertifikat halal, izin usaha, bantuan modal, dan pemasaran							
Pemberdayaan dan pengembangan kelompok usaha masyarakat disetiap desa/kelurahan	-	-	+	-	-	-	-
Meningkatkan kerjasama dan promosi dalam pengembangan produk koperasi dan UMKM	-	-	+	-	-	-	-
Peningkatan investasi PMDN dan PMA serta penguatan partnership sistem	-	-	-	-	-	+	-
Peningkatan potensi energi dan mineral yang	-	-	-	++	-	++	-



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022**



berwawasan lingkungan							
Pengembangan kawasan ekonomi industri dan perdagangan	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi pendukung sector unggulan dan aksesibilitas masyarakat	-	-	+	-	-	-	-
Penyebarluasan cakupan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi	-	-	+	-	-	-	-
Pembangunan infrastruktur utama ke pusat-pusat destinasi pariwisata	-	-	+	-	-	-	+
Pemabangunan kawasan terpadu dengan pasar produk-	-	-	+	-	-	-	++



produk unggulan daerah							
Pengendalian dan pengawasan lingkungan dalam menciptakan green economy	-	-	-	+	-	+	-
Pengendalian dan pengawasan tata ruang wilayah dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan	-	-	+	-	-	-	-
Pemberian insentif guru-guru informal dan pemuka agama	++	-	-	-	-	-	-
Bantuan sarana dan prasarana ibadah dan perayaan hari besar	+	-	+	-	-	-	-
Bantuan sosial	-	-	+	-	-	-	-



untuk peralatan rukun kematian							
Meningkatkan budaya gotong royong masyarakat	+	-	-	-	-	-	-
Pembangunan karakter masyarakat	+	-	-	-	-	-	-
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa	++	+	+	-	-	-	-
Pengadaan listrik tenaga surya	-	-	++	-	-	-	-
Tambahan insentif terhadap perangkat desa	-	-	-	-	+	-	-
Perekrutan pendamping desa	-	-	-	-	+	-	-
Pendampingan insentif terhadap pengelolaan APBDes	-	-	-	-	+	-	-
Memberikan	+	-	-	-	++	-	-



perlindungan hukum terhadap anak-anak disabilitas							
Meningkatkan keterpenuhinya hak anak-anak	+	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan peran ibu rumah tangga yang mandiri dan berdaya saing	++	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan peran perempuan dalam pemerintahan, politik, ekonomi, dan pembangunan	++	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan kondusifitas masyarakat dengan bersinergi dengan TNI dan Polri.	-	-	-	-	++	-	-
Meningkatkan kesiapsiagaan dan	-	-	-	-	+	-	-



penambahan insentif							
Penambahan personal satpol PP dalam menegakkan Perda	-	-	-	-	+	-	-
Terciptanya 15.000 lapangan kerja	+	-	+	-	-	-	-
Melatih 1500 tenaga kerja tersertifikasi	+	-	+	-	-	-	-
Membina transmigran dalam pemanfaatan lahan untuk potensi unggulan	+	-	+	-	-	-	-
Bantuan BPJS seluruh masyarakat miskin	-	-	+	-	-	-	-
Jaminan perlindungan serta pemberian bantuan sosial masyarakat miskin	-	-	+	-	-	-	-
Membangun dan	+	-	-	-	+	-	-



pemberantasan prostitusi							
Pelatihan dan pembinaan PMKS	+	-	-	-	-	-	-
Pemberian bantuan modal usaha	-	-	-	-	-	+	-
Meningkatkan kondusifitas masyarakat dengan bersinergi dengan polri TNI	-	-	-	-	+	-	-
Meningkatkan kesiapsiagaan dan penambahan insentif	-	-	-	-	+	-	-
Penambahan personel satpol PP dalam menegakkan pembangunan karakter masyarakat	+	-	-	-	+	-	-
Program pengembangan ekonomi kreatif.	+	-	-	-	-	+	-



Program pengembangan destinasi pariwisata	-	-	+	-	-	+	+
Program pengelolaan kekayaan budaya	-	-	+	-	-	+	+
Program pengembangan kekayaan pariwisata	-	-	+	-	-	+	+
Program pengembangan pemasaran pariwisata	-	-	+	-	-	+	+
Program pengembangan kemitraan	-	-	+	-	-	+	+
Program pembangunan bandara internasional dan pelabuhan laut	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

++ terdapat pengaruh positif yang sangat tinggi (misalnya, implementasi program prioritas dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu)



***Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022***



- + terdapat kemungkinan pengaruh positif yang tinggi (misalnya, implementasi program prioritas kemungkinan dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu)
- terdapat pengaruh negatif yang sangat tinggi (misalnya, implementasi program prioritas tidak dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu, bahkan akan menghambat pencapaian target dimaksud dan menimbulkan pengaruh negatif yang baru)
- terdapat kemungkinan pengaruh negatif yang tinggi (misalnya, implementasi program prioritas kemungkinan tidak dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu, bahkan akan menghambat pencapaian target dimaksud dan menimbulkan pengaruh negatif yang baru)

Bagi yang nilainya '---' '--' dan '-', Pokja PL menganalisis dampak kumulatif dari setiap isu sebagai bahan perumusan mitigasi dan alternatif



3.8.2 Kajian Dampak Isu terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Pada kajian ini, dilakukan analisis pengaruh kumulatif dampak dari isu pembangunan berkelanjutan, serta rekomendasi yang dapat diberikan dari program yang sudah ada sebagai langkah mitigasi/adaptasi dari dampak program.

a. Pengaruh Kumulatif Dampak Isu

Pada tahap kajian ini, dilakukan analisis pengaruh kumulatif dampak masing-masing isu pembangunan berkelanjutan. Pengaruh kumulatif dampak dari isu yang telah terpilih pada langkah sebelumnya dianalisis dengan menggunakan Tabel 3.16.



Tabel 3. 15 Analisis Pengaruh Kumulatif Dampak Isu Peningkatan Kualitas Pendidikan Untuk Mendorong Perbaikan SDM terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Analisis Pengaruh Kumulatif		
Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM		
- Kualitas Pendidikan yang kurang membuat sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi kurang berkualitas. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi banyak sector lainnya karena tidak didukung oleh sumber daya yang mumpuni. - Rendahnya kualitas SDM juga mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja yang dapat diserap oleh masyarakat Kotawaringin Barat. - Rekomendasi yang diajukan adalah adanya kebijakan yang dapat mempermudah akses fasilitas pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat Kotawaringin Barat tidak menemui kesulitan ketika ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik. - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas dalam bidang pendidikan. - Adanya kebijakan yang dapat memberikan pendidikan murah bagi masyarakat mulai dari usia dini.		
Pengaruh Program Prioritas dalam RPJMD terhadap perkembangan isu ke depan		
Program prioritas dalam RPJMD (diberikan keterangan pada misi berapa dan poin brp)	Perkiraan Pengaruh	Rekomendasi penyempurnaan program
Misi 1: - Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan manajemen ASN berbasis merit sistem - Menjamin kepuasan masyarakat dalam setiap layanan pemerintah daerah - Pemberdayaan dan pengembangan kelompok usaha masyarakat disetiap	Perkiraan pengaruh yang terjadi bila program prioritas tersebut dijalankan adalah kurang siapnya SDM di Kotawaringin Barat dalam menghadapi ataupun menjalani rangkaian kegiatan dari program-program prioritas.	- Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, sarana pendidikan, tenaga pendidik. - Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi tepat guna.



desa/kelurahan

Perkiraan Pengaruh Kumulatif dari RPJMD (diuraikan kedalam 3 poin yaitu keseimbangan, keterkaitan, keadilan)

- Situasi terburuk apabila program prioritas dijalankan adalah kurang tercapainya target dari program prioritas tersebut, baik target waktu maupun target hasil yang diharapkan.
- Terhambatnya pelaksanaan program prioritas.

Tabel 3. 16 Analisis Pengaruh Kumulatif Dampak Isu Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Analisis Pengaruh Kumulatif		
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan		
• Hal buruk yang akan terjadi apabila tanpa adanya RPJMD adalah angka kesehatan pada masyarakat Kotawaringin Barat berada pada titik yang rendah. Menyebarnya penyakit-penyakit mematikan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. • Tidak ada pihak yang diuntungkan apabila kesadaran masyarakat akan kesehatan rendah, selain masyarakat itu sendiri, pemerintah juga mengalami banyak kerugian. • Rekomendasi yang dapat diajukan adalah adanya penyuluhan dan pengenalan terhadap penyakit-penyakit sehingga dapat mengedukasi dan memberitahukan pada masyarakat tentang pentingnya kesehatan.		
Pengaruh Program Prioritas dalam RPJMD terhadap perkembangan isu ke depan		
Program prioritas dalam RPJMD	Perkiraan Pengaruh	Rekomendasi penyempurnaan program
Misi 5: • Bantuan BPJS seluruh masyarakat miskin	• Perkiraan pengaruh yang terjadi bila program prioritas tersebut dijalankan adalah terhambatnya program prioritas pembangunan karakter masyarakat karena kebiasaan masyarakat yang masih kurang sadar akan pentingnya	• Peningkatan mutu dan kualitas sarana kesehatan. • Pendampingan oleh tenaga-tenaga profesional dalam pengenalan dan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan bagi masyarakat.



kesehatan.

- Program bantuan BPJS akan menelan lebih banyak anggaran apabila tidak disertai dengan penyuluhan tentang kesadaran terhadap kesehatan.

Perkiraan Pengaruh Kumulatif dari RPJMD

- Situasi terburuk apabila program prioritas dijalankan adalah kurang tercapainya target dari program prioritas tersebut, baik target waktu maupun target hasil yang diharapkan.
- Terhambatnya pelaksanaan program prioritas.

Tabel 3. 17 Analisis Pengaruh Kumulatif Dampak Isu Peningkatan Peningkatan Sarana Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Analisis Pengaruh Kumulatif		
Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk		
• Hal buruk yang akan terjadi apabila tanpa adanya RPJMD adalah tujuan dari pengadaan dan pembangunan sarana-prasarana tidak mencapai target dan tujuan pembangunan. • Masyarakat Kotawaringin Barat adalah pihak yang dirugikan apabila pembangunan sarana prasarana tidak merata dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat Kotawaringin Barat.		
Pengaruh Program Prioritas dalam RPJMD terhadap perkembangan isu ke depan		
Program prioritas dalam RPJMD	Perkiraan Pengaruh	Rekomendasi penyempurnaan program
• Menjamin akses terhadap fasilitas kesehatan khususnya bagi warga kurang mampu • Meningkatkan kualitas pelayanan	• Perkiraan pengaruh apabila program-program prioritas tersebut tidak dijalankan adalah kurang tercapainya tujuan dari program prioritas tersebut	• Pengawasan dalam pembangunan sarana-prasarana. • Pendampingan terhadap masyarakat untuk merumuskan prioritas kebutuhan sarana-



kesehatan bagi masyarakat • Meningkatkan pemerataan aksesibilitas daerah terkait infrastruktur dasar dan ekonomi	karena sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat. • Aksesibilitas daerah yang memusat di perkotaan Pangkalan Bun mengakibatkan penumpukan layanan transportasi di perkotaan dan pembangunan tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.	prasarana masyarakat. • Pembangunan simpul transportasi laut dan udara diluar wilayah perkotaan (diluar Pangkalan Bun).
Perkiraan Pengaruh Kumulatif dari RPJMD • Situasi terburuk apabila program prioritas dijalankan adalah kurang tercapainya target dari program prioritas tersebut, baik target waktu maupun target hasil yang diharapkan. • Terhambatnya pelaksanaan program prioritas.		

Tabel 3. 18 Analisis Pengaruh Kumulatif Dampak Isu Menjaga Lingkungan dan Hutan Agar Kerusakan Menurun Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Analisis Pengaruh Kumulatif	
Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun	
• Hal buruk yang akan terjadi apabila tanpa adanya RPJM adalah menurunnya kualitas lingkungan dan semakin banyak lahan kritis akibat pembukaan lahan hutan. • Tidak ada pihak yang diuntungkan dari kerusakan lingkungan dan kerusakan hutan, baik pemerintah, masyarakat, kekayaan hayati flora dan fauna serta keberlangsungan kelestarian lingkungan akan menerima dampak langsung dari kerusakan lingkungan dan hutan. • Rekomendasi yang diajukan adalah: • Pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur alih fungsi lahan sesuai Undang-Undang 41 tahun 2009;	



- Melakukan penyesuaian antara RTRW dengan moratorium kehutanan;
- Pelaksanaan dan pengawasan regulasi secara tegas untuk aktivitas penjarahan dan pembakaran hutan
- Pembentukan kelompok masyarakat siaga kebakaran hutan secara mandiri yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat di bawah pembinaan Pemerintah
- Program insentif bagi petani yang terlibat secara aktif dalam penyelamatan hutan

Pengaruh Program Prioritas dalam RPJMD terhadap perkembangan isu ke depan

Program prioritas dalam RPJMD	Perkiraan Pengaruh	Rekomendasi penyempurnaan program
• Meningkatkan potensi pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai ekonomi unggulan daerah • Membina transmigran dalam pemanfaatan lahan untuk potensi unggulan Misi 6: • Program pengembangan destinasi pariwisata • Program pengembangan kekayaan pariwisata • Program pengembangan pemasaran pariwisata	• Perkiraan pengaruh apabila program-program prioritas tersebut dijalankan adalah semakin meningkatnya angka alih fungsi lahan hutan, meningkatnya jumlah lahan kritis, kerusakan lingkungan yang semakin tidak terkendali, sehingga akan menimbulkan adanya bencana alam seperti longsor, banjir, erosi, dan kerusakan lingkungan lainnya.	• Pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur alih fungsi lahan sesuai Undang-Undang 41 tahun 2009; • Penyesuaian antara RTRW dengan moratorium kehutanan • Pelaksanaan dan pengawasan regulasi secara tegas untuk aktivitas penjarahan dan pembakaran hutan • Pembentukan kelompok masyarakat siaga kebakaran hutan secara mandiri yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat di bawah pembinaan Pemerintah

Perkiraan Pengaruh Kumulatif dari RPJMD

- Situasi terburuk apabila program prioritas RPJMD diimplementasikan adalah pembangunan yang dilakukan tidak mementingkan kelestarian dan keselamatan lingkungan sehingga akan terjadi kerusakan hutan, penurunan luasan hutan, dampak polusi (pencemaran udara) dari kebakaran sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan karena pengendalian pemanfaatan hutan belum



terkendali.

Tabel 3. 19 Analisis Pengaruh Kumulatif Dampak Isu Meningkatkan Penegakan Hukum Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Analisis Pengaruh Kumulatif		
Meningkatkan penegakan hukum		
- Hal buruk yang akan terjadi apabila tanpa adanya RPJMD adalah semakin banyaknya industri yang tidak memiliki teknologi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, pembangunan yang tidak sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, investor-investor yang berinvestasi dapat merugikan lingkungan dan pemerintah, serta pelanggaran-pelanggaran hukum baik besar maupun kecil. - Pihak yang akan diuntungkan apabila meningkatkan penegakan hukum adalah semua pihak di Kabupaten Kotawaringin Barat. - Rekomendasi yang diajukan adalah: - Pengoptimalan keamanan dengan memanfaatkan penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat. - Meningkatkan fasilitas dan komponen pendukung penegak hukum - Meningkatkan penyuluhan kepada aparat hukum dan masyarakat untuk menjaga keamanan, kejujuran dan keadilan. - Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka turut serta menjaga keamanan, kejujuran dan keadilan.		
Pengaruh Program Prioritas dalam RPJMD terhadap perkembangan isu ke depan		
Program prioritas dalam RPJMD	Perkiraan Pengaruh	Rekomendasi penyempurnaan program
- Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi - Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja ASN dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN - Tata kelola desa dan pengawasan dalam penggunaan dana desa	- Perkiraan pengaruh program terhadap isu secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat maupun pemerintah Kotawaringin Barat. - Faktor penyebab munculnya dampak positif adalah:	- Pelaku industri/investor yang akan membangun usahanya harus memiliki IPAL dan pembangunannya harus sesuai tata ruang dan kaidah pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. - Peningkatan fasilitas dan komponen pendukung penegak hukum. - Meningkatkan penyuluhan kepada aparat



- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kondusifitas masyarakat dengan bersinergi dengan polri TNI • Penambahan personel satpol PP dalam menegakkan pembangunan karakter masyarakat • Meningkatkan kesiapsiagaan dan penambahan insentif | <ul style="list-style-type: none"> - penegakan hukum yang ketat bagi pelaku industri - menurunnya jumlah KKN dan pelanggaran hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka turut serta menjaga keamanan, kejujuran dan keadilan. |
|---|--|---|

Perkiraan Pengaruh Kumulatif dari RPJMD

- Situasi terbaik apabila program diimplementasikan dengan mempertimbangkan seluruh pengaruh program adalah pengoptimalan hukum yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga terjadi transparansi, keamanan dan kenyamanan, sektor-sektor lain yang ikut berkembang.
- Kelompok masyarakat yang akan terkena pengaruh adalah para pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Pihak yang bertanggung jawab adalah Dinas Sosial, Lemabaga Pemasarakatan, TNI dan Polri.

Tabel 3. 20 Analisis Pengaruh Kumulatif Dampak Isu Mengoptimalkan Pengelolaan SDA Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Analisis Pengaruh Kumulatif
Mengoptimalkan pengelolaan SDA
• Hal buruk yang akan terjadi apabila tanpa adanya RPJMD adalah sumber daya alam yang tidak dimanfaatkan akan banyak terbuang, masyarakat tidak memiliki pendapatan lebih yang seharusnya dapat ditingkatkan melalui pengelolaan SDA, pencapaian PDRB tidak optimal, masyarakat kurang terampil dalam memanfaatkan SDA. • Pihak yang akan diuntungkan apabila meningkatkan penegakan hukum adalah semua pihak di Kabupaten Kotawaringin Barat. • Rekomendasi yang diajukan adalah: • Pengoptimalan pemanfaatan SDA oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.



- Meningkatkan fasilitas dan komponen pendukung pengelolaan SDA.
- Mengadakan pelatihan pengelolaan sumber daya alam kepada masyarakat secara rutin.

Pengaruh Program Prioritas dalam RPJMD terhadap perkembangan isu ke depan

Program prioritas dalam RPJMD	Perkiraan Pengaruh	Rekomendasi penyempurnaan program
• Meningkatkan potensi pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai ekonomi unggulan daerah • Mengoptimalkan produksi perikanan melalui peningkatan hasil panen dan perluasan hasil pertanian • Pengembangan integrated farming sistem berbasis kewilayahan • Pengebangan kawasan pelabuhan perikanan dan revitalisasi tambak • Intensifikasi bibit unggulan pertanian: padi, ikan, ternak sapi, rumput laut • Pengembangan produk pertanian organik unggulan • Menciptakan kemandirian pangan dengan swasembada komoditas konsumsi pangan • Penguatan petani dan nelayan miskin melalui kebijakan yang afirmatif terhadap pupuk, harga, dan pasar • Pengembangan agroindustry berbasis kerakyatan dan keterpaduan antar wilayah	• Perkiraan pengaruh program terhadap isu secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan ekonomi dan ketrampilan masyarakat maupun PBRB dan kemandirian pangan Kotawaringin Barat.	• Membangun kesadaran masyarakat akan tingginya sumber daya alam Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat dimanfaatkan optimal untuk meningkatkan taraf hidup. • Penetapan produk unggulan yang akan mempromosikan Kotawaringin Barat secara nasional. • Meningkatkan hasil olahan SDA agar bernilai jual tinggi. • Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pemerintah dalam mengelola SDA.



-
- Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada pengembangan koperasi dan UMKM
 - Memperkuat pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam fasilitasi hak merk, sertifikat halal, izin usaha bantuan modal, dan pemasaran
 - Pemberdayaan dan pengembangan kelompok usaha masyarakat di setiap desa/kelurahan
 - Meningkatkan kerjasama dan promosi dalam pengembangan produk koperasi dan UMKM
 - Meningkatkan investasi PMDN dan PMA serta penguatan partnership sistem
 - Meningkatkan potensi energi dan mineral yang berwawasan lingkungan
 - Pengembangan kawasan ekonomi industri dan perdagangan
 - Pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi pendukung sector unggulan dan aksesibilitas masyarakat
 - Pembangunan kawasan terpadu dengan pasar produk-produk unggulan daerah
 - Pengendalian dan pengawasan lingkungan dalam menciptakan green economy.
-



Perkiraan Pengaruh Kumulatif dari RPJMD

- Situasi terbaik apabila program diimplementasikan dengan mempertimbangkan seluruh pengaruh program adalah pengoptimalan hukum yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga terjadi transparansi, keamanan dan kenyamanan, sektor-sektor lain yang ikut berkembang.
- Kelompok masyarakat yang akan terkena pengaruh adalah para pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Pihak yang bertanggung jawab adalah Dinas Sosial, Lembaga Pemasyarakatan, TNI dan Polri.

Tabel 3. 21 Analisis Pengaruh Kumulatif Dampak Isu Mengoptimalkan Pengelolaan SDA Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Analisis Pengaruh Kumulatif		
Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata		
• Hal buruk yang akan terjadi apabila tanpa adanya RPJMD adalah belum optimalnya pengembangan potensi wisata daerah disebabkan karena terbatasnya infrastruktur, promosi yang masih terbatas serta kelembagaan pengelola objek yang umumnya belum terbentuk serta belum adanya kebijakan dari pemerintah mengenai pengembangan pariwisata (RIPPDA) menyebabkan investor takut untuk menanamkan modalnya. • Pihak yang akan diuntungkan apabila pengembangan potensi wisata daerah dilakukan secara optimal adalah masyarakat dan pemerintah juga akan diuntungkan karena akan menambah investasi daerah karena investor akan menanamkan modalnya. • Rekomendasi yang diajukan adalah: • Pengoptimalan potensi daya tarik wisata • Meningkatkan daya saing objek dan daya tarik wisata • Meningkatkan fasilitas dan komponen pendukung pengembangan kegiatan pariwisata • Meningkatkan promosi dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan kerjasama-kerjasama strategis dengan operator wisata di daerah lain • Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan		
Pengaruh Program Prioritas dalam RPJMD terhadap perkembangan isu ke depan		
Program prioritas dalam RPJMD	Perkiraan Pengaruh	Rekomendasi penyempurnaan program



-
- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Program pengembangan ekonomi kreatif.• Program pengembangan destinasi pariwisata.• Program pengelolaan kekayaan budaya.• Program pengembangan kekayaan pariwisata.• Program pengembangan pemasaran pariwisata.• Program pengembangan kemitraan | <ul style="list-style-type: none">• Perkiraan pengaruh program terhadap isu secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan pengelolaan potensi wisata yang dapat menjadi daya tarik wisatawan baik asing maupun domestik, dan akan menjadi pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah Kotawaringin Barat.• Faktor penyebab munculnya dampak positif adalah:<ul style="list-style-type: none">- pengembangan potensi wisata- munculnya daya tarik bagi wisatawan. | <ul style="list-style-type: none">• Pengoptimalan potensi daya tarik wisata Kabupaten Kotawaringin Barat melalui penyusunan Masterplan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat• Peningkatan daya saing objek dan daya tarik wisata Kabupaten Kotawaringin Barat• Peningkatan fasilitas dan komponen pendukung pengembangan kegiatan pariwisata• Peningkatan promosi dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan kerjasama-kerjasama strategis dengan operator wisata di daerah lain• Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan |
|---|---|--|

Perkiraan Pengaruh Kumulatif dari RPJMD

- Situasi terbaik apabila program diimplementasikan dengan mempertimbangkan seluruh pengaruh program adalah pengoptimalan potensi wisata yang ada di Kabupaten, peningkatan penghasilan ekonomi masyarakat, sektor-sektor lain diluar pariwisata yang ikut berkembang, mempercepat pembangunan, dan pengembangan ekonomi lokal
 - Kelompok masyarakat yang akan terkena pengaruh adalah para pelaku wisata, masyarakat disekitar lokasi wisata, wisatawan dari luar, dan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - Pihak yang bertanggung jawab adalah Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
-



3.8.3 Instrumen Perumusan Rekomendasi terhadap Misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022

Pokja PL dan Tim Perumus Renstra SKPD menyusun rumusan rekomendasi untuk dampak yang ditimbulkan dari misi yang telah dirumuskan terhadap isu pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 berdasarkan rumusan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya untuk penajaman rumusan rancangan awal RPJMD.



Tabel 3. 22 Instrumen Perumusan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD

No.	Misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022	Program RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 (Dampak Positif)	Rekomendasi
1.	Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.	• Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah • Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan • Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah • Program Pembinaan dan pengembangan organisasi dan kepegawaian • Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH • Program litren pemb. Daerah • Program Pengendalian dan Evaluasi Pemb. Daerah • Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup • Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi • Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan • Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur • Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan • Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawas an • Program Pengembangan Data/ Informasi Bidang Pengadaan • Program pengembangan komunikasi informasi dan media	1. Diperlukan sinkronisasi program pembangunan antar SKPD agar tercipta pembangunan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. 2. Memberikan apresiasi/penghargaan kepada SKPD dan pegawai pemerintah daerah yang berprestasi dalam membangun Kabupaten Kotawaringin Barat. 3. Memberikan pelatihan kepada pegawai pemerintah daerah agar memiliki ketrampilan yang cakap dalam mengelola pekerjaan. 4. Setiap pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat harus memiliki ijin resmi dari pemerintah daerah agar tidak merusak lingkungan. 5. Menambahkan absensi sidik jari dan CCTV untuk memantau kinerja aparaturngawas an pemerintah daerah. 6. Setiap SKPD wajib memiliki website resmi untuk menampilkan profil SKPD, struktur organisasi, data, kegiatan, informasi, dan lain sebagainya. 7. Memeratakan jaringan listrik, telepon, radio dan internet di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.



	massa	
	• Program peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi • Program implementasi dan pengembangan egovernment • Program pengembangan data/informasi/statistik daerah • Program pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika • Program Penataan Administrasi Kependudukan • Program Pelayanan Pencatatan Sipil • Program Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan • Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan • Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah • Prog. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa • Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa • Program Pembinaan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.	• Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan • Program manajemen pelayanan pendidikan • Program pendidikan anak usia dini (PAUD) • Program pendidikan Nonformal • Program Pendidikan Sekolah Dasar • Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan • Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Pengajar SD, SMP, dan SMA minimal harus memiliki ijazah S1. 2. Pemberian akses internet untuk meningkatkan pengetahuan para siswa pada setiap sekolah. 3. perpustakaan dan perpustakaan



	• Program Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan • Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan • Program Upaya kesehatan Masyarakat • Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit • Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan • Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat • Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan • Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga • Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga • Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri, serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energy melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan.	• Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri • Program Pengembangan IKM • Program perlindungan HKI dan standarisasi Industri • Program Optimalisasi Perdagangan Dalam Negeri • Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan • Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor • Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan • Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar • Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan • Program Peningkatan Produksi Hortikultura • Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan • Program Peningkatan Produksi Perkebunan • Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak • Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan • Program Peningkatan Agribisnis Peternakan • Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Mengadakan pelatihan ketrampilan/ kerajinan tangan kepada ibu-ibu rumah tangga agar prodduk yang dihasilkan dapat bersaing secara nasional. 2. Pemerintah menyediakan sentra kawasan industri tangan untuk memasarkan hasil kreatifitas masyarakat. 3. Pengelolaan dan pengolahan hasil pertanian sehingga dapat bersaing secara nasional. 4. Menetapkan komoditas pertanian khas Kabupaten Kotawaringin Barat. 5. Peningkatan kualitas air sungai untuk budidaya keramba. 6. Meningkatkan jumlah dokter hewan untuk melayani peternak di Kabupaten Kotawaringin Barat. 7. Memiliki batas minimal dan target hasil pertanian yang harus dihasilkan Kabupaten



-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Program Pengembangan Perikanan• Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan• Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan• Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan• Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan• Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan• Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi• Program Pengembangan Usaha Koperasi• Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro• Program Penukutan Wirausaha Baru• Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi• Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi• Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal• Program Ekstensifikasi Pajak Daerah• Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan Pelayanan Keluhan Masyarakat• Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah• Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah• Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan• Program pembangunan infrastruktur perdesaan• Program Pembangunan Jalan dan Jembatan• Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan | <p>Kotawaringin Barat per tahun.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Pengolahan hasil pertanian yang khas Kabupaten Kotawaringin Barat.9. Pembangunan pelabuhan untuk meningkatkan pendistribusian hasil pertanian, perikanan, kelautan, hutan, dan lain sebagainya.10. Pembangunan bandara internasional untuk mengakomodir semakin meningkatnya jumlah kunjungan Kabupaten Kotawaringin Barat.11. Pemasangan alat pendeteksi asap pada beberapa titik untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan.12. Fasilitas pengangkutan sampah pada setiap rumah tangga. |
|--|--|
-



-
- Program Pembangunan dan Rehabilitasi /pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ
 - Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - Program Pembangunan dan rehabilitasi /pemeliharaan Prasarana dan fasilitas ASDP
 - Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Areal Pemakaman
 - Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong
 - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
 - Program pengendalian banjir
 - Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
 - Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang
 - Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
 - Program Peningkatan Pengendalian Polusi
 - Program Pengendalian kebakaran hutan
 - Program pengawasan ketaatan pemegang perijinan
-



	lingkungan hidup	
	• Program peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup • Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) • Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan • Program Pencegahan dini dan kesiapsiagaan • Program Tanggap Darurat	
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat	• Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan • Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan • Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama • Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan • Program Pembinaan Kemasyarakatan • Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan • Program peningkatan perlindungan Hak perempuan • Program Pembinaan Keluarga Berencana • Program peningkatan kualitas Hidup perempuan • Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan • Program pengembangan Kabupaten Layak Anak • Program Peningkatan Perlindungan Anak • Program Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak	1. Pengenalan dan pendalaman tentang kearifan lokal sejak usia dini sebagai identitas diri dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. 2. Program-program yang dicanangkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat sudah cukup mengakomodir, namun perlu adanya sistem control yang dapat menjamin suksesnya program-program tersebut, terutama dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan hak wanita dan anak-anak.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis	• Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial • Program perlindungan dan jaminan sosial • Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	1. Program-program yang dicanangkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan dinamis sudah cukup bagik, namun perlu adanya monitoring dan perhatian khusus pada beberapa program



	• Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial • Program pembinaan anak terlantar • Program Pemberdayaan masyarakat miskin dan Desa Tertinggal • Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) • Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja • Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan • Program peningkatan kesempatan kerja • Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM dan Usaha Ekonomi Masyarakat • Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran • Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah • Program peningkatan kemandirian dan kenyamanan lingkungan • Program Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak criminal	sehingga hasil yang dicapai dapat lebih optimal, seperti pada program pemberdayaan komunitas adat terpencil dan pemberdayaan masyarakat miskin dan daerah terpencil.
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.	• Program Pengembangan Destinasi Pariwisata • Program Pengembangan Nilai Budaya • Program Pengembangan Ekonomi kreatif • Program pengembangan pemasaran pariwisata • Program pengembangan kemitraan	1. Peningkatan kajian tentang pariwisata terutama kearifan lokal dan situs budaya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga dapat dikembangkan sebagai ciri khas pariwisata daerah. 2. Melakukan studi banding dan sinkronisasi



pariwisata dengan daerah sekitar.



***Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2022***





BAB IV PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS KE DALAM RANCANGAN RPJMD

4.1 KONSEP INTEGRASI

Penyusunan dokumen KLHS merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip keberlanjutan, hal ini disesuaikan dengan rumusan Permendagri 67/2012 tentang pedoman penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negative terhadap lingkungan hidup.

KLHS disusun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan dari berbagai kepentingan. Pendekatan yang digunakan yaitu penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau mengkritisi kebijakan suatu perencanaan saja, namun untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan. Terdapat tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*), dan keadilan (*justice*). Berikut penjelasan tentang tiga nilai dasar yang terkandung dalam KLHS

1. Keterkaitan (*interdependency*):

Nilai ini mengandung makna dihasilkannya KLHS yang bersifat holistic berkat adanya keterkaitan analisis antar komponen fisik-kimia, biologi, dan sosial ekonomi, dan juga mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, wilayah, dan global-lokal

2. Keseimbangan (*equilibrium*):



Nilai ini ditujukan agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai keseimbangan antar kepentingan sosio-ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan kepentingan lain yang terkait.

3. Keadilan (*justice*):

Nilai ini ditujukan agar penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan masyarakat tertentu karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan.

4.2 PRAKTEK INTEGRASI

4.2.1 Tiga Komponen Utama KLHS

Terdapat tiga komponen utama dalam KLHS yang dipertimbangkan dalam penilaian dokumen RPJMD (rancangan). Penilaian ini dilakukan untuk melihat keterkaitan antara RPJMD dan kebijakan pembangunan lain secara holistik. Penilaian prinsip keterkaitan dilakukan dengan membandingkan antara rumusan visi-misi dan program RPJMD secara horizontal dan vertikal sehingga dapat diketahui sinkronisasi program terhadap kebijakan lain pada taraf pemerintahan antar daerah, dan kebijakan sektoral lain seperti pada RTRW, dan *output* dari penilaian kriteria keterkaitan ini yaitu secara umum visi dan misi RPJMD telah sesuai dengan prinsip keterkaitan baik antar waktu, antar sektor dan antar pemangku kepentingan, namun terdapat catatan perbaikan pada poin misi RPJMD karena pada draft visi-misi RPJMD beberapa kata kunci dalam visi misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 belum menunjukkan kesinambungan dengan rumusan visi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat 2015-2034. Selain itu, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 telah menjadi terjemahan dari konsep pembangunan nasional jangka menengah sekaligus juga konsep pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah. Rumusan visi misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 telah menjabarkan visi-misi nasional dan provinsi kedalam rumusan yang berorientasi spesifik pada kondisi di Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini hingga lima tahun mendatang.



Sedangkan untuk kajian persandingan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 dengan kabupaten sekitar yaitu jika RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018 maka misi yang belum terdapat pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 adalah mengenai peningkatan infrastruktur dan membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa. Jika RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Sukamara 2013-2018 maka misi yang belum terdapat pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 adalah mengenai peningkatan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan gratis, transmigrasi, dan pemberdayaan pemuda. Sedangkan kajian keterkaitan RPJMD antar waktu, antar sektor dan antar pemangku kepentingan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 terumus sudah mendefinisikan keterkaitan sektoral dan pemangku kepentingan dengan jelas.

Pada prinsip keseimbangan dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam satu daerah kajian. Keseimbangan bersifat proporsional sesuai dengan karakteristik pada wilayah masing-masing dan termasuk wilayah sekitarnya secara fungsional. Berdasarkan analisis pada prinsip keseimbangan RPJMD maka terdapat catatan perbaikan mengenai pembangunan berkelanjutan pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022.

Berdasarkan prinsip keadilan yang dilakukan untuk mencapai keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Pengkajian prinsip keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi, visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 tidak bisa menunjukkan secara spesifik bentuk keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Keadilan dapat dilihat dengan proporsi kebijakan yang mampu memberikan akses (peluang) yang sama besar kepada masyarakat baik secara berkelompok maupun antar generasi. Prinsip keadilan seharusnya terdefinisi dalam perumusan sasaran. Penjabaran prinsip ini dapat dinyatakan dengan mencantumkan kelompok sasaran/target yang akan dituju oleh setiap program/kegiatan. Sehingga porsi untuk setiap kelompok dan generasi dapat terbaca dengan jelas. Secara umum visi yang ada belum menggambarkan keterkaitan sektoral dengan pemangku kepentingan sehingga belum terlihat



adanya prinsip keadilan, terutama bagi masyarakat yang terdampak dengan adanya suatu program perencanaan. Selain itu catatan perbaikan untuk kajian prinsip keadilan RPJMD yaitu perlunya dilakukan perincian target dan sasaran yang jelas, dengan dimensi (waktu, besaran, dana) yang dimasukkan dalam program perumusan RPJMD, karena akan lebih menjamin ketepatan rumusan. Sehingga dengan hal itu diharapkan akan memberikan kemudahan bagi pengusunan instrument perencanaan selanjutnya, sehingga tujuan utama untuk pemerataan, kesamaan akses, dan kesempatan bagi setiap anggota masyarakat untuk merasakan dampak dari program tersebut dapat terpenuhi.

4.2.2 Kajian terhadap Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 (rancangan) disandingkan dengan KLHS (rancangan) menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) isu pembangunan berkelanjutan yang digunakan sebagai dasar penilaian, 7 (tujuh) isu tersebut antara lain:

1. Masih rendahnya kualitas pendidikan menyebabkan rendahnya SDM.
2. Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan rata-rata masih rendah.
3. Sarana prasarana permukiman belum memenuhi kebutuhan penduduk.
4. Kerusakan lingkungan dan hutan meningkat.
5. Penegakan hukum masih lemah.
6. Pengelolaan SDA belum optimal.
7. Pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata belum optimal.

Kajian dan analisis yang dilakukan untuk membandingkan masing-masing isu dalam KLHS tersebut diatas dengan program-program yang terdapat dalam RPJMD menghasilkan gambaran pengaruh atau dampak program yang ada pada RPJMD terhadap isu-isu KLHS. Dampak yang dihasilkan dari masing masing program dalam RPJMD dapat dilihat pada pembahasan mengenai Analisis Kumulatif pada dokumen KLHS. Berdasarkan kajian pengaruh program terhadap isu akan didapatkan alternatif bentuk mitigasi dan adaptasi yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan program agar tidak berpengaruh negatif



terhadap lingkungan dan isu pembangunan berkelanjutan yang termuat dalam KLHS.

4.2.3 Integrasi Rekomendasi

Pada pembahasan berikutnya yaitu mengenai rincian rekomendasi yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas rumusan perencanaan pembangunan dalam RPJMD secara lebih spesifik yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pada isu-isu pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi yang diberikan untuk dampak program terhadap isu yaitu sebagai berikut:

A. Rekomendasi untuk Dampak Program terhadap Isu

1. Mengintegrasikan program pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dalam sistem pendidikan dengan menjaga kelestarian lingkungan dan penerapan teknologi informasi dan computer di setiap tingkatan dengan aksi nyata. Pemangku kepentingan yang terkait, antara lain:
 - Dinas Pendidikan
 - Dinas Lingkungan Hidup
 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Pemerintah melakukan inovasi dan mewadahi pengembangan serta kerja sama riset.
3. Pengembangan pendidikan keahlian non formal di bidang pertanian untuk generasi muda (diutamakan untuk angkatan usia produktif putus sekolah).
4. Dukungan pemerintah berupa bantuan, pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.
5. Peningkatan kerjasama pelayanan kesehatan dengan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan lingkungan, masyarakat dan kedokteran.
6. Pemerataan kualitas dan kinerja layanan kesehatan terutama di daerah terpencil.
7. Pengembangan sistem transportasi umum yang melayani antar kecamatan dengan menggunakan *green transportation*.



8. Penerapan stop buang air besar sembarangan, tentunya dengan peningkatan layanan fasilitas umum/komunal (MCK).
9. Program pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat (*bank sampah, composting*).
10. Peningkatan sarana prasarana pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA dan penyediaan tong sampah di setiap rumah.
11. Pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan bahan baku yang dapat diperbarui untuk mencukupi kebutuhan listrik pada wilayah terpencil yang kekurangan daya listrik.
12. Pembinaan Desa Mandiri Energi
13. Penyusunan Data Base Pertambangan Energi
14. Program pembangunan jalan dan jembatan untuk memperbaiki aksesibilitas wilayah, meningkatkan dinamisasi perekonomian wilayah dengan memperhatikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan hidup.
15. Program rehabilitasi jalan dan jembatan untuk memperbaiki aksesibilitas wilayah, meningkatkan dinamisasi perekonomian wilayah dengan memperhatikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan hidup.
16. Program pembangunan bandara internasional untuk mengakomodir semakin meningkatnya jumlah kunjungan ke Kabupaten Kotawaringin Barat.
17. Program pembangunan pelabuhan untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat.
18. Pengembangan sistem pertanian tanaman pangan secara organik.
19. Perlu peningkatan kerjasama antara pengelola hutan dan petani.
Kerjasama tersebut dapat berupa:
 - Pengembangan sistem pertanian *agroforestry*;
 - Pembentukan kelompok siaga kebakaran dan penyelamat hutan;
 - Program insentif bagi petani yang terlibat secara aktif dalam penyelamatan hutan.
20. Pelaksanaan dan pengawasan regulasi secara tegas untuk aktivitas penjarahan dan pembakaran hutan, serta perusakan lingkungan perairan dan laut. Pemangku kepentingan yang terkait, antara lain:
 - Bappeda



- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Pertanian
- Dinas Perkebunan
- Dinas Kehutanan
- Dinas Kelautan dan Perikanan

21. Menyusun Rencana Strategis Pengembangan Pertanian sebagai acuan dalam pengembangan potensi pertanian dan untuk mencapai ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Rencana pengembangan pertanian meliputi:

- Analisis kesesuaian lahan untuk tiap komoditi yang potensial dikembangkan
- Analisis ekonomi dan usaha tani
- Analisis sosial budaya
- Analisis daya dukung dan daya tampung lahan pertanian
- Langkah-langkah strategis dalam pengembangan produksi tanaman pangan/hortikultura/perkebunan
- Sistem pertanian berkelanjutan termasuk di dalamnya upaya-upaya meminimalisir dampak lingkungan.

Pemangku kepentingan yang terkait, antara lain:

- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
- Bappeda
- Dinas Lingkungan Hidup

22. Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi pertanian/perkebunan yang aman/ramah lingkungan, murah dan mudah untuk dilaksanakan oleh petani secara umum. Pemangku kepentingan yang terkait, antara lain:

- Bappeda
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
- Dinas Perkebunan
- Perguruan Tinggi
- Lembaga penelitian



23. Program peningkatan produksi perkebunan dengan pemanfaatan teknologi yang memperhatikan keberlanjutan sumberdaya tanah, air dan udara dan pemberdayaan masyarakat
24. Program peningkatan produksi hasil peternakan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, serta pengembangan konversi energi dari pengelolaan limbah.
25. Dukungan pemerintah berupa pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat dan pelaku industri dalam pengelolaan limbah.
26. Program pembinaan Industri Kecil dan Menengah yang disertai dengan pemberdayaan masyarakat.
27. Program peningkatan iklim Investasi dan Realisasi investasi dengan memperkuat perlindungan terhadap pengembangan industri lokal dan keberlanjutan lingkungan.
28. Penyusunan Masterplan Pariwisata terutama untuk mengoptimalkan pemanfaatan pariwisata budaya Kabupaten Kotawaringin Barat yang belum sempat dikembangkan secara tepat. Selain itu untuk mengoptimalkan potensi pariwisata budaya yang dimiliki sekaligus menjaga kelestarian budaya Kabupaten Kotawaringin Barat dan meminimalisir eksploitasi pariwisata secara berlebihan. Masterplan yang diusulkan meliputi:
 - Analisis kesesuaian untuk mendapatkan daya dukung dan daya tampung masing-masing destinasi pariwisata;
 - Pemetaan potensi pariwisata untuk menentukan destinasi utama dan pendukung;
 - Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata;
 - Sistem pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan.
29. Peningkatan kajian kebudayaan lokal untuk mencari aspek yang bisa dikembangkan sebagai ciri khas pariwisata daerah.
30. Integrasi pengembangan pariwisata daerah dengan daerah lain untuk membentuk jalur pariwisata regional.



BAB V HASIL PENGAWASAN MUTU

5.1 HASIL PENGAWASAN MUTU

Pengawasan mutu pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 menjabarkan pernyataan nilai secara kualitatif berdasarkan kelengkapan cakupan, yaitu: (1) Tercakup semuanya; (2) Tercakup sebagian besar; (3) Tercakup sebagian kecil; (4) Tidak tercakup sama sekali. Selain itu terdapat pula kualitas substansi pekerjaan dan/atau saran perbaikan yang perlu dilakukan terkait dengan nilai yang diberikan.

Tabel 5. 1 Instrumen Pengawasan Mutu Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022

No	Kegiatan	Nilai			
		1	2	3	4
1.	KLHS dalam Persiapan Penyusunan RPJMD				
	1.1. Membentuk Pokja PL yang komposisi keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan daerah.	√			
	1.2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja yang meliputi: (a) latar belakang, (b) tujuan dan sasaran, (c) lingkup kegiatan, (d) hasil yang diharapkan, (e) rencana kerja dan metode pengkajian, (f) tenaga ahli yang diperlukan, dan (g) waktu dan pembiayaan.	√			
	1.3. Mengidentifikasi dan melibatkan narasumber yang sesuai dengan cakupan daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan.	√			
	1.4. Melakukan Pra-Pelingkupan untuk memperoleh daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan (isu lingkungan, isu sosial budaya, isu ekonomi)	√			
	1.5. Mengidentifikasi dan menganalisis Pemangku Kepentingan sesuai dengan cakupan daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan.	√			
2.	KLHS dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJMD				
	2.1 Melakukan Pelingkupan:	√			
	a. Memverifikasi daftar panjang Isu-Isu Pembangunan berkelanjutan;				
	b. Menapis daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menjadi daftar pendek Isu-isu Pembangunan;				
	c. Menetapkan Isu-Isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus KLHS;				
	d. Menetapkan lingkup wilayah dan lingkup waktu				



No	Kegiatan	Nilai			
		1	2	3	4
	dari huruf c.				
	2.2 Pengumpulan dan Analisis Baseline Data: a. Faktor pendorong terjadinya isu; b. Penyajian Data dan Informasi dalam bentuk baseline data yang menjelaskan: (a) posisi awal isu berikut pola kecenderungan di masa lalu sampai masa kini, dan (b) prediksi ke depan kecenderungan isu-isu pembangunan berkelanjutan apabila RPJMD belum mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.		√		
	2.3 Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup kajian sebagai berikut: a. Mengkaji Prinsip Keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor, antar pemangku kepentingan); b. Mengkaji Prinsip Keseimbangan (ekonomi, sosial, lingkungan hidup); c. Mengkaji Prinsip Keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar generasi);	√			
	2.4 Pengkajian Pengaruh Indikasi Program Prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan: a. Mengkaji pengaruh indikasi program prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan meliputi (1) Identifikasi dan penentuan program prioritas yang akan dikaji; (2) Pengkajian pengaruh program prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan; dan (3) Merangkum hasil kajian; b. Memverifikasi hasil huruf a dan b dengan para pakar untuk memperoleh pandangan pakar (<i>expert judgement</i>) dalam memastikan terpenuhinya/terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan;	√			
	2.5 Perumusan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan dalam Penyusunan RPJMD yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan: a. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil rumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif; b. Menyampaikan rumusan rekomendasi kepada pemangku kepentingan, memprioritaskan dan menyepakati rekomendasi; c. Mengonsultasikan dan menyepakati substansi rekomendasi bersama SKPD; d. Menyusun draft laporan KLHS; e. Mengintegrasikan kesepakatan substansi	√			



No	Kegiatan	Nilai			
		1	2	3	4
	rekomendasi ke rancangan awal RPJMD bersama Tim Penyusun RPJMD.				
3.	Peranserta Pemangku Kepentingan				
	3.1. Pelibatan seluruh unsur pemangku kepentingan yang relevan (pemerintah, organisasi non pemerintah, academia, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan)	√			
	3.2. Pelibatan unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses KLHS: a. Pelingkupan, b. Baseline data, c. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan d. Pengkajian Pengaruh e. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif f. Perumusan Rekomendasi		√		

* Nilai:

- 1 = Tercakup Sepenuhnya
- 2 = Tercakup Sebagian Besar
- 3 = Tercakup Sebagian Kecil
- 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali

Berdasarkan tabel evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 telah dilakukan dengan baik sesuai panduan yang ditetapkan dalam Permendagri No 67 Tahun 2012. Tiap tahap yang dilakukan telah diupayakan seoptimal mungkin dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan didukung oleh data yang cukup lengkap. Setiap pemangku kepentingan telah memberikan kontribusi yang maksimal baik berupa data maupun masukan berupa ide dan saran yang sangat bermanfaat. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas hasil KLHS dimasa yang akan datang disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan dukungan data yang lebih lengkap dan akurat.
2. Tersedia waktu yang cukup dalam pelaksanaan KLHS
3. Peningkatan komunikasi antara Tim Penyusun KLHS dengan Tim Penyusun RPJMD.
4. Peningkatan kerjasama dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahap pelaksanaan KLHS sekaligus peningkatan jumlah pemangku kepentingan yang dilibatkan untuk dapat mengakomodasikan semua komponen masyarakat.



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat bertujuan membangun kapasitas pelaksanaan RPJMD di daerah. Kapasitas tim KLHS Kabupaten Kotawaringin Barat memperkuat proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup (pembangunan berkelanjutan) kedalam rumusan kebijakan, rencana, dan program dalam rancangan RPJMD serta untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan yang digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan.

Kepastian akan akomodasi dan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilakukan dengan menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari kebijakan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara praktis telah dilakukan dengan memfokuskan pada kemungkinan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, terutama terhadap keterkaitan masing masing program terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan yang teridentifikasi.

Berdasarkan hasil pra pelingkupan didapatkan 66 isu hasil verifikasi daftar isu panjang terkait isu lingkungan, sosial, dan ekonomi, pada proses pelingkupan isu panjang tersebut kemudian disepakati 7 isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan isu berdasarkan kondisi eksisting permasalahan yang sedang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat dan diprioritaskan dengan pertimbangan posisi dampak strategis. Isu tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan;



3. Peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan penduduk;
4. Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun;
5. Meningkatkan penegakan hukum;
6. Mengoptimalkan pengelolaan SDA;
7. Mengoptimalkan pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata.

Pada penilaian dan pembobotan isu pembangunan berkelanjutan dengan kriteria dari 7 isu penting, diketahui bahwa yang menjadi isu strategis KLHS dan isu prioritas dengan memiliki nilai dan bobot tertinggi yaitu:

1. Menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun;
2. Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong perbaikan SDM;
3. Meningkatkan penegakan hukum.

Ketiga isu tersebut menjadi prioritas utama aplikasi program RPJMD untuk membangun solusi akar-masalahnya, dengan harapan teratasinya ketiga isu tersebut, isu strategis KLHS lainnya akan lebih mudah untuk tertangani dan tercegah dari dampak kerusakan yang lebih besar.

6.2 SARAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD merupakan suatu fasilitas dan media proses belajar bersama antara pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Peningkatan kualitas RPJMD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam KLHS ini diartikulasikan dengan perumusan mitigasi, alternatif, serta rekomendasi untuk setiap gambaran keterkaitan antara rumusan RPJMD dengan isu serta keterkaitan RPJMD dengan kebijakan lain secara vertikal dan horizontal.

Dari sisi manfaat, KLHS secara praktis akan mampu:

1. Teridentifikasinya pengaruh atau konsekuensi dari RPJMD terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.



2. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi.
3. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan substansi RPJMD.
4. Memberikan alternatif-alternatif baru pembangunan berkelanjutan tanpa harus menggagalkan rencana program yang telah diusulkan
5. Menjembatani konflik kepentingan pembangunan dengan kepentingan penjagaan keberlanjutan lingkungan hidup
6. Memudahkan kinerja koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar kebijakan pembangunan daerah demi meningkatkan jaminan keberlangsungan program.
7. Peningkatan mutu perencanaan dengan jaminan pertimbangan komprehensif atas aspek-aspek administrasi dan fungsi wilayah.
8. Penjaminan keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses pengambilan keputusan program pembangunan.

Dengan gambaran kemanfaatan KLHS seperti yang disebutkan diatas, alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang teridentifikasi melalui rekomendasi segera ditindaklanjuti dengan penyusunan program-kegiatan praktis di masing-masing SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun rumusan program pembangunan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan program pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dalam sistem pendidikan dengan menjaga kelestarian lingkungan dan penerapan teknologi informasi dan computer di setiap tingkatan dengan aksi nyata.
2. Pemerintah melakukan inovasi dan mewadahi pengembangan serta kerja sama riset.
3. Pengembangan pendidikan keahlian non formal di bidang pertanian untuk generasi muda (diutamakan untuk angkatan usia produktif putus sekolah).
4. Dukungan pemerintah berupa bantuan, pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.



5. Peningkatan kerjasama pelayanan kesehatan dengan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan lingkungan, masyarakat dan kedokteran.
6. Pemerataan kualitas dan kinerja layanan kesehatan terutama di daerah terpencil.
7. Pengembangan sistem transportasi umum yang melayani antar kecamatan dengan menggunakan *green transportation*.
8. Penerapan stop buang air besar sembarangan, tentunya dengan peningkatan layanan fasilitas umum/komunal (MCK).
9. Program pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat (*bank sampah, composting*).
10. Peningkatan sarana prasarana pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA dan penyediaan tong sampah di setiap rumah.
11. Pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan bahan baku yang dapat diperbarui untuk mencukupi kebutuhan listrik pada wilayah terpencil yang kekurangan daya listrik.
12. Pembinaan Desa Mandiri Energi
13. Penyusunan Data Base Pertambangan Energi
14. Program pembangunan jalan dan jembatan untuk memperbaiki aksesibilitas wilayah, meningkatkan dinamisasi perekonomian wilayah dengan memperhatikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan hidup.
15. Program rehabilitasi jalan dan jembatan untuk memperbaiki aksesibilitas wilayah, meningkatkan dinamisasi perekonomian wilayah dengan memperhatikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan hidup.
16. Program pembangunan bandara internasional untuk mengakomodir semakin meningkatnya jumlah kunjungan ke Kabupaten Kotawaringin Barat.
17. Program pembangunan pelabuhan untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat.
18. Pengembangan sistem pertanian tanaman pangan secara organik.
19. Perlu peningkatan kerjasama antara pengelola hutan dan petani. Kerjasama tersebut dapat berupa pengembangan sistem pertanian *agroforestry*, pembentukan kelompok siaga kebakaran dan penyelamat hutan; program insentif bagi petani yang terlibat secara aktif dalam penyelamatan hutan.



20. Pelaksanaan dan pengawasan regulasi secara tegas untuk aktivitas penjarahan dan pembakaran hutan, serta perusakan lingkungan perairan dan laut.
21. Menyusun Rencana Strategis Pengembangan Pertanian sebagai acuan dalam pengembangan potensi pertanian dan untuk mencapai ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
22. Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi pertanian/perkebunan yang aman/ramah lingkungan, murah dan mudah untuk dilaksanakan oleh petani secara umum.
23. Program peningkatan produksi perkebunan dengan pemanfaatan teknologi yang memperhatikan keberlanjutan sumberdaya tanah, air dan udara dan pemberdayaan masyarakat.
24. Program peningkatan produksi hasil peternakan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, serta pengembangan konversi energi dari pengelolaan limbah.
25. Dukungan pemerintah berupa pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat dan pelaku industri dalam pengelolaan limbah.
26. Program pembinaan Industri Kecil dan Menengah yang disertai dengan pemberdayaan masyarakat.
27. Program peningkatan iklim Investasi dan Realisasi investasi dengan memperkuat perlindungan terhadap pengembangan industri lokal dan keberlanjutan lingkungan.
28. Penyusunan Masterplan Pariwisata terutama untuk mengoptimalkan pemanfaatan pariwisata budaya Kabupaten Kotawaringin Barat yang belum sempat dikembangkan secara tepat. Selain itu untuk mengoptimalkan potensi pariwisata budaya yang dimiliki sekaligus menjaga kelestarian budaya Kabupaten Kotawaringin Barat dan meminimalisir eksploitasi pariwisata secara berlebihan.
29. Peningkatan kajian kebudayaan lokal untuk mencari aspek yang bisa dikembangkan sebagai ciri khas pariwisata daerah.
30. Integrasi pengembangan pariwisata daerah dengan daerah lain untuk membentuk jalur pariwisata regional.

LAMPIRAN

Notulensi Presentasi Akhir
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Oktober 2017

SARAN:

Dinas PUPR:

1. Sudah mencakup pariwisata, pertanian, infrastruktur.
2. Belum terdapat Perda yang mengatur arah kebijakan tsb agar dapat diatur dlm tata ruang agar pembangunan tidak melenceng, terutama regulasi thp kehutanan.

Inspektorat:

1. Dampak dan resiko terhadap lingkungan hidup belum ada?

Dinas Ketahanan Pangan

1. Misi 3: Ketahanan Pangan

Sasaran: Kedaulatan pangan

Menyetujui rekomendasi untuk memunculkan regulasi lahan pertanian berkelanjutan karena terdapat exlahan pertanian digunakan kebun sawit. Apakah regulasi ini mampu mengatasi hal ini? Bagaimana mengkondisikan masyarakat untuk mau menyediakan pangan?

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Misi 5: Meningkatkan Pemberdayaan Masy

Apakah dari PBMDes masalah SDA dan teknologi tepat guna apakah dapat ditingkatkan dan ditajamkan? Karena masyarakat Kobar kurang tertarik mengikuti peningkatan teknologi. Ada contoh dr kabupaten lain ada PBMDes dengan menggunakan teknologi tepat guna.

Dinas Perumahan Permukiman

1. Isu 4: Menjaga lingkungan dan hutan.

Keterkitan pengembangan perkebunan sawit dan agroindustri dengan guna lahan dan lingkungan (sinkronisasi)

Dinas Pariwisata

1. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan berbasis ekologi perlu di berikan pembeding, TNTP dan Tanjung Kluang sampai saat ini pengelolaannya (PAD) menjadi ranah pusat, bagi kabupaten tidak mendapatkan pendapatan dari hal tsb.

2. Sasaran: Meningkatnya wisatawan.
Dinas Pariwisata sudah menyusun RIPPDesa melingkupi 6 kecamatan. Apakah RIPPDesa masuk ke sasaran tersebut?
3. Masterplan. Tempat wisata yg ada terutama hutan wisata sudah dibuat PerBub mengenai hal ini. Dinas Pariwisata mengajukan masterplan untuk destinasi wisata selain kebun raya.

Dinas Perhubungan

1. Adanya pembangunan bandara internasional dan pelabuhan samudra. Dalam KLHS ini apakah ada kajian tsb?
2. Penggunaan lahan perkebunan lebih besar % dari yang lain apakah ini tidak diangkat menjadi isu dampaknya terhadap masyarakat?

Ketahanan Pangan

1. Ingin tahu kajian apa yang akan dilaksanakan KLHS sebelum kami melaksanakan pertanian perkebunan agar sinkron. Ingin melihat dari RTRW juga.
2. Jika ditinjau dr tujuan, harusnya ada data.

Pak Suradi

1. Isu: pengelolaan lingkungan hidup di bidang energy belum ada.
Apakah masuk didalam isu pengelolaan SDA?

Pak Tri Joko:

1. Bandara Iskandar Pangkalan Bun tidak masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN).



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**
Jl. H.M. Rafi'i No. 3, Pangkalan Bun, Prop. Kalimantan Tengah, 74112

2017